



Artikel

Vol. 6 No. 1 Tahun 2019

1. Sinergitas Bhabinkamtibmas dan mantan Napiter dalam upaya Deradikalisasi di Kabupaten Poso
Andi Febri Herawati, Jenny Ratna Suminar, Edwin Rizal, Ninis Agustini Damayani
2. Iklim Komunikasi Antara Etnis Bugis dan Etnis Kaili di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah
Fitriani Puspa Ningsih
3. Eksistensi Solidaritas To Kaili Di Kota Palu
Indah Ahdiah, Andi Mascunra Amir
4. Pengaruh Tayangan Indonesia Lawyer Club (Ilc) Terhadap Sikap Kesadaran Hukum (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas)
Ivan Taufiq, Ernita Arif, Indraddin
5. Kampanye #Endviolence Dalam Rangka Kemitraan Global Unicef-Indonesia Untuk Mendorong Pengakhiran Kekerasan Terhadap Anak 2016-2017
Nabilla Deviana Lestari
6. Perilaku Komunikasi Mahasiswa Dalam Menghadapi Informasi Hoax Facebook Berbasis Individual Competence Framework
Naifah Kurnia, Yanti Setianti, Aat Ruchiat Nugraha
7. Komunikasi Dalam Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Kaili
Nuraedah
8. Wonder Woman Era Generasi Z (Resepsi Generasi Z pada Representasi Karakter Wonder Woman dalam Film Wonder Woman Tahun 2017)
Patrisia Amanda Pascarina
9. Otoritas Penanggulangan Bencana Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Palu
Subhan Haris
10. Pendekatan Komunikasi Pada Penggabungan Kelurahan Di Kota Payakumbuh
Syafrianto. I, Ernita Arif, Azwar

Indexed By:



KINESIK
eISSN 2302-2035

EDITORIAL TEAM

Person In Charge

Muhammad Khairil, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako

Editor In Chief

Sumarni Zainuddin, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako

Vice Editor

Muh wahid, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tadulako, Indonesia

Editor

Andi Febri Herawati, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako, Indonesia

Rizqy Alfiaty, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tadulako, Indonesia

Edwan, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Citra Antasari, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tadulako, Indonesia

Sabda Tarotrinarta, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako, Indonesia

Reviewer

Astuty, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako,
Indonesia

Arianto, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin, Indonesia

Muhammad Khairil, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako

Admin Staff

Firmansyah, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tadulako, Indonesia

Bachrul, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tadulako, Indonesia

Nurliana Umar, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tadulako, Indonesia

Admin, Layout dan Desain Grafis

Gemilang Bayu Ragil Saputra, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tadulako

DAFTAR ISI

SINERGITAS BHABINKAMTIBMAS DAN MANTAN NAPITER DALAM UPAYA DERADIKALISASI DI KABUPATEN POSO

**Andi Febri Herawati, Jenny Ratna Suminar, Edwin Rizal,
Ninis Agustini Damayani 1**

IKLIM KOMUNIKASI ANTARA ETNIS BUGIS DAN ETNIS KAILI DI DESA LANGALESO KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Fitriani Puspa Ningsih 12

EKSISTENSI SOLIDARITAS TO KAILI DI KOTA PALU

Indah Ahdiah, Andi Mascunra Amir 22

PENGARUH TAYANGAN INDONESIA LAWYER CLUB (ILC) TERHADAP SIKAP KESADARAN HUKUM (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS)

Ivan Taufiq, Ernita Arif, Indraddin 34

KAMPANYE #ENDVIOLENCE DALAM RANGKA KEMITRAAN GLOBAL UNICEF-INDONESIA UNTUK MENDORONG PENGAKHIRAN KEKERASAN TERHADAP ANAK 2016-2017

Nabilla Deviana Lestari, Arif Susanto 48

PERILAKU KOMUNIKASI MAHASISWA DALAM MENGAHADAPI INFORMASI HOAX FACEBOOK BERBASIS INDIVIDUAL COMPETENCE FRAMEWORK

Naifah Kurnia, Yanti Setianti, Aat Ruchiat Nugraha 64

KOMUNIKASI DALAM KEPEMIMPINAN TRADISIONAL MASYARAKAT KAILI

Nuraedah 77

WONDER WOMAN ERA GENERASI Z (RESEPSI GENERASI Z PADA REPRESENTASI KARAKTER WONDER WOMAN DALAM FILM WONDER WOMAN TAHUN 2017)

Patrisia Amanda Pascarina 88

OTORITAS PENANGGULANGAN BENCANA DI KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PALU

Subhan Haris 100

PENDEKATAN KOMUNIKASI PADA PENGGABUNGAN KELURAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH

Syafrianto. I, Ernita Arif, Azwar 115

SINERGITAS BHABINKAMTIBMAS DAN MANTAN NAPITER DALAM UPAYA DERADIKALISASI DI KABUPATEN POSO

Andi Febri Herawati^{1*}, Jenny Ratna Suminar², Edwin Rizal², Ninis Agustini Damayani²

¹*Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Tadulako, Indonesia
Jln. Soekarno Hatta Km. 9 Kota Palu Sulawesi Tengah.*

²*Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Indonesia
Jl. Raya Jatinangor, Kab. Sumedang*

**Email: Andifebriherawati@yahoo.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sinergitas Bhabinkamtibmas dan mantan Napiter dalam upaya deradikalisasi di Kabupaten Poso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan, studi dokumentasi dan data-data terkait dengan tema penelitian. Informan penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan terlibat langsung dalam program deradikalisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa institusi polri khususnya dipolres poso melibatkan bhabinkamtibmas dalam melakukan deradikalisasi kepada mantan napiter, keluarga serta simpatisan karena dianggap mengetahui secara spesifik tentang karakter dari para mantan napiter, keluarga serta simpatisan. Ketika para mantan napiter telah keluar dari tahanan dan bergabung dengan masyarakat maka bhabinkamtibmas lah yang akan sering bertemu dengan mereka, beberapa hal yang telah dilakukan yaitu melakukan door to door system, bersilaturahmi dan memberikan bantuan dalam berbagai hal seperti (bedah rumah, bantuan modal, memfasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan) namun bantuan ini bukan memanjakan mereka melainkan sekedar memotivasi mereka untuk tetap melanjutkan kehidupannya, karena para mantan napiter setelah keluar dari tahanan mereka memulai kehidupannya dari awal lagi, jadi tugas polri adalah membantu mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak sesuai dengan kemampuan polri.

Kata Kunci : Deradikalisasi; Bhabinkamtibmas; Terorisme

Submisi : 8 Februari 2019

Latar Belakang

Deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan. Proses deradikalisasi lebih mengutamakan dialog dari pada tindakan fisik

sehingga lebih mengena dan aman dari pelanggaran HAM. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan

mau berpartisipasi dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia.

Deradikalisasi merupakan program untuk mencegah dan menanggulangi bahaya terorisme, institusi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakannya adalah BNPT, Polri, serta bekerjasama dengan tokoh agama, pemerintah daerah dan masyarakat. BNPT melakukan upaya deradikalisasi kepada pelaku terorisme yang sementara menjalani masa hukuman, setelah pelaku teroris bebas dan berstatus mantan teroris program deradikalisasi tetap berlanjut namun bukan hanya BNPT yang berperan, polisi lokal yang ada di daerah juga berperan penting untuk mengubah pola pikir dari para mantan pelaku teroris, keluarga serta simpatisan untuk tidak kembali melakukan tindakan terorisme melalui pendekatan persuasif dan bantuan-bantuan dengan jumlah yang tidak besar namun bermanfaat.

Pada tingkat daerah khususnya Polres Poso yang melaksanakan program deradikalisasi adalah Unit Binmas (Bhabinkamtibmas), karena mereka mempunyai wilayah binaan dan lebih sering berinteraksi serta mengetahui kehidupan sehari-hari, karakteristik para keluarga pelaku terorisme, eks terorisme dan keluarga serta simpatisannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Poso "AKBP. Bogiek Sugiarto. SH. SIK bahwa Peran Polri (Polres Poso) dalam proses penanganan deradikalisasi di kabupaten Poso khusus pada napi teroris dan keluarganya, eks teroris dan keluarganya telah dilakukan

beberapa upaya oleh Polres Poso di antaranya dalam bentuk program yaitu polisi mandago raya/polisi yang baik hati yang mengangkat kearifan lokal, sasarannya adalah menyentuh secara dini dengan melakukan komunikasi yang baik dengan napi terorisme dan keluarganya serta eks teroris dan keluarganya dengan melibatkan bhabinkamtibmas, karena polisi lokal Babinkamtibmas mereka lebih mengetahui bagaimana wilayahnya dan karakteristik dari warganya, kemudian pendekatan lain yang dilakukan adalah memfasilitasi istri dari pelaku teroris untuk bisa bertemu dengan suaminya, dimana bhabinkamtibmas mengantarkan langsung ke Lapas, kemudian diperhatikan kebutuhan keluarganya selama suaminya berada dalam LP, program lainnya bedah rumah, program LAPERA (Lantas Peduli Radikalisme) dimana fungsi lalu lintas memberikan program pembuatan SIM kepada keluarga pelaku terorisme yang masih menjalani hukuman dan eks Terorisme beserta keluarganya, dengan adanya SIM jadi mereka juga patuh / taat hukum yg dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian terkait kesejahteraan ekonomi dari Polri mengarahkan dan memfasilitasi mereka untuk bekerja dan produktif dalam hal yang positif. Namun Saat ini untuk penanganan deradikalisasi secara terintegral dengan Pemerintah kabupaten, Kodim itu belum ada, begitu juga dengan BNPT. (Wawancara 22 September 2017)

Hal yang mendasar terkait radikalisme Poso bahwa di Poso radikalisme terbentuk diawali dengan konflik komunal dan kekecewaan

terhadap aparat terutama polri dalam penanganan konflik yang dianggap tidak adil, penanganan radikalisme di Kabupaten Poso dilakukan secara khusus dengan mengedepankan kearifan local yang berlaku di wilayah Kabupaten Poso, sehingga diperlukan suatu program dalam rangka deradikalisasi, kontraradikalisasi dan rehabilitasi dengan mengedepankan peran Polisi Lokal.

Legalitas dari pelaksanaan program deradikalisasi oleh Polri tertuang dalam Commander Wish Kapolri poin 4, misi Kapolri poin 7 dan Program Kapolri poin 3 dan 8, serta Quick Wins Kapolri poin 2 yang kemudian Polres Poso menuangkan dalam program “Madago Raya” Penguatan peran polisi lokal personel polres poso dalam kegiatan deradikalisasi yaitu Mapping wilayah radikalisme, Membangun sinergitas penanganan radikalisme dengan stakeholder, dan Mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, sedangkan untuk kontra deradikalisasi yaitu Menentukan klasifikasi / Kelurahan / Desa dusun dengan karakteristik berupa ancaman radikalisme, Pendataan jumlah korban radikalisme, Melaksanakan kegiatan Operasi Cipta Kepolisian. Kemudian terkait Rehabilitasi Polres Poso melakukan Perawatan terhadap ex napi teroris, Perawatan terhadap keluarga napi yang masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, dan Perawatan terhadap keluarga DPO yang meninggal dunia akibat penegakkan hukum Polri.

Kondisi yang menarik dalam penelitian ini adalah yang melatar

belakangi mantan napiter melakukan tindakan terorisme adalah bukan murni karena faktor ideologi melainkan faktor dendam saat konflik poso terjadi yang banyak memakan korban dari phak keluarga mereka, dan yang melakukan deradikalisasi dari pihak institusi polri adalah unit Binmas karena Bhabinkamtibmas lah yang mengetahui secara spesifik karakteristik dari para mantan napiter yang merupakan polisi lokal.

Permasalahan aksi-aksi kekerasan di Kabupaten Poso oleh kelompok islam radikal dapat dijelaskan secara lebih sistematis bahwa dalam konteks masalah perorangan beberapa fakta yang terkait dengan masalah tersebut diantaranya adalah persoalan dendam, trauma psikologis, kesulitan ekonomi, hak keperdataan, keputusan dan kasusu-kasus yang belum tersentuh secara maksimal. Berbagai persoalan perorangan tersebut kemudian memicu potensi aksi kekerasan dan tindak terorisme. (Khairil : 2011)

Sesungguhnya terorisme atau aksi kekerasan yang dilakukan secara sistematis terjadi karena adanya dua unsur utama yaitu pertama adalah terkait dengan adanya permasalahan tuntutan yang ingin dicapai dan yang kedua adalah adanya pandangan ideologi atau politik tertentu yang melegitimasi pelaku teror untuk melakukan kekerasan. Selain itu, Sageman dan Richardo (dalam Karnavian, 2008) mengemukakan bahwa terorisme disebabkan oleh tiga faktor yaitu pertama, tuntutan masalah perorangan, kedua, tuntutan kolektif yang membuat individu-individu secara kolektif memiliki tanggung jawab terhadap komunitasnya, ketiga

adalah pandangan ideologi atau politik yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tuntutan tersebut.

Deradikalisasi

Deradikalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *deradicalisation* yang kata dasarnya adalah *radical*. Kata radikalisasi sering digunakan untuk menggambarkan proses dimana individu mentransformasi pandangan mereka terhadap dunia dari kondisi suatu masyarakat yang cenderung “normal” menuju masyarakat yang cenderung “ekstrim”. Dalam beberapa kasus, individu tersebut kemudian akan melibatkan diri mereka dalam tahap berikutnya yaitu melakukan tindakan-tindakan kekerasan (Septian, 2010: 114).

Konsep deradikalisasi belum banyak yang mendefinisikan, tapi pada dasarnya deradikalisasi adalah suatu usaha untuk mengajak para teroris dan para pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Seperti usaha diplomasi publik yang bertujuan untuk “memenangkan hati dan pikiran” (ICG, 2007:1).

Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada memodifikasi interpretasi naskah-naskah religius, memberi jarak atau melepaskan ikatan (*disengagement*) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat (ICG, 2007:7).

Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme

maupun bagi simpatisan. Lebih lanjut Golose, menekankan bahwa program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Sehingga dalam pelaksanaannya (deradikalisasi) perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi. Deideologi ini kunci utama dalam penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar. Proses deradikalisasi sebenarnya adalah pembalikan dari proses radikalisasi yang dimulai dari perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, dan pemahaman jihad yang disesatkan. Jadi, proses deradikalisasi dimulai dari identifikasi dan klasifikasi narapidana dan mantan narapidana, fokus penanganan terpadu, disengagement dengan pendekatan humanis, *soul approach* (pendekatan jiwa) dan deideologi, multikulturalisme dan kemandirian (Septian, 2010: 115-116).

Pendekatan lunak (*soft approach*) lazim dilakukan melalui program deradikalisasi seperti mengedepankan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat di tingkat kewilayahan yang mencakup kemitraan, serta kebijakan berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan sekadar menerapkan peraturan. Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap keliru dan menyimpang. Pencegahan terorisme melalui konsep deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat. Konsep deradikalisasi harus dijadikan “kontra-

ideologi terrorisme” dan melembaga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sampai pada lapisan masyarakat terbawah.

Pola dan jaringan dari sekian banyak kasus terrorisme yang terjadi di Indonesia, pola dan jaringannya terlihat mengalami perubahan dan berkembang dari satu pola ke pola yang lain. Konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen Polri untuk meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat luas. Implikasi perubahan sudut pendekatan tersebut mengubah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam perang melawan terrorisme. Ketiga unsur sistem hukum antiterrorisme tersebut harus bermuara pada deradikalisasi terrorisme sebagai sasaran antara menuju “bumi hangus akar terrorisme” dalam masyarakat Indonesia. Melawan terrorisme itu tidak semata menggunakan pola pengerahan kekuatan dan kemudian penanganannya melalui tindakan keras. Akan lebih baik bila penanganannya dengan cara melakukan pencegahan dengan menggunakan *soft power*. Oleh karena itu, penerapan deradikalisasi terhadap terpidana terroris dilakukan dengan merehabilitasi sebagai upaya penyadaran pemahaman yang salah. Di samping itu juga, sangat diperlukan peran para tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam upaya memberikan pendidikan agama yang benar dan mereduksi berkembangnya ideologi radikal.

Sasaran dan target deradikalisasi tahap pencegahan adalah masyarakat luas, baik yang sudah mengidap virus radikalisme dan terutama yang belum terkena pengaruh radikalisme. Dengan menggandeng banyak pihak, baik lembaga negara maupun peran serta masyarakat, program deradikalisasi ini sangat positif.

Deradikalisasi tahap penindakan lebih banyak berkaitan dengan wilayah

penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT, kepolisian, kejaksaan dan hakim yang memutuskan perkara terrorisme. Tahap ini lebih banyak mengandalkan *show of force* dari aparat untuk menjaga kewibawaan negara. Sekalipun dapat dikatakan terlambat karena radikalisme sudah berbuah teror dalam bentuk nyata, upaya deradikalisasi tetap dilakukan sekalipun dengan sasaran terbatas, yaitu pelaku teror dan jaringannya. Di sela-sela menjalani proses hukum, tersangka atau terdakwa dapat disentuh hatinya agar menyadari kekeliruan dalam tindakan teror yang dilakukan. Program deradikalisasi adalah keharusan agar yang radikal menjadi moderat (*curative deradicalization*), dan yang moderat tidak menjadi radikal (*preservative and preventive deradicalization*).

Program deradikalisasi yang dilakukan Polri bisa menjadi ujung tombak dalam sosialisasi dan antisipasi bahaya radikalisme dan terrorisme di Indonesia. Deradikalisasi dapat dimulai langsung dari akar radikalisme yang dimaksudkan sebagai deradikalisasi pencegahan dan pemeliharaan. Dengan model ini, deradikalisasi bersifat proaktif dan tidak menunggu sampai terjadi, misalnya aksi terrorisme. Selain itu, model ini dapat digunakan untuk deteksi dini apakah seseorang atau sekelompok orang berpotensi berpikir dan bertindak radikal. Deradikalisasi merupakan kerja lanjutan setelah diketahui akar radikalisme paham radikal.

Terorisme

Kata teror berasal dari bahasa latin “*ter* ‘or less” yang berarti ketakutan (*fright*) atau rasa sangat takut (*Great Fear*). Terrorism berarti “*policy of getting what one wants in politic by using murder etc*”. Dalam kamus Webster’s New School and

Office Dictionary oleh Noah Webster, Fawcett Crest Book (dalam Carver dkk, 1974:112), disebutkan bahwa teror berarti *Extreme fear* (ketakutan yang amat sangat), *one who excites extreme fear* (kemampuan menimbulkan ketakutan), atau pengertian tersebut dapat juga diartikan sebagai *the systematic use of violence, as murder, by a party or faction to maintain power, promote, political, etc.*

Menurut Adams (1986: 6) terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbuhkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.

Dalam mendefinisikan terorisme, kesulitan yang dihadapi adalah berubahnya wajah terorisme dari waktu ke waktu. Pada saat tertentu terorisme merupakan tindakan yang dilakukan negara, pada waktu yang lain terorisme dilakukan oleh kelompok non negara, atau oleh kedua-duanya. Walter Laquer menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa meng-Cover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah.

Black Law Dictionary memberikan definisi terorisme sebagai *The Use of Threat of Violence to Intimidate or Cause Panic; Especially as a means of Affecting Political Conduct.* Menurut T. P. Thorntondalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) terorisme didefinisikan sebagai

penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.

Metode Penelitian

lokasi penelitian ini adalah Polres Poso (Polsek Poso kota, Polsek Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara) karena sektor tersebut merupakan wilayah basis tempat tinggal dari para mantan napiter, keluarga serta simpatisan. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif (kualitatif) dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2014:138). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih berdasarkan kepentingan penelitian (*purposive*) diantaranya berasal dari pimpinan Polri daerah Sulteng dan kabupaten Poso, anggota kepolisian (Bhabinkamtibmas, Lantas), mantan napiter, keluarga napiter yang sementara menjalani masa hukuman, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Bupati, dan TNI

Hasil dan Pembahasan

Pelaku terorisme di kabupaten Poso merupakan orang-orang yang memiliki karakter khusus dimana latar belakang melakukan tindakan terorisme bukan murni karena faktor ideologi namun karena faktor dendam akibat konflik Poso pada tahun 2000 yang menelan banyak korban dari keluarga para mantan napiter, yang kemudian dendam tersebut difasilitasi oleh kelompok radikal yang datang ke kota Poso untuk mempengaruhi pemuda-pemuda Poso

dengan mencuci otak mereka dengan paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan ajaran islam yang sebenarnya.

Radikalisme islam merupakan sebuah proses politik yang mengancam dunia sebagai sebuah gerakan politik keagamaan. Radikalisme memang bukan fenomena islam saja, tetapi fenomena global yang melanda dunia ketika kondisi dunia dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi gagasannya. Itulah sebuah gagasan tentang “dunia idaman” dimasa lampau, dengan menjadikan apa-apa yang terjadi dan ada sekarang dianggap tidak sesuai dengan ajaran kitabiah sehingga harus dirombak. (Hillel dan Inbar,2008:5)

Institusi Polri memiliki peran penting dalam mengembalikan pola pikir mantan napiter agar tidak kembali melakukan tindakan terorisme melalui program deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan sebuah strategi yang mengacu pada tindakan preventif kontra terorisme atau strategi untuk menetralsir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali kejalan pemikiran yang lebih moderat.

Polres poso sebelum melakukan upaya deradikalisasi terlebih dahulu melakukan identifikasi status para mantan napiter, proses identifikasi dilakukan oleh unit Intel dengan mendata seluruh para mantan napiter dan simpatisan. Data yang diperoleh merupakan langkah awal Bhabinkamtibmas yang diberi wewenang dalam program deradikalisasi untuk mencari tahu lingkungan tempat tinggalnya, latar belakang keluarganya, dan kesehariannya seperti apa agar pada saat melakukan *door to door system* Bhabinkamtibmas sudah memiliki gambaran dalam melakukan

pendekatan dan mendesain pesan-pesan yang ingin disampaikan, setidaknya bhabinkamtibmas memiliki rencana kegiatan. Identifikasi status juga membantu pihak kepolisian untuk mengetahui mantan napiter yang akan menjadi sasaran prioritas dalam hal pemberian bantuan berupa modal usaha, bedah rumah, dll. Mantan napiter yang menjadi sasaran prioritas adalah yang dianggap berpengaruh dalam komunitasnya pada saat bergabung dikelompok radikal, dan yang memiliki kehidupan yang tidak layak yang sangat rentan untuk terpengaruh kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polres Poso bahwa dengan adanya identifikasi yang dilakukan oleh Unit Intel sangat memudahkan Unit Binmas untuk membuat sebuah strategi dalam melakukan pendekatan kepada mantan napiter dan kami pun mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi sasaran prioritas yang akan mendapatkan bantuan dari polres poso, harus ada skala prioritas karena anggaran kami terbatas namun kedepannya Unit Binmas sudah merancang agar semua mantan napiter bisa mendapatkan bantuan modal usaha. Tapi strategi lain seperti melakukan sambang kunjung, melakukan silaturahmi dan memfasilitasi ketika mantan napiter butuh bantuan tetap kami lakukan secara kontinue kepada semua mantan napiter yang ada di Kabupaten Poso. Tujuan dilakukan hal seperti ini yaitu mengalihkan mereka untuk tidak terpengaruh dan tidak kembali kekelompok radikal. Memberikan bantuan kepada para napiter bukan untuk memanjakan mereka, namun ini merupakan bentuk bantuan, karena mereka keluar dari tahanan memang tidak punya pekerjaan, harus mulai menata kehidupan mereka dari nol kembali, dan tentunya mereka agak susah mencari pekerjaan ataupun pinjaman

modal karena latar belakang mereka sebagai napiter, sehingga dari pores poso berinisiatif untuk memberikan bantuan berupa modal ataupun memfasilitasi para napiter untuk mendapatkan pekerjaan, selain itu membantu untuk memfasilitasi untuk mendapatkan legalitas administrasi kependudukan (KTP, KK) dll. Karena dengan cara seperti ini cukup efektif untuk mengalihkan perhatian mereka agar tidak terpengaruh lagi oleh paham radikal.

Informan diatas mempertegas bahwa sangat dibutuhkan identifikasi mantan napiter, keluarga serta simpatisan dalam program deradikalisasi agar tepat sasaran. Hasil Identifikasi merupakan data yang bisa menunjang kerja Unit Binmas dalam menyusun sebuah strategi untuk melakukan pendekatan kepada mantan napiter yang mengedepankan sisi-sisi kelembutan dan pesuasif.

Setelah 2 tahun terakhir Polres Poso mengedepankan fungsi bhabinkamtibmas polisi lokal dalam program deradikalisasi dengan berbagai strategi sehingga sudah membuahkan hasil, terlihat ketika kasus dimako bimob kelapa dua dimana para napiter melakukan kekerasan kepada anggota polri, kemudian setelah kejadian tersebut bom bunuh diri digereja surabaya, tapi kejadian itu semua tidak mempengaruhi para mantan napiter dan simpatisan yang ada diPoso untuk melakukan hal yang serupa, menurut mantan napiter dan simpatisan di Poso pemahaman mereka sangat berbeda dengan para pelaku Bom bunuh diri Surabaya dan kejadian di kelapa Dua.

Berdasarkan wawancara dengan mantan Napiter dengan inisial "HR", dia mengatakan bahwa saya sudah bilang sama teman-teman dari pihak kepolisian, insyaallah kami tidak akan melakukan gerakan-gerakan seperti yang dilakukan kelompok-kelompok yang ada disurabaya

dan kelapa dua, karena kami sudah tidak sepaham lagi, dan memang latar belakang kami dulu melakukan tindakan terorisme bukan murni karena faktor ideologi tapi karena dendam konflik poso yang kemudian difasilitasi oleh kelompok radikal sehingga dendam kami bisa terbalaskan, dan saat ini kami sudah fokus bekerja untuk bisa menghidupi anak dan istri sehingga untuk melakukan tindakan terorisme sudah tidak terpikir lagi.

Pernyataan informan merupakan bentuk dukungan dan keterlibatan dalam program deradikalisasi, hal tersebut merupakan salah satu hasil yang dilakukan polres poso khususnya Bhabinkamtibmas selama ini, bisa membuka cara berfikir para mantan napiter kearah yang lebih positif tanpa menggurui dan tanpa menyetuh hal-hal terkait ideologi, karena bhabinkamtibmas adalah polisi lokal yang mengetahui secara spesifik karakter dan yang dibutuhkan oleh para mantan napiter, keluarga serta simpatisannya.

Bentuk keterlibatan lainnya yang dilakukan oleh beberapa mantan napiter dalam program deradikalisasi adalah mengajak teman-teman napiter yang baru bebas dari tahanan untuk bersilaturahmi ke Polres Poso dengan tujuan melaporkan bahwa mereka sudah bebas. Kemudian hal tersebut disambut baik oleh Kapolres yang kemudian perintah kapolres kepada bhabinkamtibmas untuk memfasilitasi mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, KK, SIM

Keterlibatan mantan napiter dalam program deradikalisasi sangat diharapkan oleh institusi polri dan semua pihak, dengan terlibatnya para mantan napiter dapat menunjukkan bahwa program deradikalisasi yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan berhasil. Tolak ukur berhasilnya program deradikalisasi adalah berkurangnya tindakan

kekerasan teorisme yang ada diposo bahkan 2 tahun terakhir aksi-aksi teror tidak terjadi lagi, bahkan ketika kejadian dimako brimob kepala dua, bom bunuh diri disurabaya terjadi, mantan napiter yang ada diposo tidak melakukan pergerakan apapun.

Berdasarkan wawancara dengan mantan napiter AL alias B, dia mengatakan bahwa keterlibatan saya dan teman-teman yang tergabung dalam rumah katuk adalah membuat film terkait dengan terorisme, bagaimana kami menyadari apa yang kami lakukan selama ini salah jalan, judul filmya adalah “jalan pulang”, dalam pembuatan film ini kami juga sangat terbantu dari pihak Polres Poso, TNI bahkan bhabinkamtibmas dan babinsa wilayah bonesompe kami libatkan sebagai pemain dalam film kami. Keterlibatan lainnya adalah selalu melakukan hal-hal positif/baik.

Film yang dibuat oleh mantan napiter AL alis B, tentunya sangat menginspirasi karena dia berani membuat film terkait terorisme yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya dan segala proses penanggulangannya salah satunya proses deradikalisasi, menurut dia bahwa hal ini dia lakukan untuk membuka pola pikir teman-temannya yang pernah terlibat dalam kasus terorisme, bahwa tindakan yang dilakukan terkait aksi teror sangat merugikan diri mereka, keluarga dan masyarakat. Kemudian difilm itu juga menceritakan bagaimana mereka saat keluar dari penjara sangat membutuhkan bantuan dari semua pihak untuk memulihkan kepercayaan diri mereka dan memulihkan kondisi ekonomi mereka, karena saat keluar dari penjara ibaratnya mereka memulai kehidupan dari nol kembali.

Film Secara harfiah, film (cinema) berasal dari kata cinematographie yang berarti cinema (gerak), tho atau phytos (cahaya) dan graphie atau grhap (tulisan,

gambar, citra). Sehingga dapat diartikan Film adalah melukis gerak dengan cahaya. Melukis gerak dengan cahaya tersebut menggunakan alat khusus, biasanya alat yang digunakan adalah kamera. Film adalah hasil cipta karya seni yang mempunyai kelengkapan dari beberapa unsur seni guna amelengkapi kebutuhan yang bersifat spiritual. Unsur seni yang ada dan menunjang sebuah film diantaranya seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, seni tari, seni puisi sastra, seni teater, seni musik, seni pantomin dan juga novel. Menurut Effendi (1986:239)

Menurut Effendi, Film adalah hasil budaya dan alat ekspresi kesenian. Film sebagai komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta seni musik.

Film berfungsi sebagai sebagai hiburan. Namun fungsi yang terkandung dalam film diantaranya fungsi informatif, edukatif dan juga persuasif. Film nasional berfungsi sebagai media edukatif untuk membina generasi muda dalam rangka nation and character building. Hal tersebut yang kemudian menjadi tujuan dari pembuatan film oleh AL alias B adalah memberikan informasi terkait efek dari seorang terorisme yang dulunya berjuang untuk membela dan membalaskan dendam saudara segamanya, ketika keluar dari tahanan dan menjadi mantan napiter saat bersosialisasi dengan masyarakat umum terus dicurigai bahwa akan mempengaruhi masyarakat dengan paham radikal. Dan dalam film ini juga menceritakan bagaimana stigma teroris yang melekat pada mantan napiter sehingga sebagian besar masyarakat kurang memberikan dukungan dan banyak cobaan yang harus dilewati namun tetap pada pendirian bahwa harus berubah

menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat.

Keberadaan film di tengah kehidupan masyarakat memberikan beberapa nilai fungsi tertentu. Film dibuat dengan latar belakang produksi yang sangat rumit. Dari proses preproduction sampai kepada postproduction melibatkan banyak orang dengan fungsi yang berbeda. Film dikonsepsi sedemikian rupa, dengan pemilihan pemain, lokasi, kostum, musik dan unsur lainnya. Di samping mencapai suatu nilai profit bisnis, film juga berfungsi untuk mentransmisikan suatu pesan dari si pembuat film kepada khalayak luas. Dengan fungsi mentransmisikan pesan, menempatkan film dalam sebuah proses komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi yang mentransmisikan pesan kepada khalayak dalam jumlah yang luas pada saat yang bersamaan disebut dengan komunikasi massa. Dalam bentuk komunikasi ini tidak ada kontak langsung antara si pengirim dan penerima pesan.

Pembuatan film tersebut melibatkan bhabinkamtibmas Kelurahan Bone Sompe BRIPKA. Andi Rum sebagai bentuk dukungan kepada mantan napiter untuk melakukan hal-hal yang positif, kreatif dan menginspirasi. Berikut petikan wawancaranya, dia mengatakan bahwa model keterlibatannya mereka dengan membuat film tentang deradikalisasi yang memang murni inisiatif dari mereka sendiri saya sebagai bhabinkamtibmas melihat sesuatu yang positif kenapa tidak saya mendukung semaksimalnya dan mereka melibatkan saya dalam produksi film tersebut bukan hanya sebagai salah satu pemain tapi juga terlibat dalam pembuatan skenario. Karena para eks teroris ini dibawa binaan Arifuddin Lako alias Brur memiliki rumah produksi film pendek yang memang fokus kepada topik deradikalisasi dan terorisme. Saya terlibat dalam pembuatan

film ini bukan semata-mata karena saya punya hubungan kekerabatan dengan Arifuddin Lako (eks teroris) namun beliau dan kawan-kawannya merupakan masyarakat binaan saya karena mereka tinggal di wilayah binaan saya.

Pelibatan bhabinkamtibmas dalam pembuatan film tersebut merupakan kerjasama yang positif antara bhabinkamtibmas dan mantan napiter. Sehingga dapat dilihat bahwa hubungan telah terjalin dengan baik. Pembuatan film tersebut tentunya sangat membantu Polri dalam pelaksanaan program deradikalisasi, karena dengan adanya film ini masyarakat dan mantan napiter serta simpatisan dapat mengetahui ketika stigma teroris melekat pada diri individu, maka penolakan akan ada di depan mata dan sangat tidak mungkin menghilangkan kecurigaan dan pemikiran negatif masyarakat terhadap mantan napiter yang pernah melakukan tindakan terorisme.

Kesimpulan

Keterlibatan mantan napiter dalam program deradikalisasi merupakan hal yang positif karena secara tidak langsung mereka membantu institusi Polri untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka telah berubah dan meninggalkan kelompok radikal. Kegiatan- kegiatan positif yang mendeskripsikan keterlibatan mantan napiter dalam program deradikalisasi, salah satunya adalah pembuatan film yang menceritakan tentang stigma negatif masyarakat kepada mantan napiter walaupun mereka sudah memperlihatkan bahwa mereka telah berubah kearah yang lebih baik dengan melakukan aktifitas yang positif, namun stigma sebagai teroris masih melekat. Untuk merubah stigma masyarakat butuh proses dan perjuangan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Peran mantan

napiter dalam keterlibatannya pada program deradikalisasi patut dihargai. Keterlibatan lainnya adalah membantu polri untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sesuatu yang simple namun ketika keterlibatan tersebut dimaksimalkan maka selain program deradikalisasi berjalan dengan baik, kamanan wilayah Poso tetap aman dan terjaga.

Daftar Pustaka

- Adams, James. 1986. *The Financing of Terror: How The Groups That are Terrorizing The World Get The Money To Do It*. New York: Simon and Schuster.
- Ali, M.N. 2008. “Studi Terorisme di Sulawesi Tengah”. Laporan Penelitian Hibah Fundamental, DP2M-Dikti dan Lemlit-Untad. Palu: Tidak Diterbitkan.
- Assegaf, Nurcahaya Tandang, 2002, *Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika Internasional*, Penerbit Ombak, Yogyakarta,
- Al-Ansari, Fauzan dan Suhardi. 2006. *Tregedi Poso*. Departemen Data dan Informasi Majelis Muhajidin dan Forum Silaturahmi dan perjuangan umat muslim Poso.
- Bajari, Atwar dan Saragih S. Tua. 2011. *Komunikasi Konstektual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Beebe A Steve, Susan J Beebe & Redmond V Mark. 2006. *Interpersonal Communication (Relating to Other)*
- Creswell W. John , 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan* (Terjemahan). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Damanik Rinaldy, 2003. *Tragedi Kemanusiaan Poso*. PT. Surya Multi Grafika
- Denzin, Norman K & Lincoln, Y vonna S, 2009, *Handbook of Qualitative Research* (Terjemahan). Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Devito, Joseph. 2013, *Komunikasi Antar Manusia, Edisi Kelima*. Tangerang : Kharisma Publishing Group.
- Komisi Kepolisian Nasional. 2009. *Polri dan Pemolisian Demokratis*. Komisi Kepolisian Nasional. Jakarta
- Lihawa, Ronny. 2005. *Memahami Perpolisian Masyarakat*. Jakarta : Biro Binmas Sdeop Polri
- Mulyana, Deddy. 1999. *Nuansa-Nuansa Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mulyana, Deddy. 2002. *Intergroup Labelling di Indonesia*. Kumplan Tulisan Media Militer dan Politik. Galang Press. Yogyakarta
- Suminar, Ratna Jenny. 2016. *Komunikasi Antar Pribadi*. Unpad Press
- Soeprapto, Riyadi. 2002. *Interaksi Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*, Averroes Press. Malang
- Susanto. 2006. *Polmas ; Paradigma baru Polri*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

IKLIM KOMUNIKASI ANTARA ETNIS BUGIS DAN ETNIS KAILI DI DESA LANGALESO KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Fitriani Puspa Ningsih

*Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tadulako, Jln. Soekarno Hatta Km. 9 Kota Palu Sulawesi Tengah.*

Email : ningsih.ilkom@gmail.com

ABSTRAK

Iklm kounikasi merupakan situasi atau kondisi yang berpengaruh terhadap interaksi sosial dalam suasana psikologis dari individu yang melibatkan perasaan atau suasana hati. Komunikasi dikatakan berada dalam suatu iklim komunikasi yang sehat jika komunikator menciptakan perasaan positif terhadap komunikan tanpa adanya rasa curiga atau prasangka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Iklim Komunikasi Antara Etnis Bugis dan Etnis Kaili di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan selanjutnya data dideskripsikan. Penarikan sampel ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Kemudian data dianalisa dengan beberapa tahap, yaitu: reduksi data, tampilan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Iklim Komunikasi Antara Etnis Bugis Dan Etnis Kaili Di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah di lihat dalam tiga dimensi yaitu : perasaan positif, kognitif, dan dimensi prilaku adalah iklim yang positif. Terlihat dari komunikasi yang terjadi antara Etnis Bugis dan Etnis Kaili di Desa langaleso menciptakan suasana yang nyaman dan keterbukaan terhadap perbedaan yang ada diantara warga, terutama mereka bersikap terbuka terhadap perbedaan nilai, kepercayaan, dan sikap. Serta prilaku yang ditunjukkan sesama masyarakat mendorong untuk saling menghargai keberadaan dan pentingnya orang lain.

Kata kunci : Iklim Komunikasi, Perasaan Positif, Kognitif, Perilaku

Submisi : 21 Maret 2019

Pendahuluan

Budaya yang berbeda memiliki sistem nilai yang berbeda pula dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda, juga menentukan cara berkomunikasi yang sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan dan norma yang ada pada masing-masing budaya. Dalam setiap kegiatan komunikasi kita dengan orang lain selalu mengandung potensi komunikasi lintas budaya atau antar budaya, karena kita akan selalu berada pada

“budaya” yang berbeda dengan orang lain, seberapa pun kecilnya perbedaan itu. Perbedaan-perbedaan ekspektasi budaya dapat menimbulkan resiko yang fatal, setidaknya akan menimbulkan komunikasi yang tidak lancar, timbul perasaan tidak nyaman atau timbul kesalahpahaman. Akibat dari kesalahpahaman-kesalahpahaman itu banyak kita temui dalam berbagai kejadian yang mengandung etnosentrisme dewasa ini dalam wujud

konflik-konflik yang berujung pada kerusuhan atau pertentangan antar etnis.

Sebagai salah satu jalan keluar untuk meminimalisir kesalahpahaman-kesalahpahaman akibat perbedaan budaya adalah dengan mengerti atau paling tidak mengetahui bahasa dan perilaku budaya orang lain, mengetahui prinsip-prinsip komunikasi lintas budaya dan mempraktekannya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kebutuhan untuk mempelajari komunikasi lintas budaya ini semakin terasakan karena semakin terbukanya pergaulan kita dengan orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda, disamping kondisi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dengan berbagai ras, suku bangsa, agama, latar belakang daerah (desa/kota), latar belakang pendidikan, dan sebagainya.

Seseorang dimana ia menilai dan menyimpulkan perilaku seseorang sehingga menimbulkan persepsi masing-masing yaitu persepsi internal dan persepsi eksternal, dengan faktor pendukung, saling menghargai, rasa percayadansikap sportif, serta faktor penghambat, ekonomi, makanan, perbedaan budaya, saling terbuka, kurangnya kebersamaan (Kholil, Mailin, & Siregar, 2017). Dalam melakukan komunikasi antar budaya perlu diperhatikan iklim komunikasi, dimana iklim komunikasi merupakan suasana kebatinan saat komunikasi itu berlangsung. Salah satu segi paling membahagiakan dalam berkomunikasi dengan orang lain adalah kesempatan untuk saling berbagi perasaan. Mengalami suatu perasaan dan mengungkapkannya kepada orang lain bukan saja merupakan sumber kebahagiaan, melainkan juga merupakan salah satu kebutuhan demi kesehatan psikologis kita. Dengan mengalami dan saling berbagi perasaan, kita menciptakan dan

mempertahankan persahabatan yang intim dengan sesama.

Mempelajari iklim komunikasi di Desa yang penduduknya heterogen sangat menarik untuk dicermati, hal ini disebabkan penduduk desa heterogen memungkinkan terjadinya kesenjangan komunikasi faktor inilah yang menyebabkan penelitian ini dilakukan di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah. Desa Langaleso yang penduduknya heterogen hal ini diperkuat dengan tampaknya adat istiadat nenek moyang leluhur mereka untuk masing-masing suku tampak masih kuat dipertahankan. Berdasarkan informasi dasar yang diperoleh calon peneliti di Desa Langaleso biasa terjadi riak-riak kecil antar oknum pemuda dari suku Kaili dan Suku Bugis. Sehingga selaku calon peneliti akan memfokuskan kajian tentang iklim komunikasi dalam tiga dimensi perasaan positif, dimensi kognitif dan perilaku antara etnis bugis dan etnis kaili.

Iklim Komunikasi

Gudykunts (Liliweri, 2003:48) mengatakan bahwa iklim komunikasi adalah suasana kebatinan saat komunikasi itu berlangsung. Sekurang-kurangnya iklim komunikasi ditentukan oleh tiga dimensi yaitu : (1) Perasaan positif, dimana dimensi ini berisi perasaan adil, menyenangkan, aman, menerima dan tingkat kecemasan yang rendah; (2) Kognitif, dimensi ini meliputi derajat kepercayaan yang kita bawa dalam suasana komunikasi seperti adanya harapan, kepastian, pemahaman, dan memenuhi hasrat ingin tahu; (3) Dimensi perilaku terlihat dalam tindakan dan keterampilan saat berkomunikasi; (4) melalui kata dan perbuatan.

Mengatasi iklim komunikasi dapat dilakukan dengan cara menciptakan kebudayaan ketiga yang lebih netral agar

dua pihak dapat menerimanya. Indikasi terciptanya efektifitas komunikasi yaitu: (1) Hadirnya iklim yang tidak mengancam; (2) Terbukanya pintu komunikasi; (3) Adanya pengelolaan percakapan yang lebih baik; dan (4) terwujudnya relasi yang memuaskan kedua belah pihak.

Perasaan Positif

Iklim komunikasi yang positif akan mendukung fungsi komunikasi sedangkan iklim komunikasi yang negatif akan menghambat fungsi komunikasi. Iklim komunikasi yang positif maupun negatif itu ditentukan oleh tiga faktor berikut ini: (1) Faktor derajat kognitif; (2) Identitas Pribadi; dan (3) Tindakan yang menunjukkan kemampuan.

Johnson (Supratiknya, 1995: 51) mengemukakan suatu model lima tahap pengungkapan perasaan dalam komunikasi. Menurutnya, setiap kali kita berkomunikasi dengan orang lain maka sebenarnya paling sedikit terjadi lima macam proses sebagai berikut: Pertama, kita mengamati (*sensing*) tingkah laku lawan komunikasi kita. Dengan alat – alat indera yang kita miliki, kita mengumpulkan informasi tentang lawan komunikasi kita. Kedua, kita menafsirkan (*interpreting*) semua informasi yang kita terima dari lawan komunikasi kita itu. Kita menentukan makna dari kata – kata dan perbuatannya. Ketiga, kita mengalami perasaan tertentu (*feeling*) sebagai reaksi spontan terhadap penafsiran kita atas informasi yang kita terima dari (dan tentang) lawan komunikasi kita. Keempat, selanjutnya kita akan terdorong untuk menanggapi (*intending*) perasaan kita itu. Langkah kelima, adalah mengungkapkan (*expressing*) perasaan kita itu.

Teori Kognitif

Teori kognitif merupakan satu teori dalam ilmu psikologi sosial di mana didasarkan pada kognisi manusia yaitu bagian dari jiwa manusia yang mengolah informasi, pengetahuan, pengalaman, dorongan, perasaan dan sebagainya baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri sehingga terjadi simpulan-simpulan yang selanjutnya menghasilkan perilaku. Dalam teori ini terdapat teori inteligensi-nya Piaget (1950 - 1952) yang mendefinisikan intelegensi sebagai proses kehidupan dasar yang membantu organisme menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Piaget, tahapan perkembangan kognitif adalah invariant, yaitu seragam bagi tiap orang dan tidak ada tahapan yang dapat diloncati sebelum masuk ke tahap berikutnya karena tiap tahap adalah persiapan bagi tahap berikutnya.

Dalam teori Piaget, pengetahuan dianggap mempunyai tujuan atau maksud tertentu: membantu seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemajuan kognitif tidak saja dilihat terutama sebagai hasil dari proses kematangan otak. Pengetahuan didapat dan proses pemikiran menjadi lebih kompleks dan efisien sebagai konsekuensi dari kematangan interaksi seseorang dengan lingkungan.

Dimensi Perilaku

Perilaku manusia sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku itu sendiri adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Ditilik dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman, dan reaksi afektifnya berbeda

satu sama lain. Pendekatan yang sering dipergunakan untuk memahami perilaku manusia adalah; pendekatan kognitif, reinforcement, dan psikoanalitis.

Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Kriyantono, 2007: 57). Pada hakikatnya, metode deskriptif mengumpulkan data secara univariat. Karakteristik data diperoleh dengan ukuran – ukuran kecenderungan pusat atau ukuran sebaran. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dalam bentuk Studi kasus. Metode ini menekankan lebih pada penentuan informasi tentang variabel dari pada informasi tentang individu dan bermaksud mengumpulkan data yang relatif terbatas dari sejumlah kasus yang relatif besar.

Populasi dalam penelitian ini adalah Suku Kaili dan Suku Bugis yang berdomisili di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah yang berjumlah 2.442 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive Sampling yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan penelitian. Mengingat besar jumlah populasi dalam penelitian ini, maka ditetapkan beberapa informan yang dianggap representasi menjadi sumber informasi secara rinci dan akurat yang mewakili populasi. Dengan alasan : (1). Mereka mengetahui tentang keadaan desa Langaleso, (2). Mereka merupakan orang-orang yang menjadi panutan di desa itu, (3).

Minimal 10 tahun telah tinggal di Desa langaleso. (4). Aspek keterwakilan gender, aspek keterwakilan etnis, aspek ketokohan (tokoh masyarakat), aspek geografis atau lokasi tempat tinggal.

Berkaitan dengan masalah penelitian secara keseluruhan jumlah sampel yang akan diteliti yaitu 10 informan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Suku	Keterangan
1.	H. Haya	Bugis	Anggota Dusun I
2.	Hamennna	Bugis	Ketua WIA
3.	Hanjang	Bugis	Kaur kesra
4.	Suciati	Bugis	Bendahara Risma
5.	Sulaiman	Bugis	Kepala Dusun II
6.	Nuslin	Kaili	Kepala Desa
7.	Elly	Kaili	Anggota Dusun II
8.	Hasyim	Kaili	Ketua RT 12
9.	Sardjan	Kaili	Ketua RT 9
10.	Nurlin	Kaili	Kepala Dusun III
11.	H. Haya	Bugis	Anggota Dusun I

Analisis data dilakukan dengan mempergunakan teknik analisis kualitatif yang disesuaikan dengan tujuan studi yang akan dicapai. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data tersebut dilakukan sebagai berikut: (1) Reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan abstraksi dan transformasi data mentah yang dilakukan saat menyusun catatan lapangan selama berada di lapangan. Dalam hal ini, catatan lapangan disusun berdasarkan topik kajian dan kategori kemudian direduksi; (2) Data dan informasi yang dianggap sudah sesuai

dengan kepentingan kajian, maka tahapan berikutnya adalah menyusun data dan informasi menjadi suatu pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data dan informasi yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk deskripsi atau narasi sehingga berbentuk rangkaian informasi menjadi sebuah pernyataan yang bermakna sesuai dengan masalah studi; (3) Verifikasi dan penarikan kesimpulan sebagai langkah akhir dari analisis kualitatif, didasarkan pada reduksi dan tampilan data, sehingga dapat memberikan jawaban atas masalah studi. Verifikasi hasil pengolahan data dengan sejumlah informan guna menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna persoalan dari fokus studi.

Hasil Penelitian

Budaya dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahasa sebagai salah satu bentuk budaya, dalam dunia komunikasi berfungsi sebagai media penyampaian pesan. Budaya Komunikasi antar etnis sangat mungkin terjadi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan wilayah. Dalam hal tersebut teori dalam kajian budaya komunikasi dapat didefinisikan yang paling sederhana dari komunikasi antarbudaya adalah menambahkan kata budaya ke dalam pernyataan komunikasi yakni “komunikasi antara dua orang atau lebih yang berbeda latar belakang kebudayaan“. Dalam kajian lain, dapat pula di katakan yakni komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh mereka yang berbeda latar belakang kebudayaan. Budaya komunikasi antar etnis dapat terjadi di segala bidang termasuk dalam transaksi.

Altman dan Tatlor (Devito, 1997: 487) menyebutkan bahwa perbedaan antarbudaya terutama penting dalam

interaksi awal dan secara berangsur berkurang tingkat kepentingannya ketika hubungan menjadi lebih akrab. Walaupun Etnis Bugis dan Etnis kaili dalam Desa langaleso selalu menghadapi kemungkinan salah persepsi dan salah menilai orang lain, tetapi mereka mencoba menghindari kecenderungan alamiah dengan menilai orang lain secara tergesa-gesa. Sunnafrank (Devito, 1997) menjelaskan bahwa dalam komunikasi antarbudaya seperti dalam semua komunikasi kita berusaha memaksimal hasil interaksi. Tiga konsekuensi yang dibahas oleh Sunnafrank mengisyaratkan implikasi yang penting bagi komunikasi antarbudaya. Satu, orang akan berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hasil positif. Kedua, bila kita mendapatkan hasil positif, kita akan terus melibatkan diri dalam komunikasi dan meningkatkan komunikasi kita. Bila kita memperoleh hasil negatif, kita mulai menarik diri dan mengurangi komunikasi. Ketiga, kita membuat prediksi tentang mana perilaku kita yang akan memberikan hasil positif.

Hal ini terungkap dari Bapak Hasyim (32 Tahun) seorang Etnis Kaili, mengatakan :

“Selama saya tinggal di Desa dan berinteraksi dengan mereka (Etnis Bugis), tidak pernah tertanam dalam pikiran saya bahwa dengan bergaul bersama mereka hanya akan membuat dampak buruk bagi kami. Saya selalu berpikiran, dengan bergaul bersama ada hasil positif yang kami dapatkan. Sehingga saya akan terus melibatkan diri dalam berkomunikasi serta melakukan apa-apa saja yang memberikan hasil yang menguntungkan buat kami”.

Untuk mengatasi beberapa kesulitan dalam komunikasi antarbudaya seperti yang

terjadi di Desa Langaleso, baik Etnis Kaili maupun Etnis Bugis selalu ada hal-hal yang dilakukan ataupun ditunjukkan untuk menghilangkan perasaan curiga terhadap orang-orang yang sedang berinteraksi.

Pertama, mereka berusaha bersikap terbuka untuk menerima perbedaan budaya. Dimana sikap ini diiringi oleh sikap menerima dan menghormati budaya orang lain sebagaimana adanya budaya tersebut. Kedua, mereka berusaha menghindari mendominasi percakapan dengan orang lain. Dengan kata lain tidak bersikap egois yang mana tidak akan membawa mereka kepada situasi saling memahami. Ketiga, mereka mau berusaha mempelajari budaya orang lain. Keempat, tidak menganggap budaya sendiri paling tinggi, sementara budaya orang lain paling rendah. Dan Kelima, mereka berusaha mengontrol emosi ketika berbicara dengan orang yang berbeda budaya.

Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam kehidupan suatu kelompok etnis pasti terjadi perselisihan diantara para etnis baik individual maupun kelompok. Yang membedakan hanya terletak pada intensitas perselisihan tersebut, ada yang skala besar dengan melibatkan kelompok etnis, ada juga yang berskala kecil hanya menyangkut perselisihan individu dalam lingkungan Desa Langaleso. Hal terpenting yang dilakukan masyarakat Desa Langaleso dalam menghadapi perbedaan budaya yakni saling menerima dan mendukung satu sama lain, membangun kepercayaan serta saling terbuka dengan perbedaan yang ada. Dengan saling melibatkan diri pada kegiatan masing-masing Etnis. Dalam komunikasi antarbudaya maka diperlukan suatu sikap yang lebih terbuka untuk memahami budaya orang lain dan dapat menghargainya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat

satu dengan yang lainnya yang berbeda-beda (Karim, 2015).

Seperti halnya masyarakat di daerah lain, hubungan sosial terjadi bukan hanya dengan warga dari suku yang sama tetapi meluas kepada komunitas lain yang berbeda. Fenomena ini sudah menjadi kewajaran di masa kini, sesuai dengan perkembangan zaman yang menghilangkan batas-batas kewilayahan atau kesukuan. Kini semua warga negara, dari berbagai suku mempunyai hak yang sama untuk memilih tempat tinggal di mana saja, dalam wilayah NKRI. Namun demikian, perbedaan latar belakang budaya dan tradisi mengharuskan mereka menyesuaikan dan beradaptasi dengan komunitas di daerah yang mereka tinggali. Bagi sebagian warga, penyesuaian tersebut bukan hal yang sulit, karena budaya dan tradisi yang didukung relatif sama. Sebaliknya adaptasi menjadi kendala karena latar belakang budaya dan tradisi sangat berbeda. Jika kondisi seperti itu tidak dikelola dengan baik dan bijaksana, maka akan menimbulkan konflik atau gesekan nilai budaya.

Dalam situasi seperti itu, para pendatanglah yang wajib menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan penduduk setempat. Mempelajari adat istiadat, kebiasaan atau tradisi setempat adalah upaya yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja pindah ke suatu tempat yang baru. Seperti hasil wawancara Penulis dengan ibu Suciati (27 Tahun) seorang etnis Bugis, mengatakan :

“Saya sebagai pendatang di Desa ini, hal pertama yang saya lakukan adalah menyesuaikan diri dan beradaptasi sama orang-orang asli desa ini. Dan berusaha sebisa mungkin agar saya bisa di terima di Desa ini. Dengan cara menanyakan adat istiadat warga desa ini serta

mencoba mengikuti tradisi di desa ini, dengan harapan saya dapat diterima oleh mereka (etnis Kaili sebagai penduduk asli)”.

Mereka menyadari bahwa belajar dan mengetahui nilai budaya suku lain itu penting, warga Desa Langaleso yang terdiri dari berbagai suku berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk menciptakan kerukunan. Dengan pengetahuan dan pengertian yang baik terhadap komunikasi maka kita akan berkomunikasi secara positif.

Wiwi (2016) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa perbedaan budaya yang berada antar etnis dapat dihadapi dengan cara melakukan adaptasi untuk menghargai perbedaan budaya diantara mereka. Pengetahuan dianggap mempunyai tujuan atau maksud tertentu, yakni membantu seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebagaimana umumnya, warga Desa Langaleso terdiri atas berbagai sukubangsa, memiliki simbol-simbol budaya yang dipahami dan dijadikan pedoman untuk berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Selain simbol budaya yang bersifat kesukuan dan tetap dipertahankan sebagai identitas sukubangsanya, merekapun mengakui adanya simbol budaya yang menyatukan warga secara keseluruhan. Simbol-simbol tersebut antara lain: Simbol verbal /pengucapan salam.

Assalamualaikum rupanya telah diadopsi secara umum bukan saja menjadi ucapan salam bagi sesama warga muslim, tetapi juga oleh seluruh warga Desa Langaleso. Setiap warga dari etnis apapun, atau pemeluk agama apapun rupanya sudah menjadi kebiasaan mengucapkan salam dan menerima salam seperti itu. Jika disimak arti harafiah ucapan assalamualaikum adalah salam sejahtera untuk anda semua, maka

wajar apabila semua lapisan warga bisa menerimanya.

Bendera kuning. Sudah menjadi pengetahuan dan kesepakatan umum, jika bendera kertas atau kain kuning dipasang di perempatan jalan atau gang, merupakan simbol komunikasi bahwa saat itu ada seorang warga yang meninggal. Tanpa pemberitahuan secara verbal atau lisan, seluruh warga akan melayat ke rumah duka. Demikian pula Hiasan janur kuning. Sekalipun pada awalnya pengguna hiasan janur itu adalah orang Bali untuk kepentingan berbagai upacara, namun kini janur telah diakui dan disepakati sebagai simbol yang mengkomunikasikan adanya suatu perhelatan. Hanya dengan melihat hiasan janur di depan rumah seseorang, warga dapat memastikan yang punya rumah sedang menyelenggarakan perhelatan (perkawinan atau khitanan).

Bunyi pukulan kentongan. Sekalipun sarana komunikasi modern seperti telepon sudah menjadi kepemilikan secara umum, namun bagi warga Desa Langaleso, bunyi kentongan masih mempunyai makna simbolis khusus. Jika kentongan dibunyikan pada Hari Minggu, itu menandakan kegiatan kerjabakti akan segera dimulai, sebaliknya jika dibunyikan malam hari, itu adalah tanda ada kebakaran atau ada rumah yang dibobol maling. Jika mendengar bunyi kentongan itu, spontan warga keluar rumah dan melihat apa yang terjadi. Bagi kaum muslimin dan muslimat, bunyi kentongan juga menjadi pelengkap seruan untuk salat atau berbuka puasa jika dibunyikan di Bulan Ramadhan.

Dengan demikian dimensi kognitif dalam iklim komunikasi tersebut merupakan proses interaksi antara anggota keluarga maupun dari anggota keluarga lainnya yang memiliki latar budaya yang berbeda. Sehingga dari proses tersebut dapat saling bertukar pengetahuan budaya yang mereka

miliki sebagai proses dari komunikasi antarbudaya. Fatmawati, (2016) dalam jurnal terbarunya menjelaskan hasil analisis yang menunjukkan faktor-faktor mempengaruhi stereotip, yakni faktor orang tua atau kerabat terdekat, pengalaman pribadi, lingkungan sosial, interaksi langsung, dan unsur kebudayaan (kepercayaan, nilai, sikap). Suryani (2013) menjelaskan bahwa proses komunikasi yang berlangsung antara orang-orang berbeda budaya biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: The Act (Perbuatan), The Scene (Adegan), The Agent (Pelaku), The Agency (Perantara), dan The Purpose (Tujuan).

Interaksi dengan warga sesama suku umumnya berlaku dengan menggunakan idiom kedaerahan misalnya, berbahasa daerah asal. Bahasa daerah menjadi sangat dominan jika berkomunikasi dengan sesama suku. Transformasi nilai budaya terhadap anak-anak atau generasi muda sesuku dilakukan selain dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, juga dalam berbagai peristiwa adat seperti acara perkawinan, khitanan atau upacara yang berkaitan dengan kepercayaan suku dan agama. Dari hasil wawancara mendalam penulis dengan ibu Hj. Haya (30 Tahun) seorang etnis Bugis di Desa Langaleso (Minggu, 12 september 2010), mengatakan bahwa:

“Saya ini, kalau berbicara dengan anak-anakku atau menasehati mereka pasti saya lebih suka pake bahasa bugis karena lebih mudah bagi saya dan lebih nyaman untuk berkomunikasi. Begitu juga kalau saya bicara dengan orang Bugis lainnya pasti pakai bahasa daerah, karena lebih nyaman saya rasa. dan yang terpenting adalah melibatkan anak-anak dalam berbagai kegiatan adat juga merupakan salah satu cara

yang digunakan oleh kami, agar anak-anak terbiasa dan mau menerima tradisi leluhurnya. ”.

Hal senada juga dikatakan oleh bapak Nuslin (55 Tahun) seorang Etnis Kaili.

“Lebih mudah rasanya bagi saya berbicara menggunakan bahasa Kaili, apa lagi dengan keluarga atau orang-orang kaili lainnya. Karena kalau pakai bahasa indonesia terkadang saya terbata-bata, akhirnya jadi tidak jelas apa yang saya bilang, makanya saya lebih senang menggunakan bahasa daerah”.

Interaksi dengan warga sesama suku di Desa Langaleso tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan karena mereka memiliki latar belakang budaya yang sama sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Selain itu, sesama suku juga saling membangun kepercayaan dan membuka diri satu sama lain agar tercipta suasana yang aman, tenang dan damai.

Majid (2014) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa berkomunikasi bukan sekedar berbicara lisan, tetapi juga membaca bahasa tubuh dan melihat situasi dan kondisi saat berbicara. Perilaku yang diwujudkan dalam bentuk simbol non verbal yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di desa langaleso yaitu dengan mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan *tabe*, (permisi) sambil berbungkuk setengah badan bila lewat di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita, mengucapkan *iye*, jika menjawab pertanyaan sebelum mengutarakan alasan, ramah, dan menghargai orang yang lebih tua serta menyayangi yang muda. Inilah di antaranya ajaran-ajaran suku Bugis sesungguhnya yang termuat dalam *Lontara*, yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Bugis.

Etnis Kaili yang merupakan penduduk pribumi di Desa Langaleso hampir setiap kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah. Interaksi dengan Keluarga atau Warga Sesuku, berlangsung dalam banyak hal dan yang paling menonjol adalah penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam keluarga atau warga sesuku. Transformasi nilai budaya yang dilakukan baik kepada anak-anak dalam keluarga atau warga sesuku antara lain dengan menghidangkan makanan khas daerah asal, melakukan berbagai kegiatan/peristiwa adat (perkawinan, khitanan) dengan menggunakan tradisi daerah asal dengan komponen-komponennya seperti, pakaian adat, upacara adat, kesenian adat dan tatacara yang berlaku di daerah asal. Kegiatan tersebut diyakini warga Desa Langaleso menjadi cara yang cukup ampuh untuk menanamkan pengetahuan budaya kepada generasi muda. Masalah komunikasi antarbudaya yang biasa terjadi yaitu, dalam penggunaan bahasa, persepsi, bentuk-bentuk komunikasi non verbal, makanan dan interaksi sosial, tetapi keduanya mampu memaknai dan memahami bentuk kebudayaan yang berbeda (Nugroho, Lestari, & Wiendijarti, 2012).

Dengan demikian dalam konteks iklim komunikasi dimensi perilaku merupakan tindakan atau perbuatan yang diwujudkan kedalam perilaku verbal maupun non verbal yang dapat mengungkapkan maksud dan tujuan komunikasi. Dengan berkomunikasi sesama suku atau dengan suku lainnya tentunya dapat terhindar dari kesalahpahaman, kurangmengertian, serta ketidakpastian. Dimana diharapkan dalam komunikasi antarbudaya adalah orang-orang yang keterlibatannya mampu menerima perbedaan kebudayaan sehingga dapat mengurangi kecemasan (yaitu dengan

memiliki perasaan bersama) dan ketidakpastian (yakni mempunyai pengetahuan tentang orang lain). Hasilnya adalah iklim komunikasi yang positif yang dapat membuat kita menjadi bebas dari segala macam resiko.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim komunikasi antara Etnis Bugis dan Etnis Kaili di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah di lihat dalam tiga dimensi yaitu: perasaan positif, kognitif, dan dimensi Prilaku adalah iklim yang positif. Dilihat dari komunikasi yang terjadi antara Etnis Bugis dan etnis Kaili di Desa Langaleso yang menciptakan suasana yang nyaman dan keterbukaan terhadap perbedaan yang ada di antara warga, terutama mereka bersikap terbuka terhadap perbedaan nilai, kepercayaan, dan sikap. Serta perilaku mendorong untuk saling menghargai keberadaan dan pentingnya orang lain. Dan pengakuan terhadap simbol yang makna bersama.

Dengan demikian diharapkan dalam komunikasi antarbudaya adalah orang-orang yang keterlibatannya mampu menerima perbedaan kebudayaan sehingga dapat mengurangi kecemasan (yaitu dengan memiliki perasaan bersama) dan ketidakpastian (yakni mempunyai pengetahuan tentang orang lain). Hasilnya adalah iklim komunikasi yang positif yang dapat membuat kita menjadi bebas dari segala macam resiko.

Untuk itu diharapkan masyarakat di Desa Langaleso dapat menjalin hubungan baik antara sesama masyarakat, sehingga dari hubungan tersebut akan menciptakan iklim komunikasi yang baik antara suku bugis dan suku kaili melalui proses pertukaran budaya. Diharapkan juga bagi

pemerintah Desa Langaleso agar dapat lebih berperan penting bagi masyarakatnya dalam menjaga hubungan antar suku melalui kegiatan-kegiatan silaturahmi antara etnis yang ada di Desa Langaleso. Sehingga dari kegiatan tersebut dapat menciptakan suasana atau hubungan harmonis antar suku yang dapat mencegah terjadinya konflik-konflik yang dapat mengganggu hubungan sesama masyarakat di Desa Langaleso.

Daftar Pustaka

- Devito, J. A. (1997). *Komunikasi Antarmanusia*. Jakarta: Professional Books.
- Fatmawati. (2016). Stereotip Suku Bugis Dan Suku Kaili Di Palu Barat (Studi Komunikasi Antarbudaya). *KINESIK*, 3(3).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22487/kinesik.v3i3.7552>
- Karim, A. (2015). Komunikasi Antar Budaya di Era Modern. At-Tabsyir: *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 3(2), 319–338.
<https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v3i2.1650>
- Kholil, S., Mailin, & Siregar, I. L. (2017). Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Malaysia Dan Indonesia Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (Uin) Sumatera Utara. *AL-BALAGH*, 1(2), 175–195.
- Kriyantono, R. (2007). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Liliweri, A. (2003). *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Majid, A. (2014). Pasar Sebagai Sarana Komunikasi Antar Budaya. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 155–165.
- Nugroho, A. B., Lestari, P., & Wiendijarti, I. (2012). Pola Komunikasi Antarbudaya Batak dan Jawa di Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi*, 1(5), 403–418.
- Supratiknya, A. (1995). *Komunikasi Antar Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suryani, W. (2013). Komunikasi Antar Budaya Yang Efektif. *Jurnal Dakwah: Tablig*, 14(1), 91–100.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v14i1.316>
- Wiwi. (2016). Hambatan Komunikasi Antarbudaya pada Perkawinan Antar Etnis Banggai dan Etnis Bugis di Desa Bentean. *KINESIK*, 3(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22487/kinesik.v3i2.7433>

EKSISTENSI SOLIDARITAS TO KAILI DI KOTA PALU

Indah Ahdiah^{1*}, Andi Mascunra Amir¹

*Dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako
Jln. Soekarno Hatta Km. 9 Kota Palu Sulawesi Tengah.*

*Email : indahahdiah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi solidaritas To Kaili di Kota Palu. To Kaili adalah etnis asli Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan dalam bentuk seni, Egaliter To Kaili dapat dibuktikan adanya penerimaan dalam bentuk adanya tarian 'Peaju', suatu tarian yang merupakan symbol penerimaan terhadap pendatang. Kemudian salah satu strategi kebersamaan adalah persamaan rasa sebagai 'Orang Palu, menghasilkan kata yang merupakan hasil akumulasi bahasa orang Palu yaitu 'torang' dan 'dorang'. Kata torang merupakan penggabungan dari kata 'kita orang' disingkat menjadi 'kitorang', sedangkan kata dorang merupakan penggabungan dari kata 'dia orang', disingkat menjadi dorang.

Kata Kunci : Solidaritas; Sosial; To Kaili

Submisi : 30 Januari 2019

Pendahuluan

Indonesia memiliki dasar-dasar dimensi kebudayaan tersendiri dalam memperkuat kehidupan bermasyarakat, salah satunya Indonesia yang memiliki tradisi-tradisi yang bersifat lokalitas seperti gotong royong atau model solidaritas sosial sebagai modal sosial yang dapat dijadikan aset yang menguntungkan. Untuk konsep gotong royong, hampir setiap daerah memiliki konsep tersebut (Putra, dkk. 2018). Dapat dicontohkan dalam penelitian Dyson (1979) tentang tradisi gotong royong di desa Juhan Asa Kalimantan Timur menunjukkan terdapat lima jenis tolong menolong yang berlaku di desa tersebut, yaitu : 1) gotong royong tolong menolong dalam peristiwa kematian dan bencana lain seperti sakit

parah atau rumah terbakar, 2) gotong royong tolong menolong yang melibatkan semua penduduk desa untuk mengerjakan proyek yang kegunaannya dirasakan oleh semua penduduk desa, 3) gotong royong tolong menolong dalam upacara dan pesta, 4) gotong royong tolong menolong dalam kegiatan sekitar rumah tangga, dan 5) gotong royong tolong menolong dalam kegiatan pertanian.

Sebagai gambaran istilah solidaritas yang ada di Indonesia, ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Solidaritas Sosial

Kebudayaan daerah	Ujud nilai solidaritas
Kalimantan Tengah	Handep
Maluku	Pela
Minahasa	Mapalus

Lanjutan Tabel 1.

Sunda	Biras, Liliuran, Kondangan, Sambatan
Bali	Ngoupin, Seka, Ngendeng
Jawa	Gugur gunung
Tana Toraja	Tongkongan

Sumber : Lutan (2001)

Keragaman politik identitas etnis, ras, antar kelompok dan agama di Indonesia mengharuskan kita untuk hidup toleransi dan memiliki rasa solidaritas nasional yang tinggi. Selain itu munculnya nasionalisme Indonesia muncul dari perlawanan terhadap kolonialisme juga muncul karena solidaritas nasional Adaya Indonesia. tetapi sekarang orang Indonesia mengalami masalah pada ketiganya. Jadi dengan belajar memahami Indonesia tentang kacamata nasionalisme, politik identitas, dan solidaritas akan menumbuhkan semangat nasional kita (Alfaqi, 2016).

Penelitian ini memperkuat peran ‘Bhineka tunggal ika’, sebagai simpul keindonesiaan, karena salah satu ciri utama bangsa kita ialah kebinekaan. Dengan memperhatikan, pertama, kebinekaan menjadi hubungan-hubungan sosial tersusun dan bertahan sebagai proses pembentukan struktur sosial. Kedua, kebinekaan melahirkan harmoni sosial dan pertukaran. Ketiga, kebinekaan menyebabkan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan sumber daya yang tersedia. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana eksistensi solidaritas To Kaili di Kota Palu?”. Pertanyaan tersebut diajukan untuk mendapatkan tujuan penelitian ini, yaitu “Untuk mengetahui bentuk solidaritas To Kaili di Kota Palu”.

Solidaritas Sosial

Konsep solidaritas diperkenalkan dalam teori sosiologi oleh Emile Durkheim

pada tahun 1858. Menurut Durkheim, solidaritas merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka. Bagi Durkheim (1964), solidaritas banyak di pengaruhi oleh fakta sosial yang memperlihatkan adanya berbagai cara dan usaha manusia untuk membangun suatu komunitas, adapun fakta sosial adalah suatu ciri atau sifat sosial yang kuat yang tidak harus dijelaskan pada level biologi dan psikologi, tetapi sebagai sesuatu yang berada secara khusus di dalam diri manusia.

Emile Durkheim membagi dua bentuk solidaritas, yaitu solidaritas mekanis (*mechanical solidarity*) dan solidaritas organis (*organic solidarity*). Perbedaan keduanya bersifat evolusionistis, dalam arti bahwa yang kedua adalah perkembangan dari yang pertama. Corak yang pertama adalah solidaritas mekanis, yaitu solidaritas yang didukung oleh persamaan dari individu-individu. Dengan kata lain, solidaritas mekanis terjadi karena diferensiasi atau perbedaan antara individu-individu masih sangat terbatas. Solidaritas mekanis biasanya terdapat dalam masyarakat yang masih sangat sederhana, bersahaja “primitif” atau bisa pula disebut, meskipun tidak identik satu sama lain, “segmental”, yaitu corak kelompok sosial dimana individu saling terikat secara utuh. Corak masyarakat yang segmental ini

ditandai oleh “solidaritas kesamaan”, yang mekanis. Masyarakat “segmental” juga relatif terisolasi satu sama lain dan bersifat mandiri. Setiap anggota masyarakat merasa memiliki, merasa terikat antara satu dengan yang lainnya, kepercayaan dan perasaan yang sama (kesadaran kolektif), gangguan terhadap satu anggota merupakan gangguan bagi semua anggota masyarakat, pelanggaran terhadap suatu norma merupakan ancaman bersama. Makanya menurut Durkheim pada masyarakat seperti demikian hukum yang berkembang adalah hukum yang bersifat represif, dimana sanksi yang diberikan bagi pelanggar hukum mendatangkan penderitaan, menjerahkan atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidup pelakunya. Hal ini disebabkan karena pelanggaran dan kejahatan dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan keyakinan bersama.

Berbeda dengan corak yang mekanis ini, maka solidaritas yang kedua yang disebut Durkheim solidaritas organis. Ini biasanya terdapat pada masyarakat yang sudah maju, perkotaan, dimana masyarakatnya sangat heterogen. Seseorang berhubungan dengan orang lain hanyalah karena ada ketergantungan/kepentingan dengan orang tersebut. Jika kepentingannya sudah selesai maka hubungan merekapun berakhir pula. Solidaritas organis terwujud karena telah berkembangnya diferensiasi ataupun spesialisasi.

Kedua corak solidaritas itu tergantung pula pada kesadaran kolektif (*conscience collective*). Tanpa ini, apapun corak organisasi sosialnya, masyarakat dikutuk karena mengalami kemunduran dan kebangrutan. Masalah yang terberat, tentu saja bisa ditemukan ketika masyarakat sedang mengalami proses peralihan, dari mekanis ke organis. Di saat itu masyarakat kehilangan pedoman dan pegangan hidup.

Inilah yang disebut Durkheim, anomie yaitu suasana tanpa norma.⁸ Dalam suasana seperti ini, ketika batas-batas norma tak lagi disadari, maka bisa terjadi berbagai pola tindakan yang mengancam solidaritas.

Menurut KBBI (Depdiknas, 2007), solidaritas adalah sifat (perasaan) solid, sifat satu rasa (senasib), perasaan setia kawan yang pada suatu kelompok anggota wajib memilikinya. Sedangkan sosial adalah berkenaan dengan masyarakat, perlu adanya komunikasi dalam usaha menunjang pembangunan, suka memperhatikan kepentingan umum.

Bentuk Solidaritas Sosial

Bentuk dan wujud solidaritas sosial yang ada di dalam masyarakat sangat beragam berdasarkan pada kerja kolektif dan hubungan antara individu atau kelompok yang terjalin. Adapun bentuk-bentuk solidaritas di masyarakat adalah sebagai berikut (Soyomukti, 2016):

1. Gotong Royong. Bentuk solidaritas yang sering kita temui di dalam masyarakat adalah gotong royong. Gotong royong adalah rasa dan pertalian kesosialan yang sangat teguh dan terpelihara. Gotong royong lebih banyak dilakukan di desa daripada di kota. Kolektifitas terlihat dalam ikatan gotong royong yang menjadi adat masyarakat desa. Gotong royong menjadi bentuk solidaritas yang sangat umum dan eksistensinya di masyarakat juga masih sangat terlihat hingga sekarang, bahkan negara Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mempunyai jiwa gotong-royong yang tinggi.
2. Kerjasama. Kerjasama merupakan penggabungan antara individu dengan individu yang lain, atau kelompok dengan kelompok yang lain sehingga

bisa mewujudkan suatu hasil yang dapat dinikmati bersama. Kerjasama diharapkan memberikan suatu manfaat bagi anggota kelompok yang mengikutinya dan tujuan utama dari bekerjasama bisa dirasakan oleh anggota kelompok yang mengikutinya.

To Kaili di Kota Palu

Suku Kaili sebagai salah satu suku di Indonesia sedikit banyak telah memberikan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa, walau dalam realitanya eksistensi suku ini kurang dikenal padahal menjadi suku yang dominan di salah satu ibukota propinsi di Indonesia, yaitu di Kota Palu Sulawesi Tengah. Djafar (2014:2) menunjukkan, dikatakan sebagai orang Kaili karena adanya kesamaan budaya dan adat istiadat di kalangan mereka.

Mattulada, seorang ahli antropologi yang mendalami masalah suku bangsa Kaili di Sulawesi Tengah, mengajukan lima ciri pengelompokan pada suku bangsa ini. Pertama, adanya komunikasi antara sesama mereka, yaitu bahasa atau dialek yang memelihara keakraban dan kebersamaan di antara mereka. Kedua, pola-pola sosial kebudayaan yang menumbuhkan perilaku yang dinilai sebagai bagian dari kehidupan adat istiadat (termasuk cita-cita dan ideologi) yang dihormati bersama. Ketiga, adanya perasaan keterikatan antara satu dengan lainnya sebagai suatu kelompok, dan yang menimbulkan rasa kebersamaan di antara mereka. Keempat, adanya kecenderungan menggolongkan diri ke dalam kelompok asli, terutama dalam menghadapi kelompok lain pada berbagai kejadian sosial kebudayaan. Kelima, adanya perasaan keterikatan dalam kelompok

karena hubungan kekerabatan, genealogis, dan ikatan kesadaran territorial di antara mereka (Hidayah, 1996:xxiii).

Abdul Latief (2015) menunjukkan bahwa perkembangan Kota Palu, pada ranah sosio-kultural sangat menarik, karena kota ini didiami oleh sebagian besar adalah masyarakat Kaili. Tetapi dalam perkembangannya, masyarakat dari luar kota dan luar Provinsi Sulawesi Tengah pun berdatangan. Ada yang hanya datang sekedar melancong, tetapi ada juga yang tinggal menetap. Hal inilah yang menciptakan perubahan dari heterogenitas menjadi homogen. Sehingga secara kultural, keadaan yang demikian membentuk persoalan baru yakni situasi sosial yang kurang kondusif akibat persaingan ekonomi maupun sosial secara kontinyu.

Metode Penelitian

Paparan dalam tulisan ini mengikuti pada tulisan Denzim dan Yvonna (2009:6) yang menyatakan bahwa kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum di ukur (jika memang diukur) dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Para peneliti kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subyek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan.

Propinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu kota Palu. Dari sembilan kabupaten dan satu kota, dipilih kota Palu untuk dijadikan lokasi penelitian. Alasan pemilihan kota Palu menjadi lokasi penelitian adalah karena : 1) Kota Palu sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah, 2) Penduduknya bersifat multikultur yaitu terdiri atas beberapa kelompok etnis lokal

(Kaili, Kulawi, Toli-toli, Buol, Mori, Balantak, Saluan), etnis pendatang seperti Bugis, Makassar, Jawa, Bali, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Mandar, Batak, Arab, dan Tionghoa. Penganut agamanya meliputi Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan kondisi khusus yang dimiliki dimana representasi masyarakat Kaili tersebar di wilayah ini. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja berdasarkan masalah yang diteliti dengan pertimbangan khusus bahwa belum adanya penelitian serupa yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip teknik penarikan sampel purposive yang bertujuan untuk mendapatkan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri pokok populasi (Singarimbun, 1984 : 48).

Untuk mendapat informan To Kaili sehubungan dengan penelitian ini, maka penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling (disengaja). Dengan pertimbangan bahwa informan tersebut dapat mengetahui dan memberikan jawaban atau informasi yang akurat atas permasalahan penelitian ini.

Kesulitan dalam menetapkan To Kaili asli berdasarkan nilai budaya akan menghadapi kesulitan untuk dapat mengklaim kebudayaan suatu daerah secara murni, oleh karena akan dijumpai proses deterritorialisasi, suatu konsep yang mengacu pada “hilangnya hubungan alamiah antara kebudayaan dengan wilayah geografi dan sosial, atau hilangnya homogenitas dalam kebudayaan-kebudayaan daerah”. Seperti dikemukakan Umar Yunus (Koentjaraningrat, ed,1983) dalam mengupas kebudayaan Minangkabau : “Apa yang dianggap dulu sebagai daerah kebudayaan Minangkabau,

mungkin sekarang telah banyak kemasukan unsur lain. Tidak setiap penduduknya dianggap sebagai pemangku kebudayaan Minangkabau, dan sebaliknya tidak setiap orang dari ayah dan ibunya adalah keturunan Minangkabau dapat dikatakan sebagai pendukung kebudayaan Minangkabau, terutama kalau mereka dibesarkan di luar daerah kebudayaan Minangkabau. Sehingga untuk itu To Kaili yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat di Kota Palu yang menyatakan dirinya sebagai to Kaili (orang Kaili) berdasarkan geneologi, juga ditunjukkan dengan pemahamannya akan budaya Kaili dan mampu menggunakan bahasa Kaili dalam percakapan sehari-hari.

Penelitian kualitatif berupaya mendeterminasi luasnya cakupan kehidupan sosial subyek dengan menggunakan berbagai sumber data utama. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan menurut Berg (2004), yakni : wawancara mendalam (depth interview), data pribadi subyek dan observasi pengamatan terlibat (participant observer).

Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, maka cara yang ditempuh adalah dengan menggali sumber-sumber dan jenis data melalui wawancara langsung dengan informan. Dalam melakukan wawancara, digunakan pendekatan petunjuk umum wawancara, yaitu membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan sebagai petunjuk proses dan isi wawancara dapat seluruhnya tercakup (Moleong, 2018 : 187).

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai fokus yang diteliti. Analisis dilakukan sebagai upaya mencari makna. Pencarian makna berkaitan dengan

kegiatan penafsiran data, karena itu dalam penelitian kegiatan analisis dan penafsiran data tidak dapat dipisah-pisahkan.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, hasil pengamatan yang berbentuk catatan lapangan, dan analisis dokumen lainnya. Setelah itu data akan disusun dalam satuan-satuan dengan membuat kategorisasi dan kodifikasi. Kemudian data disusun berdasarkan urutan-urutannya untuk kepentingan penelaahan. Tahapan analisis data kemudian dilanjutkan dengan penafsiran data (Moleong, 2018 : 248)

Dalam penelitian ini kegiatan penafsiran data sampai pada tujuan deskripsi semata-mata secara kualitatif. Deskripsi dilakukan dengan menggunakan teori dan rancangan organisasional yang telah ada. Penafsiran data dilakukan dengan menjelaskan hubungan kategori-kategori ke dalam kerangka yang sistematis.

Hasil Penelitian

To Kaili merupakan penduduk asli di Kota Palu. Sebagai penduduk asli yang tinggal di kota, tentu sangat terbuka ruang untuk bertemu dengan pendatang. Kota Palu, sebuah kota yang berada di tiga posisi strategis yakni sebagai Ibukota Kabupaten Donggala (1952-2000), Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah (ditetapkan tahun 1964), dan Ibukota Kotamadya dan Kota Palu (mulai ditetapkan tahun 1994). Hal tersebut pasti menarik perhatian masyarakat untuk datang ke Kota ini, baik dari desa-desa di sekitar Sulawesi Tengah maupun dari luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota selalu diasumsikan dengan kemajuan, pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada banyaknya lapangan pekerjaan.

Memahami To Kaili, diakui memerlukan akurasi yang tinggi untuk mengenali prinsip nilai hidup kolektif orang-orang Kaili. Di tengah keterbukaan dan komunitas perubahan iklim sosial di kota Palu yang memungkinkan masuknya berbagai pengaruh eksternal, baik yang dibawa oleh media massa maupun dampak dari mobilitas penduduk yang tinggi termasuk, sehingga tidak mudah ditemukan dan merumuskan nilai-nilai kesucian identitas budaya komunitas Kaili. Untuk itu, hasil penelitian melalui observasi dan diskusi panjang dengan berbagai sumber akhirnya sampai pada titik keyakinan bahwa apa yang akan dilukiskan di masyarakat warisan budaya Kaili di masa lalu akan terus dibela secara lisan oleh generasi komunitas mereka (Mahpuddin dan Hayat, 2016).

Penelitian ini berdasarkan penelusuran yang mendalam, dengan menggunakan metode mendengar cerita (noepe tutura) sebagai cara utama dalam mendapatkan data primer. Sehingga hasilnya dapat ditunjukkan dalam hasil penelitian berikut.

To Kaili Egaliter

Dalam menghadapi situasi lingkungan yang selalu berubah, manusia akan menggunakan berbagai cara tingkah laku yang selektif sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Cara tingkah laku itu menunjukkan strategi dalam memecahkan masalah. Strategi tersebut selalu berubah karena perubahan peran dan paradigm yang diperlukan untuk mengatasi kendala atau hambatan yang ada.

Budaya lokal manapun dan kapanpun tak ubahnya dengan “literatur hidup”, yang kandungan isinya memperlihatkan keutuhan dan koherensi sedemikian rupa. Corak pemahaman semacam itu oleh Geertz

(1992:5) disebut sebagai upaya “*understanding of understanding*”.

Memahami anggapan To Kaili yang berpikiran bahwa faktor asal usul keberadaan manusia Kaili berasal dari dua kesatuan alam (perempuan yang keluar dari bambu yang disebut *to manuru* dan laki-laki dari bumi yang disebut *tomalanggai*), membuat *To Kaili* sangat menjaga harmoni antara dunia yang realitas dan dunia lain yang berasal dari peninggalan leluhur. Mitos tersebut juga mempengaruhi pandangan terhadap keberadaan pendatang, sebagai individu yang datang membawa kebaikan. Etnis Kaili merupakan etnis egaliter terhadap etnis lain. Oleh seorang informan, ditunjukkan

Egaliter To Kaili dapat dibuktikan adanya penerimaan dalam bentuk adanya tarian ‘Peaju’, suatu tarian yang merupakan symbol penerimaan terhadap pendatang. Selain itu dapat dilihat dari penerimaan secara kekeluargaan melalui pernikahan antara To Kaili dengan pendatang, atau To Kaili ketika berada di luar wilayah Kaili menikah dengan anggota masyarakat setempat.

Ketika pendatang telah lama menetap di Kota Palu, apalagi yang telah melakukan kawin mawin dengan penduduk setempat, mereka akan mendefinisikan diri sebagai ‘Orang Palu’. Pendatang yang tinggal di Kota Palu, karena mengikuti orang tua atau datang mencari kehidupan yang lebih baik, dan telah merasa memberi kontribusi terhadap pembangunan Kota Palu, akan menyebut dirinya sebagai “Orang Palu”. Mereka sekalipun mengakui sebagai “Orang Palu”, dalam arena identitas etnis itu berkumpul atau merasa adanya kerinduan akan kampung halaman, mereka tetap mengaku sebagai etnis dimana mereka berasal. Pendatang yang memiliki jumlah banyak, di Kota Palu membentuk organisasi,

seperti orang Jawa membentuk Kerukunan Keluarga Jawa (KKJ), orang dari Sulawesi Selatan membentuk Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), dari Kalimantan membentuk Kerukunan Keluarga Banjar (KKB).

Penelitian yang dilakukan Ilyas Lampe (2010) menundukung fakta seperti itu. Penelitian tentang identitas etnik dalam komunikasi politik menunjukkan bahwa atribut artificial komunikasi politik anggota DPRD Palu seperti pakaian yang digunakan, gaya hidup, kendaraan yang dimiliki dan gaya komunikasi merupakan bentuk pengelolaan kesan (*impression management*) dalam panggung politik. Sementara simbol-simbol identitas etnik yang ditemukan dalam komunikasi politik adalah, klan sebagai identitas, bahasa daerah, logat dan adat istiadat. Beragam simbol tersebut kemudian melahirkan stigma pendatang dan asli sebagai bentuk pembeda dan co-identifikasi identitas etnik. Istilah pendatang disematkan pada orang yang tidak memiliki ikatan genealogis, perkawinan, tempat lahir dan hubungan erat dengan tokoh beretnis Kaili. Etnik pendatang lalu mengkonstruksi identitas baru yang mereka sebut sebagai “orang Palu”. Penggunaan beragam identitas tersebut juga dilakukan sesuai konteks dan waktu yang dianggap dapat memberikan keuntungan politik, penerimaan sosial dan budaya.

Penggambaran tentang To Kaili sebagai pelestari solidaritas sosial juga ditunjukkan oleh Ahmad Faidi (2015) dalam pengantarnya menyatakan tentang karakter Suku Kaili, bahwa ketika masyarakat modern beralih menjadi individualis, suku Kaili tetap mempertahankan solidaritas dalam bermasyarakat. Mereka menyadari bahwa dalam bermasyarakat, bahu membahu, bukanlah tuntutan, akan tetapi

sebuah prinsip yang harus dijalankan secara berkesinambungan

Orang Palu, Strategi Adaptasi Torang Dan Dorang

Dalam ungkapan penunjukkan diri, terdapat kata yang merupakan hasil akumulasi bahasa orang Palu yaitu '*torang*' dan '*dorang*'. Kata *torang* merupakan penggabungan dari kata 'kita orang' menjadi '*kitorang*'. Etnis Kaili memiliki kebiasaan menyingkat beberapa kata menjadi satu ucapan, seperti kalimat : saya tidak mau, diucapkan '*sa te mau*'; atau kalimat saya pergi dulu, menjadi '*sa pi dulu*'. Kata 'kita orang' atau *kitorang* biasa digunakan oleh orang Manado sebagai penunjuk kata untuk identitas kita. Oleh orang Kaili, kata *kitorang* disingkat menjadi *torang*. Adapun kata *dorang*, berasal dari kata 'dia orang' yang juga biasa digunakan orang Manado, yang sering diucapkan menjadi *dorang* dalam pembicaraan informal orang Palu, yang berarti mereka.

Posisi *torang* sebagai penunjuk identitas kita, dan *dorang* sebagai penunjuk identitas mereka, menunjukkan adanya pembagian identitas antara penduduk asli dan pendatang, antara 'kita' dan 'mereka'. Pada penjabaran komunikasi sehari-hari, *torang* dapat juga menunjukkan pandangan pendatang melihat penduduk asli sebagai *dorang*.

Penunjukkan dominasi etnis cenderung disamarkan bila berbicara tentang upaya memajukan Kota Palu. Status sebagai 'Orang Palu', merupakan strategi untuk menyamakan batas antara torang dan dorang. Pendatang diuntungkan oleh nilai budaya yang di konstruksi To Kaili, belo rapovia belo rakava, yang memandang sepanjang kebaikan dilakukan akan menghasilkan kebaikan juga. Pendatang yang dianggap akan membawa kebaikan,

jika To Kaili terima dengan baik, maka kebaikan juga yang akan didapatkan.

Antara pendatang dan penduduk asli masing-masing memiliki stereotip terhadap perilaku antara keduanya. Dalam penelitian ini, peneliti tidak bertanya pada pendatang tentang pandangan mereka terhadap etnis Kaili sebagai penduduk asli, oleh karena penelitian ini lebih berfokus atau berusaha menggali pemikiran To Kaili tentang etnisnya sendiri. Sekalipun terdapat juga fenomena penempatan identitas etnis akan nampak dalam persaingan meningkatkan kemampuan ekonomi, melalui aktifitas bekerja. Pendatang yang berhasil di Kota Palu menunjukkan kerja yang bersungguh-sungguh, dan membentuk perkumpulan sendiri.

Bila pendatang membentuk organisasi perkumpulan etnisnya di satu tempat, To Kaili sangat jarang melakukan hal tersebut. Sepanjang pencarian peneliti dengan bertanya pada keluarga yang menempuh pendidikan di Kota besar seperti Surabaya, Yogya, Bandung dan Jakarta, perkumpulan orang-orang yang berasal dari etnis Kaili yang membentuk organisasi sangat jarang ditemukan .

Istilah Kerjasama

Bagi To Kaili, kebersamaan sebagai suatu bagian dari keluarga besar mendapat perhatian yang istimewa. Konsep-konsep dasar yang umum diketahui dan dimiliki *To Kaili* seperti *Sintuvu ntodea* (kehidupan bersama dalam persaudaraan, kekeluargaan), *Tonda Talusi* (kehidupan persaudaraan atau kekeluargaan seperti tungku masak yang penyangganya terdiri dari tiga atau lebih dari satu untuk bisa menjalankan fungsi, tidak bisa sendiri-sendiri tetapi harus bersama saling membantu dan kerjasama), atau *Nosiala pale* (Bergandengan tangan terutama dalam bekerja dan menyelesaikan

tugas-tugas dalam satuan kekerabatan), menunjukkan tingginya ketergantungan To Kaili pada sistem kekerabatan, yang dapat juga berarti *To Kaili* tergantung pada komunalnya.

Tampak bahwa *To Kaili* sangat menjunjung kebersamaan dan menjaga hubungan kekeluargaan. Sehingga membuat *To Kaili* merasa tidak perlu berupaya secara keras untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi kepentingan individual. Oleh karena memiliki ketergantungan pada hubungan kekerabatan yang erat, hal ini juga membuat *To Kaili* memiliki pemikiran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat diperoleh dengan bantuan saudara-saudaranya. Kondisi ini dalam pengamatan awam seolah membuat *To Kaili* berada pada zona nyaman pada budaya yang mereka ciptakan sehingga menunjukkan *To Kaili* tidak memiliki daya saing untuk menunjukkan eksistensinya. Pendapat Mattulada (1996:100), terkait hal tersebut dituangkan sebagai berikut:

1. Tentang hakekat hidup, bagi To Kaili adalah untuk menikmati apa yang disajikan oleh alam, termasuk yang diwarisi dari pendahulu. Apa yang paling didambakan adalah ketenangan dan mensyukuri apa yang ada. Alam dan peninggalan orang tua cukup memberikan jaminan untuk kita bisa menikmati hidup, sebagai sesuatu yang 'baik'. Hidup ini adalah untuk kebaikan manusia, bukan untuk menebus dosa, atau menyiksa diri. Hidup ini untuk dinikmati sebagaimana adanya.
2. Tentang hakekat karya, bagi To Kaili analog dengan pandangannya tentang hakekat hidup untuk dinikmati sebagaimana adanya, maka karya itu adalah suatu upaya untuk memenuhi hakekat hidup. Apabila hakekat hidup telah terpenuhi maka karya itupun

mencapai terminalnya, yang tidak perlu dilebih-lebihkan. Karya ditentukan oleh manusia, bukan manusia ditentukan oleh karya. Karena prestise dalam kehidupan manusia dipandang penting, dan bernilai tinggi. Prestasi kerja adalah ditentukan oleh tingkat pencapaian itu.

3. Tentang kedudukan waktu dalam kehidupan, bagi To Kaili masa lalu itu memberikan pamor dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Masa lalu yang selalu dihadirkan pada kenyataan masa kini, membuat To Kaili amat awas terhadap kehadiran orang lain dalam lingkungannya, karena dikhawatirkan kebanggaan masa lalunya menjadi kurang dihargai. Waktu karena dipandang mempunyai kualitas tertentu yang ditentukan oleh masa lalu, maka tidak perlu terjadi perlombaan dalam waktu. Waktu dalam kualitas tertentu harus dapat dinikmati dengan tempo lamban. Jangan berpacu dengan waktu, karena manusia yang menentukan dalam menikmati sesuatu yang disajikan oleh waktu.
4. Hakekat hubungan dengan alam sekitar, bagi To Kaili alam sekitar adalah buat manusia. Ia harus dimanfaatkan untuk kesenangan manusia. Alam menyediakan diri untuk dipergunakan oleh manusia. Karang di laut, hutan di gunung semuanya tersedia untuk digunakan bagi kepentingan manusia.
5. Hakekat hubungan manusia dengan sesamanya, pada To Kaili masih kuat tertanam 'in-group solidarity', sehingga hubungan-hubungan 'orang luar' masih amat diperhitungkan dengan 'rasa kecurigaan' yang cukup tinggi.

Kesimpulan-kesimpulan sementara tersebut menurut Mattulada (1996:101), dari

pengamatan terhadap orientasi nilai budaya yang terdapat pada To Kaili menyangkut makna karya, masih diperlukan waktu untuk tumbuhnya ethos kerja sebagai pernyataan lanjut dari eksistensi. Kerja belumlah sesuatu yang harus dihargai untuk menentukan martabat manusia. To Kaili, bukannya 'malas', melainkan belum memiliki pola orientasi yang menempatkan kerja sebagai pernyataan eksistensi manusia.

Pandangan tersebut diakui oleh Mattulada bahwa pengamatan yang dilakukan bersifat amat sementara, hanya diangkat dari pengalaman bergaul selama lima tahun dengan To kaili di Lembah Palu, sehingga kesimpulan yang dikemukakan amat cenderung kepada interpretasi subyektif yang masih memerlukan perdebatan untuk mengangkatnya ke wilayah yang lebih obyektif.

Menanggapi hal tersebut, seorang informan tidak menerima sepenuhnya pandangan Mattulada tersebut.

Tulisan itu hanya melihat sisi kelemahan kita, tidak melihat kekuatan atau kelebihan kita, cenderung tidak objektif melihat kondisi sosial masyarakat. Orang Kaili itu dulu bekerja mengolah kebun sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara saat itu lahan masih luas, penduduk belum banyak. Jadi kalau bekerja mengolah kebun kelapa, tidak perlu mengolah sawah, biar keluarga lain yang kerja.

Pemikiran berbagi kesempatan menunjukkan cara demikian dilakukan sebagai strategi survive menjaga solidaritas, baik terhadap keluarga atau sesama etnis kaili maupun terhadap pendatang. Keyakinan akan pandangan belo rapovia belo rakava, menjadi dasar bahwa To Kaili akan tetap dihargai sebagai tupu ngata dan

tetap menjadi penguasa dalam lingkungan kehidupan sosial.

Cairnya hubungan to Kaili dengan pendatang yang terlihat pada penerimaan identitas torang dan dorang, pada satu sisi akan memperkuat pembangunan Kota Palu. Pada sisi lain, akan mengurangi penunjukkan identitas sebagai penduduk asli. Berdasar pencarian makna akan kondisi tersebut, diungkapkan oleh seorang informan:

Yakin dengan proses perjalanan waktu 'biarlah waktu yang menunjukkan siapa yang kuat, siapa yang lemah', 'waktu yang akan menjawab hasil dari setiap usaha yang dilakukan'. Tidak boleh marah dengan kondisi yang terlihat timpang, bila suka marah-marah akan membuat image To Kaili negatif di mata orang luar. Belajar saja supaya jadi tau napande (orang yang pandai), pasti akan dihargai orang.

Pada To Kaili kekuasaan pribadi didirikan atas dasar harmoni dengan lingkungan sosial dan harmoni dengan alam, percaya bahwa alam akan menunjukkan kuasanya bila bersabar menjalani aktifitas. Seperti diungkapkan oleh informan tersebut dalam menempuh pendidikan hingga mendapat jabatan yang tepat, menunjukkan kesabaran itu menunjukkan hasil. Kemudian memberi pengaruh pada generasi berikut yang membuat saat ini sudah banyak To Kaili yang dengan kesadaran sendiri melanjutkan pendidikan. Melalui peningkatan pendidikan, diharapkan kemampuan To Kaili menjadi tupu ngata (pemilik kampung) dapat lebih bernas.

Sejalan dengan perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, konsep 'berpartisipasi dan membangun'

bukan hanya berkaitan dengan pemerataan distributif program pembangunan, tetapi yang lebih penting pemerataan kemampuan dan kesempatan termasuk bagi To Kaili untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang menyangkut peningkatan kualitas diri.

Kesimpulan

Kesimpulan sebagai hasil dalam penelitian ini menunjukkan dalam bentuk seni, Egaliter To Kaili dapat dibuktikan adanya penerimaan dalam bentuk adanya tarian 'Peaju', suatu tarian yang merupakan symbol penerimaan terhadap pendatang. Konsep-konsep dasar yang umum diketahui dan dimiliki To Kaili dalam menunjukkan kerjasama sebagai bentuk solidaritas adalah Sintuvu ntodea (kehidupan bersama dalam persaudaraan, kekeluargaan), Tonda Talusi (kehidupan persaudaraan atau kekeluargaan seperti tungku masak yang penyangganya terdiri dari tiga atau lebih dari satu untuk bisa menjalankan fungsi, tidak bisa sendiri-sendiri tetapi harus bersama saling membantu dan kerjasama), dan Nosiala pale (Bergandengan tangan terutama dalam bekerja dan menyelesaikan tugas-tugas dalam satuan kekerabatan).

Kemudian salah satu strategi kebersamaan adalah persamaan rasa sebagai 'Orang Palu, sebagai 'Orang Palu' merupakan peleburan kebersamaan yang tidak membedakan penduduk asli dan pendatang. Kebersamaan itu menghasilkan kata yang merupakan hasil akumulasi bahasa orang Palu yaitu 'torang' dan 'dorang'. Kata torang merupakan penggabungan dari kata 'kita orang' disingkat menjadi 'kitorang', sedangkan kata dorang merupakan penggabungan dari kata 'dia orang', yang digunakan sesuai konteks pembicaraan.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif, Juraid. 2015. *Sulawesi Tengah: Perspektif Sosiokultural, Demokrasi, Dan Konflik*. (http://interseksi.org/archive/publication/essays/articles/sultengah_demok_konflik.html. Diakses pada 1 Januari 2019, 14:32 WITA.)
- Alfaqi, M.Z., 2016. Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2)
- Denzim, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, 2009. *Handbook Of Qualitatif Research*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Depdiknas. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djafar, Suaib. 2014. *Kerajaan dan Dewan Adat di Tanah Kaili Sulawesi Tengah*. Yogyakarta, Penerbit Ombak
- Doyle, P Johnson. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Durkheim, Emile, 1964, *The Division of Labour in Society*, Translated by George Simpson, New York, Free Press
- Dyson P.,L . 1979. *Sistim Dan Motivasi Gotong Royong Pada Suku Bangsa Dayak Tunjung di Desa Juhan Asa Kabupaten Kutai Kalimantan Timur*. Skripsi , Universitas Indonesia (Tidak Dipublikasikan)
- Faidi, Ahmad. 2015. *Suku Kaili Pelestari Solidaritas Sosial*. Makassar, Arus Timur
- Garna, Judistira. 1999. *Metode Penelitian ; Pendekatan kualitatif*. Bandung. Primaco Akademika
- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta, Kanisius

- Hidayah, Zulyani. 1996. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta, LP3ES
- Lampe, Ilyas. 2010. Identitas Etnik Dalam Komunikasi Politik .Palu, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8 Nomor 3, hlm 299.
- Lutan, Rusli. 2001. *Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah; Analisis Dampak Sistem Nilai Budaya Terhadap Eksistensi Bangsa*. Bandung, Angkasa
- Mahpuddin, Muzahid Akbar Hayat. 2016. *Meaning Of Cultural Legacy For Kaili Community In Palu City*. (Hermeneutic Study: Local Wisdom For Kaili-Da'a Community) <http://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/icotic/article/download/5637/5612>. (Diakses 2 Januari 2019, 15:46 WITA)
- Mattulada. 1986. *Sejarah Kebudayaan To Kaili*. Palu, Badan Penerbit Universitas Tadulako
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Putra, Adi Mandala., Bahtiar, Ambo Upe. 2018. Eksistensi Kebudayaan Tolong Menolong (Kaseise) Sebagai Bentuk Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Muna (Studi di Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga). *Neo Societal*; Vol. 3; No. 2; 2018 ISSN: 2503-359X; Hal. 476-483
- Soyomukti, Nutani. 2016. *Pengantar Sosiologi; Dasar Analisis, Teori, Dan Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, Dan Kajian-Kajian Strategis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

**PENGARUH TAYANGAN INDONESIA LAWYER CLUB (ILC)
TERHADAP SIKAP KESADARAN HUKUM
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS)**

Ivan Taufiq^{1*}, Ernita Arif², Indraddin²

¹*Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas*

²*Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas*

Jln. Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat

Email : ievhanzhaya.iz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tayangan Indonesia Lawyer Club terhadap kesadaran mengenai hukum yang mana menampilkan permasalahan hukum dan kriminalitas. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teori yang digunakan adalah teori Stimulus-Organisme-Respon yang dikemukakan oleh Hovland Jannis dan Kelley serta teori Kultivasi oleh George Gebner. Untuk mengetahui pengaruh pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana. Variabel X pada penelitian ini adalah tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One, sedangkan variabel Y adalah Sikap Kesadaran Hukum Mahasiswa. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 150 orang, menggunakan teknik *quota sampling* untuk menentukan sampel pada penelitian ini. Pengolahan data Uji coba kuesioner dilakukan dengan menggunakan Program Statistic Product and Service Solution (SPSS) Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan antara tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One terhadap sikap kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Hal ini berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi linear sederhana diperoleh nilai koefisien regresi pada penelitian ini adalah $Y = 15,48 + 0,19X$ dengan t hitung 2,77 lebih besar dibandingkan dengan t tabel 1,97 dengan tingkat signifikansi 0,006 lebih kecil dibandingkan dengan dari $\alpha = 0.05$. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah media massa yang memberikan informasi dan pengetahuan yang pada akhirnya dapat membentuk persepsi, faktor pendidikan dimana mereka telah menyadari bahwa sebagai seorang mahasiswa harus bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan faktor lingkungan hal ini disebabkan adanya aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kampus itu sendiri.

Kata Kunci : Pengaruh Media; Komunikasi Massa; Sikap

Submisi : 28 Februari 2018

Pendahuluan

Media massa merupakan media atau ruang yang dapat digunakan untuk mempublikasikan baik itu informasi maupun hiburan kepada masyarakat.

Penyajiannya pun dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian pemirsanya. Salah satu media massa yang menarik perhatian pemirsa adalah televisi, karena bentuknya yang menampilkan gambar dan suara sekaligus yang dapat

mempengaruhi pikiran hingga ke sikap dan perilaku pemirsa. Media televisi memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi masyarakat. Jika radio memiliki karakteristik yang kuat, seperti adanya unsur kata-kata, musik dan sound effect, maka televisi memiliki karakteristik yang kuat juga seperti adanya unsur visual berupa gambar. Gambar yang terdapat di televisi bukan gambar mati, melainkan gambar hidup yang mampu menimbulkan kesan yang cukup mendalam pada penontonnya (Effendy,2002:177)

Sejak pertengahan tahun 2010 , siaran televisi di Indonesia disegarkan oleh program- program yang sedikit berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Beberapa program acara tersebut menguak dan menayangkan berbagai realitas kehidupan tentang masalah hukum dan kriminalitas seperti Mata Najwa di Trans7, Rosi di Kompas TV dan Indonesia Lawyer Club di TV One. Dari ketiga tayangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil program acara Indonesia Lawyer Club karena tayangan ini mempunyai keunikan tersendiri. Awalnya Indonesia Lawyer Club hanyalah suatu program yang disebut Jakarta Lawyer Club yang penayangannya tidak memiliki jadwal yang tetap. Namun, melihat animo pemirsa yang sangat besar, sejak tanggal 25 April 2017, Indonesia Lawyer Club sudah menjadi satu program acara tersendiri yang tayang selama 210 menit setiap hari Selasa pukul 20.00 WIB.

Pada satu tayangan, Indonesia Lawyer Club pernah mengangkat topik “Setelah Ahok Minta Maaf” pada penayangan 25 April 2017 yang membahas bagaimana hukum dimata masyarakat ketika seorang Ahok mengakui dan meminta maaf terkait kasus penistaan agama. Ada juga episode yang ditayangkan dengan topik “Potret Hukum Indonesia : Benarkah Tajam Sebelah ?” pada penayangan 23 Juli 2018

yang membahas terkait realita hukum di Indonesia yang pada tahun politik seakan- akan tumpul kepada pihak pendukung pemerintah dan tajam pada pihak oposisi. Untungnya, Indonesia Lawyer Club mampu mengemas acaranya dengan format serius namun di bumbu dengan humor-humar cerdas dari narasumber dan pembawa acara Indonesia Lawyer Club.

Selain memiliki berbagai macam keunikan serta keberanian seperti yang telah dijelaskan di atas, Indonesia Lawyer Club yang telah tayang selama hampir sembilan tahun terakhir ini juga memiliki pencapaian yang sangat membanggakan yaitu secara berturut dalam sembilan tahun terakhir menjadi nominasi tetap pada beberapa penghargaan yaitu Panasonic Gobel Award dan Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia serta menjadi pemenang sebanyak lima dari sembilan penghargaan di atas. Tak luput dari itu semua, tayangan Indonesia Lawyer Club juga dapat membawa pengaruh terhadap sikap kepada masyarakat, salah satunya mahasiswa yang pernah menyaksikan tayangan tersebut yang mengungkapkan akan berbagai masalah terkait hukum dan kriminalitas yang terjadi di Indonesia.

Pada ruang lingkup lebih kecil Indonesia Lawyer Club mampu memberikan edukasi berupa bagaimana masyarakat melihat suatu permasalahan hukum dan kriminalitas mendasar yaitu sebuah pelanggaran yang mana merupakan bagian dari permasalahan hukum. Sering sekali sebagai seorang mahasiswa mereka juga melakukan pelanggaran baik dilingkungan masyarakat maupun kampus seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas, parkir sembarangan, menerobos lampu merah dan berbagai macam pelanggaran lain. Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti memilih responden mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Andalas tersebut karena kebanyakan topik-topik yang diangkat dan ditayangkan melalui tayangan Indonesia Lawyer Club berhubungan dengan latar belakang pendidikan responden dibidang sosial dan politik yang mana pada program Indonesia Lawyer Club banyak sekali topik yang membahas permasalahan hukum dari sudut pandang sosial dan politik.

Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang, dan belum sempurna. Pengertian ini kemudian diperluas dengan maksud sebagai kesimpulan yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian (Bungin, 2001:75). Dari pengertian tersebut maka hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan tersebut adalah:

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara menonton tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One terhadap sikap kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Hi : Ada pengaruh antara menonton tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One terhadap sikap kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Komunikasi Massa

Para ahli komunikasi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan komunikasi massa (*mass communication*) adalah komunikasi melalui media massa, jelasnya merupakan singkatan dari komunikasi media massa. Para ahli disini membatasi pengertian komunikasi massa pada komunikasi dengan menggunakan media massa, misalnya surat kabar, majalah, radio, televisi, atau film. Media massa yang paling banyak digunakan saat ini adalah televisi, karena televisi memiliki daya tarik tersendiri dengan audio visualnya

dibandingkan media massa yang lain. Namun setiap media massa memiliki fungsi yang sama, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan masing-masing media massa tersebut. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi massa berbeda dengan komunikasi lain. Komunikasi massa memakai media massa sebagai salurannya dan efek komunikasi massa adalah efek yang tertunda.

Media massa memang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat. Efek hanyalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa media massa (Ardianto, 2005 : 48). Oleh karena fokusnya pesan, maka efek harus berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa. Pendekatan pertama dari efek komunikasi adalah kecenderungan kita melihat media massa itu sendiri, baik yang berkaitan dengan pesan maupun media itu sendiri. Pendekatan kedua adalah melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa penerima informasi, perubahan perasaan atau sikap, dan perubahan perilaku atau dengan istilah lain, perubahan kognitif, afektif, dan behavior. Pendekatan ketiga meninjau satuan observasi yang dikenai efek komunikasi massa individu, kelompok, organisasi, masyarakat dan bangsa (Rahmat, 2005 : 218).

Televisi

Televisi (*television*) berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari kata "*tele*" yang berarti jauh, "*vision*" berarti penglihatan. Menurut Setia (2003:5), televisi adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Televisi yang dahulu mungkin hanya menjadi konsumsi kalangan dan umur tertentu, saat ini bisa dinikmati dan sangat mudah di jangkau oleh semua kalangan tanpa batasan usia. Dari semua media komunikasi yang ada, televisilah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. Dalam perkembangannya televisi merupakan media massa yang mengalami perkembangan paling

pesat dan ditonton oleh jutaan masyarakat di dunia. Televisi memiliki fungsi yang sama dengan media massa lainnya, yakni memberikan informasi, mendidik, menghibur dan membujuk.

Menurut Mar'at acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan para penonton, ini adalah hal yang wajar. Jadi, jika ada hal-hal yang mengakibatkan penonton terharu, terpesona, atau latah adalah bukan sesuatu yang istimewa, sebab salah satu pengaruh psikologi dari televisi ialah seakan-akan menghipnotisir penonton, sehingga penonton tersebut dihanyutkan dalam suasana pertunjukan televisi (Effendy, 2003 : 192).

Terpaan Tayangan

Terpaan tayangan menurut Rosengren diartikan sebagai penggunaan media oleh khalayak yang meliputi jumlah waktu yang digunakan, jenis isi media serta hubungan antara khalayak dengan isi media yang dikonsumsi atau media secara keseluruhan. Jumlah waktu meliputi frekuensi dan durasi tayangan (Rakhmat 2001 : 66).

Dalam konteks tayangan televisi di Indonesia, yang didominasi oleh televisi swasta atau komersil, orientasi pasar yang dikonsepsikan sebagai budaya massa ini sangat kental dan sangat nyata dilihat dan dirasakan. Televisi swasta (komersial) menjadi bagian dari kebudayaan massa. Sebagai bagian dari laku komersial dan budaya massa, maka liku-langkahnya pun sesuai dengan dinamika kapitalisasi, dimana produk yang ditayangkan adalah bertujuan untuk memuaskan sifat konsumernya khalayak dalam budaya massa ini, memuaskan dahaga kesenangan sesaat dan menjadi alat untuk mengalihkan perhatian dari rutinitas yang dianggap sebagai beban hidup.

Televisi merupakan anak kandung dari kapitalisme. Televisi akan melahirkan program yang digemari khalayak, apapun macamnya. Selama tayangan tersebut masih mendatangkan keuntungan melimpah, acara tersebut akan selalu ditayangkan. Namun, bila masyarakat sudah mulai jenuh, tayangan tersebut dengan sendirinya akan ditinggalkan. Begitulah kondisi

aktual yang terjadi pada penonton di Indonesia. Penonton kita mudah sekali menyukai program yang sejenis. Dulu ketika program Dunia Lain sukses, program sejenis yang hadir ikut memiliki angka penonton yang tinggi. Begitu juga ketika ada program-program ber-genre religius. Namun setelah itu, sudah bisa dan sangat mudah ditebak, pasar menjadi jenuh. Selangkah kemudian, program ini satu per satu gulung tikar dan diganti dengan program yang lebih menarik minat penonton lainnya.

Sikap

Sikap (*attitude*) adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang tertentu. bagaimana reaksi seseorang jika ia terkena suatu rangsangan baik dari orang, benda-benda, ataupun situasi-situasi yang mengenai dirinya. Dapat dikatakan bahwa sikap adalah suatu perbuatan atau tingkah laku sebagai reaksi atau respons terhadap suatu rangsangan (stimulus) yang disertai dengan pendirian dan perasaan orang itu (Azhari, 2004 : 161).

Menurut Calhoun & Acocella, suatu sikap adalah sekelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu (Dharmawan, 2003 : 359). Berdasarkan pengertian tersebut, suatu sikap mengandung tiga komponen, yaitu komponen kognitif (keyakinan), komponen afektif (emosi/perasaan), dan komponen perilaku (tindakan).

Sikap diawali dengan perasaan (emosi) baru kemudian menunjukkan reaksi (respons) atau kecenderungan untuk bereaksi. Sebagai sebuah reaksi, sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif: senang atau tidak senang; melaksanakannya atau menjauhinya (menghindarinya) dan begitu seterusnya. Untuk itu Allport (dalam Azhari, 2004: 162) menyatakan bahwa sikap adalah keadaan mental dimana prosesnya berawal dari reaksi terhadap sebuah pengalaman yang dipandang memberikan pengaruh dinamik atau terarah pada diri individu.

Menurut Newcomb (Mar'at, 2000 : 12) mengatakan bahwa sikap merupakan suatu

kesatuan kognisi yang mempunyai velensi dan akhirnya berintegrasi ke dalam pola yang lebih luas. Dari defenisi tersebut dapat dirumuskan bahwa pada prinsipnya sikap mempunyai tiga komponen, yaitu Komponen kognitif (yang berhubungan dengan ide dan konsep), Komponen afektif (yang berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang), dan Komponen konatif (yang merupakan kecenderungan bertindak laku sesuai dengan kodratnya).

Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), (Rahmat, 2002: 166) . Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia.

Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu itu terjadi secara teratur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa hukumnya, siapa yang berhak atau siapa yang bersalah. Kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain, katakanlah dua orang pengendara sepeda motor saling bertabrakan, maka dapatlah dipastikan bahwa, kalau kedua pengendara itu masih dapat berdiri setelah jatuh bertabrakan, akan saling menuduh dengan mengatakan “Kamulah yang salah, kamulah yang melanggar peraturan lalu lintas” atau “Saya terpaksa melanggar peraturan lalu

lintas karena kamu yang melanggar peraturan lalu lintas lebih dulu”. Kalau tidak terjadi tabrakan, kalau tidak terjadi pertentangan kepentingan, sekalipun semua pengendara kendaraan mengendarai kendaraannya simpang siur tidak teratur, selama tidak terjadi tabrakan, selama kepentingan manusia tidak terganggu, tidak akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum.

Kepentingan-kepentingan manusia itu selalu diancam oleh segala macam bahaya: pencurian terhadap harta kekayaannya, pencemaran terhadap nama baiknya, pembunuhan dan sebagainya. Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Salah satu perlindungan kepentingan itu adalah hukum. Dikatakan salah satu oleh karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain: kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan dan kaedah kesopanan. Jadi kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.

Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi. Tepo sliro berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan, memperitungkan dan menghormati kepentingan orang lain dan terutama tidak merugikan orang lain. Penyalahgunaan hak seperti misalnya mengendarai sepeda motor milik sendiri yang diperlengkapi dengan knalpot yang dibuat sedemikian sehingga mengeluarkan bunyi yang keras sehingga memekakan telinga jelas bertentangan dengan sikap tepo sliro.

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan

kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Kalau suatu peristiwa terjadi secara terulang dengan teratur atau ajeg, maka lama-lama akan timbul pandangan atau anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya atau seyogyanya dan hal ini akan menimbulkan pandangan atau kesadaran bahwa demikianlah hukumnya atau bahwa hal itu merupakan kewajiban hukum. Suatu peristiwa yang terjadi berturut-turut secara ajeg dan oleh karena itu lalu biasa dilakukan dan disebut kebiasaan, lama-lama akan mempunyai kekuatan mengikat (*die normatieve Kraft des Faktischen*).

Memang keadaan akan kewajiban hukum itu merupakan salah satu faktor untuk timbulnya hukum kebiasaan.. Akan tetapi kesadaran akan kewajiban hukum tidak perlu menunggu sampai terjadinya suatu peristiwa secara berulang. Suatu peristiwa cukup terjadi sekali saja untuk dapat memperoleh kekuatan mengikat asal peristiwa yang hanya terjadi sekali saja itu cukup menyebabkan timbulnya kesadaran bahwa peristiwa atau perbuatan itu seyogyanya terjadi atau dilakukan.

Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup didalam masyarakat maka tidak bersifat

perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultan dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif.

Teori S-O-R (Stimulus – Organisme - Response)

Untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan kerangka berfikir yang memuat teori-teori yang merupakan pokok-pokok fikiran yang dapat memberikan titik atau gambaran untuk mengetahui dari sudut manakah penelitian ini akan dimulai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori S-O-R. Teori S-O-R merupakan teori komunikasi sebagai singkatan dari Stimulus-Organisme-Respon yang dikemukakan oleh Hovland Jannis dan Kelley. Mereka beranggapan bahwa proses dari perubahan sikap memiliki 3 variabel penting yaitu : Perhatian, Pengertian dan Penerimaan. Efek yang ditimbulkan oleh teori ini adalah reaksi khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan (Effendi,2005:254).

Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organism. Artinya kualitas dari sumber komunikasi (sources) misalnya kredibilitas, kepemimpinan dan gaya berbicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat. Diungkapkan oleh Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan ada tiga variabel penting dalam menelaah sikap yang dirumuskan dalam teori S-O-R, secara interpretatif acara "Indonesia Lawyer Club" merupakan stimulus yang akan ditangkap oleh organisme khalayak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Proses berikutnya komunikan

mengerti. Kemampuan komunikasi inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikasi mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap. Dalam hal ini, perubahan sikap terjadi ketika komunikasi memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal yang telah disaksikan di televisi.

Pendekatan teori S-O-R lebih mengutamakan cara-cara pemberian imbalan yang efektif agar komponen konasi dapat diarahkan pada sasaran yang dikehendaki. Sedangkan pemberian informasi penting untuk dapat berubahnya komponen kognisi. Komponen kognisi itu merupakan dasar untuk memahami dan mengambil keputusan agar dalam keputusan itu terjadi keseimbangan. Keseimbangan inilah yang merupakan sistem dalam menentukan arah dan tingkah laku seseorang. Dalam penentuan arah itu terbentuk pula motif yang mendorong terjadinya tingkah laku tersebut. Jika dikaitkan dengan Cultivations theory, bahwa media massa menanamkan sikap dan nilai kepada khalayaknya (dalam hal ini adalah televisi). Semakin sering seseorang menonton televisi, maka orang tersebut akan lebih mempercayai apa yang mereka lihat di dalam tayangan televisi daripada kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua teori saling berkaitan, dimana ketika seseorang memilih televisi sebagai media yang akan dia gunakan untuk memperoleh informasi maka orang tersebut akan sering menonton televisi dan beranggapan bahwa apa yang dia lihat di televisi adalah realita dalam kehidupan yang sebenarnya.

Teori Kultivasi

Teori kultivasi pertama kali dikenalkan oleh Prof. George Gebner ketika

menjadi Dekan Annenberg School of Communication di Universitas Pennsylvania Amerika Serikat (AS). Menurut teori kultivasi, televisi menjadi media atau alat utama dimana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Persepsi apa yang terbangun di benak penonton tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Ini artinya, ia belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya (Nurudin, 2007: 167).

Gerbner berpendapat bahwa media massa menanamkan sikap dan nilai tertentu. Penelitian kultivasi menekankan bahwa media massa merupakan agen sosialisasi dan menyelidiki apakah penonton televisi itu lebih mempercayai apa yang disajikan televisi daripada apa yang mereka lihat sesungguhnya. Gerbner dan kawan-kawannya melihat bahwa film drama yang disajikan di televisi mempunyai sedikit pengaruh, tetapi sangat penting di dalam mengubah sikap, kepercayaan, atau pandangan penonton yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya (Nurudin, 2007: 169).

Televisi, sebagaimana yang pernah dicermati oleh Gerbner, dianggap sebagai pendominasi "lingkungan simbolik". Sebagaimana yang dicatat McQuail dan Windahl (1993), teori kultivasi menganggap bahwa televisi tidak hanya disebut sebagai jendela atau refleksi kejadian sehari-hari disekitar kita, tetapi dunia itu sendiri. Gerbner (meminjam istilah Bandura) berpendapat bahwa gambaran tentang adegan kekerasan di televisi lebih merupakan pesan simbolik tentang hukum dan aturan (Nurudin, 2007: 170).

Dengan kata lain, perilaku kekerasan yang diperlihatkan di televisi merupakan refleksi kejadian di sekitar kita. Jika adegan kekerasan itu merefleksikan aturan hukum

yang tidak bisa mengatasi situasi seperti yang digambarkan dalam adegan televisi, ada kemungkinan yang sebenarnya terjadi juga begitu. Jadi, kekerasan televisi dianggap sebagai kekerasan yang memang sedang terjadi di dunia ini. Aturan hukum yang bisa digunakan untuk mengatasi perilaku kejahatan yang dipertontonkan di televisi akan memperlihatkan seperti itulah hukum kita sekarang ini. Efek kultivasi memberikan kesan bahwa televisi memberikan dampak yang sangat kuat pada diri individu. Bahkan, mereka menganggap bahwa lingkungan yang disekitarnya sama seperti yang tergambar dalam televisi.

Menurut teori ini, tayangan dalam media televisi dipengaruhi oleh lingkungan, budaya/adat, dan juga kebutuhan khalayak terhadap media tersebut. Sehingga televisi menyajikan tayangan-tayangan sesuai dengan apa yang diinginkan khalayaknya. Apa yang terjadi di dunia nyata dicoba untuk ditayangkan kembali melalui media televisi, salah satunya adalah program reality show yang saat ini sedang marak di Indonesia. Pada akhirnya, tayangan-tayangan tersebut akan dilihat oleh khalayak dan memberikan pengaruh kembali terutama bagi khalayak yang pasif.

Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2016-2018. Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel "Stratified random sampling" yaitu menetapkan jumlah tertentu untuk setiap strata lalu meneliti siapa saja yang ada sampai jumlah itu terpenuhi (Bungin, 2005 : 115). Sampel yang akan diteliti yaitu 10% (Kriyantono, 2007 : 159)

dari populasi sebanyak 1553 dan penulis membulatkannya menjadi 150 orang.

Untuk mengukur masing-masing indikator peneliti menggunakan pengukuran skala likert yaitu seperangkat kriteria yang diperlukan untuk mengukur suatu indikator yang diteliti dengan menggunakan instrumental peneliti. Dengan Skala *Likert*, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan (Nazir, 2005 : 113). Instrumental yang pada penelitian ini adalah angket. Pada angket ini mahasiswa diharapkan dapat mengisi angket pada pertanyaan yang telah disediakan. Tiap-tiap pertanyaan diberi tiga option atau pilihan jawaban, antara lain Option A diberi bobot nilai 3 (berpengaruh), Option B diberi bobot nilai 2 (kurang berpengaruh) dan Option C diberi bobot nilai 1 (tidak berpengaruh).

Untuk penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis data secara statistik dengan menggunakan program SPSS (Statistic package for Social Sciences) for Windows, yaitu regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One terhadap sikap kesadaran hukum mahasiswa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Dalam pengujian hipotesis ini digunakan uji statistik regresi linear sederhana. Jika terdapat data dari dua variabel riset yang sudah diketahui yang mana variabel X (tayangan Indonesia Lawyer Club) dan yang mana variabel Y (Sikap Kesadaran Hukum mahasiswa) , dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = variabel tidak bebas (Sikap Kesadaran Hukum mahasiswa)

X = variabel bebas (tayangan Indonesia lawyer Club di TV One)

a = nilai *intercept* (konstan) atau harga Y bila X = 0

b = koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.

Nilai b dihitung dengan rumus:

$$n \sum XY - \sum X \sum Y$$

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

nilai a dihitung dengan rumus :

$$\sum X - b \cdot \sum Y$$

$$a = \frac{\sum X - b \cdot \sum Y}{n}$$

Kriteria analisis pengaruh tayangan Indonesia Lawyer Club terhadap Sikap kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dapat diketahui dari hasil koefisien regresi linear sederhana, apabila hasil dari nilai koefisien regresi memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu $\alpha = 0.05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan antara tayangan Indonesia Lawyer Club terhadap Sikap kesadaran hukum mahasiswa dan sebaliknya apabila tingkat signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0.05$ maka tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut.

Pembahasan

Dalam sebuah penelitian kuantitatif responden merupakan hal yang terpenting dalam penelitian. Jumlah dan jenis kelamin memiliki peran dalam penentuan hasil penelitian. Responden dalam penelitian terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di lokasi penelitian. Untuk menentukan besarnya persentase maka penulis menggunakan rumus $P = (\text{Sudjana, 2003 : 40})$

Tabel 1. Kategori Responden

Indikator	F	P
Jenis Kelamin		
a. Laki - laki	67	44,67 %
b. Perempuan	83	55,33 %
	150	100 %
Angkatan		
a. 2016	43	28,67%
b. 2017	46	30,67%
c. 2018	61	40,66%

Sumber : Data Olahan 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 67 atau sebesar 44,67% responden adalah berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 83 orang atau sebesar 55,33% responden adalah berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tabel diatas sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan. Responden dari angkatan tahun 2016 sebanyak 43 orang atau sebesar 28,67%, angkatan tahun 2017 sebanyak 46 orang atau sebesar 30,67 % dan angkatan tahun 2018 sebanyak 61 orang atau sebesar 40,66%.

Tabel 2. Frekuensi mahasiswa menonton ILC

Option	Alternatif Jawaban	F	P
A	Tinggi	60	40,00%
B	Sedang	49	32,67%
C	Rendah	41	27,33%
Jumlah		150	100 %

Sumber : Data Olahan 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa frekuensi mahasiswa menonton tayangan Indonesia Lawyer Club sebanyak 60 orang atau sebesar 40,00% tergolong tinggi dalam menyaksikan Indonesia Lawyer Club, sebanyak 49 orang atau sebesar 32,67% tergolong sedang dalam menyaksikan Indonesia Lawyer Club, Sedangkan sebanyak 41 orang atau sebesar 27,33% frekuensi menonton tayangan Indonesia Lawyer Club. Jika dilihat dari banyaknya

frekuensi menonton tayangan Indonesia Lawyer Club yakni sebanyak 60 Orang atau sebesar 40,00%, menunjukkan ketertarikan responden terhadap tayangan tersebut.

Tabel 3. Mahasiswa Mengerti Pesan/Informasi dalam ILC

Option	Alternatif Jawaban	F	P
A	Mengerti	97	64,67%
B	Kurang Mengerti	29	19,33%
C	Tidak Megerti	24	16,00%
Jumlah		150	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Tayangan *Talk Show* Indonesia Lawyer Club di TV One sangat erat kaitannya dengan pemaknaan dan cara penyampaian isi dari liputan yang akan disaksikan dalam sebuah acara, khalayak dapat menangkap inti pembahasan dalam tayangan tersebut dan mengerti apa sebenarnya maksud yang ingin disampaikan, hal ini dikarenakan isi pesan yang ingin disampaikan digunakan untuk menarik perhatian pemirsa.

Tabel 3 menunjukkan data tentang tanggapan responden mengenai pesan yang terdapat dalam tayangan Indonesia Lawyer Club. Jumlah responden yang memilih mengerti 97 orang atau sebesar 64,67%, sedangkan responden yang memilih kurang mengerti sebanyak 29 orang atau sebanyak 19,33%, dan yang memilih kurang mengerti 24 orang atau sebesar 16,00%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yakni sebanyak 97 orang atau sebesar 64,67% menilai mengerti terhadap pesan yang terdapat dalam tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One.

Tabel 4. Tayangan ILC Dapat Menambah Pengetahuan Mengenai Berbagai Tindakan Pelanggaran Peraturan

Option	Alternatif Jawaban	F	P
A	Bertambah	89	59,33%
B	Kurang Bertambah	37	24,67%
C	Tidak Bertambah	24	16,00%
Jumlah		150	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Tabel 4 di atas menunjukkan data tentang tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One dapat menambah pengetahuan mengenai berbagai tindakan pelanggaran peraturan. Jumlah responden yang memilih pengetahuannya bertambah ada sebanyak 89 orang atau sebesar 59,33%, responden yang memilih kurang bertambah sebanyak 37 orang atau sebesar 24,67% dan responden yang memilih tidak bertambah sebanyak 24 orang atau sebesar 16,00%. Sebagai masyarakat yang taat hukum diperlukan suatu tayangan yang mampu menampilkan berbagai tindakan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sehingga tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One itu sendiri dapat dipakai sebagai referensi untuk media penambah informasi mengenai pelanggaran peraturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yakni sebanyak 89 orang atau sebesar 59,33% memberikan penilaian bertambah pengetahuannya mengenai berbagai tindakan pelanggaran peraturan.

Tabel 5. Pengaruh Tayangan ILC di TV One Terhadap Perasaan Responden

Option	Alternatif Jawaban	F	P
A	Berpengaruh	84	56,00%
B	Kurang Berpengaruh	42	28,00%
C	Tidak Berpengaruh	24	16,00%
Jumlah		150	100 %

Sumber : Data Olahan 2019

Tabel 5 menunjukkan data tentang pengaruh tayangan Indonesia Lawyer Club terhadap perasaan responden. Jumlah responden yang memilih berpengaruh ada sebanyak 84 orang atau sebesar 56,00%, responden yang memilih kurang berpengaruh ada sebanyak 42 orang atau sebesar 28,00%, sedangkan responden yang memilih tidak berpengaruh sebanyak 24 orang atau sebesar 16,00%.

Tabel 6. Hasil Analisis Uji T Statistik

Variabel X	T hitung	T tabel	Signifikansi	A	Keterangan
NSP	2,77	1,97	0,006	0,05	Signifikan

Sumber : Data Olahan 2019

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien regresi pada penelitian ini adalah $Y = 15,48 + 0,19X$ dengan t hitung 2,77 lebih besar dibandingkan dengan t tabel 1,97 dengan tingkat signifikansi 0,006 lebih kecil dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, maka hipotesis yang diterima untuk penelitian ini adalah H_1 dimana terdapat pengaruh antara Tayangan Indonesia lawyer Club terhadap sikap kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Faktor Pengaruh Terhadap Sikap Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Faktor Media

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa cenderung menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan informasi melalui media massa, khususnya media elektronik seperti televisi. Hal tersebut menjadi faktor bagi perubahan sikap dari mahasiswa untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka peroleh dari media tersebut. Media mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan kognisi seseorang. Media memberikan informasi dan pengetahuan yang pada akhirnya dapat membentuk persepsi. Dan penelitian menunjukkan bahwa persepsi mempengaruhi sikap (attitude) dan perilaku seseorang. Mahasiswa sebagai bagian dari kalangan muda dan terpelajar pada umumnya dianggap memiliki akses terhadap media lebih banyak dibandingkan masyarakat biasa. Berbagai studi juga berkesimpulan bahwa secara umum orang berpendidikan lebih banyak menggunakan media, meskipun ada variasi untuk media tertentu. Media elektronik lebih dekat dengan masyarakat kita, tak terkecuali mahasiswa, yang menyebabkan pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan media cetak.

Faktor Pendidikan

Dalam hal ini tingkat pendidikan yang pernah diperoleh oleh mahasiswa (dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi) ternyata mempengaruhi tingkat pengetahuan hukum, tingkat pemahaman hukum, dan sikap terhadap hukum. Implikasi dari hal tersebut, bahwa masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah mempunyai kecenderungan berperilaku

yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum, demikian sebaliknya, masyarakat yang berpendidikan tinggi akan cenderung berperilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa telah menyadari bahwa peraturan itu wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap kesadaran hukum mahasiswa.

Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari. Lingkungan sangat mempengaruhi sikap kesadaran hukum masyarakat. Lingkungan rumah, sekolah maupun kampus juga mempengaruhi responden berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Khususnya di Universitas Andalas, cukup banyak tata tertib yang diberlakukan bagi mahasiswa. Berdasarkan tata tertib tersebut mahasiswa dituntut untuk mentaati segala aturan yang ditetapkan Universitas Andalas sehingga lingkungan kampus sangat berpengaruh terhadap kesadaran hukum mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hampir di setiap sudut Universitas Andalas terdapat spanduk atau famplet yang berisi mengenai peringatan-peringatan pelanggaran, bahkan sering ada pengumuman yang dikumandangkan melalui mikrofon mengenai aturan-aturan tersebut. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa lingkungan Universitas Andalas mempengaruhi sikap kesadaran hukum mahasiswa. Mereka menganggap aturan yang diberlakukan Universitas Andalas wajib untuk ditaati dan dilaksanakan.

Kesimpulan

Setelah menganalisis dan membahas pengaruh tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One Terhadap Sikap kesadaran hukum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis yang diterima untuk penelitian ini adalah H₁ dimana terdapat pengaruh antara tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One Terhadap Sikap kesadaran hukum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One Terhadap Sikap kesadaran hukum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kesadaran mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, yaitu:
 - a. Media mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan kognisi seseorang. Media memberikan informasi dan pengetahuan yang pada akhirnya dapat membentuk persepsi. Dan penelitian menunjukkan bahwa persepsi mempengaruhi sikap (attitude) dan perilaku seseorang. Mahasiswa sebagai bagian dari kalangan muda dan terpelajar pada umumnya dianggap memiliki akses terhadap media lebih banyak dibandingkan masyarakat biasa. Berbagai studi juga berkesimpulan bahwa secara umum orang berpendidikan lebih banyak menggunakan media, meskipun ada variasi untuk media tertentu. Media elektronik lebih dekat

dengan masyarakat kita, tak terkecuali mahasiswa, yang menyebabkan pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan media cetak.

- b. Faktor pendidikan sangat berpengaruh bagi perubahan sikap mahasiswa terhadap kesadaran hukum. Tingkat pendidikan yang pernah diperoleh oleh mahasiswa (dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi) ternyata mempengaruhi tingkat pengetahuan hukum, tingkat pemahaman hukum, dan sikap terhadap hukum. Implikasi dari hal tersebut, bahwa masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah mempunyai kecenderungan berperilaku yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum, demikian sebaliknya, masyarakat yang berpendidikan tinggi akan cenderung berperilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum.
- c. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan sikap kesadaran hukum mahasiswa. Lingkungan merupakan tempat masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari. Lingkungan rumah, sekolah maupun kampus juga mempengaruhi responden berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Khususnya di Universitas Andalas, cukup banyak tata tertib yang diberlakukan bagi mahasiswa. Hal tersebut menuntut mahasiswa untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku di kampus..

Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala. 2005. *Komunikasi massa suatu pengantar*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bungin, H. M. Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta. kencana
- Bungin, H. M. Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian ; Edisi Pertama*. Jakarta. Prenada Media.
- Effendy, Onong Uchjana. 1990. *Ilmu Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Effendy, Onong Uchjana. 1993. *Televisi Siaran, Teori dan Praktek*. Bandung. Alumni
- Effendy, Onong Uchjana. 1998. *Ilmu Komunikasi Suatu Teori dan Praktek*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Dinamika Komunikasi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Mar'at. 2000. *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gadjah Mada University press.
- Nurudin. 2002. *Komunikasi Massa*. Malang. Cespur.

- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rakhmat, Jalaludin. 2005. *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sedaryanti, dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Peneliti*. Bandung. Mandar Maju
- Setia, Hadi. 2003. *Undang-Undang penyiaran*. Jakarta. Harvarindo.
- Sony, Sumarsono. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

KAMPANYE #ENDVIOLENCE DALAM RANGKA KEMITRAAN GLOBAL UNICEF-INDONESIA UNTUK MENDORONG PENGAKHIRAN KEKERASAN TERHADAP ANAK 2016-2017

Nabilla Deviana Lestari^{1*}, Arif Susanto²

¹Program Studi Ilmu Komunikasi London School of Public Relations Jl. K.H. Mas Mansyur
No.kav.35, RT.12/RW.11, Karet Tengsin, Tanah abang, Kota Jakarta Pusat.

²Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi London School of Public Relations-Jakarta

*Email : nabilla.dhevia@gmail.com

ABSTRAK

Isu Kekerasan terhadap anak merupakan isu Internasional yang terjadi di setiap lapisan negara di dunia. Jenis kekerasan terhadap anak pun juga sangat beragam yaitu kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak juga dapat mengganggu system tumbuh dan kembang anak. Sehingga isu ini menjadi konsentrasi pemerintah dunia untuk mencegah serta dapat mengurangi tindakan kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi, sehingga dalam hal tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan suatu kemitraan dengan UNICEF Indonesia. UNICEF Indonesia menginisiasikan suatu program kampanye global #Endviolence untuk mengurangi kekerasan terhadap anak. Kampanye ini penting dilakukan oleh Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, sehingga Indonesia memiliki kewajiban dan konsekuensi yang harus dilakukan oleh Negara serta pemerintah untuk melakukan perlindungan anak di Indonesia. Kampanye ini dilakukan oleh UNICEF dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan, kesadaran serta adanya pola perubahan perilaku terhadap masyarakat di Indonesia dalam mendidik anak.

Kata kunci : Kekerasan Terhadap Anak; Kampanye #Endviolence; Elemen Kampanye Perubahan Sosial

Submisi : 18 Februari 2019

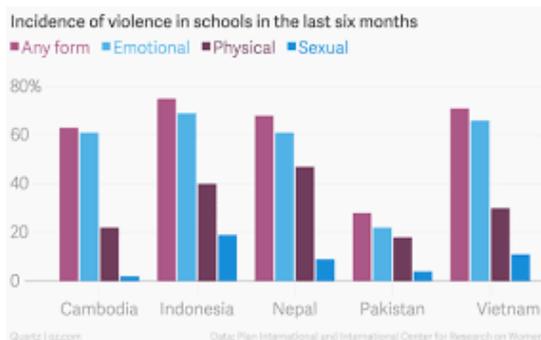
Pendahuluan

Agenda perlindungan terhadap anak perlu untuk didesakkan agar menjadi suatu prioritas bagi segenap pemangku kepentingan; mulai dari orang tua hingga pemerintah. Bagi sebagian pihak, problem kesejahteraan anak belum dipandang sebagai suatu kemendesakan. Sementara, bukan perkara mudah bagi anak-anak

sendiri untuk menyuarakan secara langsung kepentingan mereka.

Di Indonesia, tingkat kekerasan terhadap anak masih terbilang tinggi, meskipun terdapat kecenderungan penurunan. Data Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menunjukkan bahwa sepanjang 2017 terdapat 2.737 kasus kekerasan spesifik dengan 2.848 anak

menjadi korban. Angka ini memang menurun dibandingkan 2016 sebanyak 3.339 kasus, 2015 sebanyak 4.309 kasus, dan 2014 sebanyak 5.066 kasus (Zik, 2017, Desember 29). Namun, skala kekerasan yang begitu besar kiranya mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak, sehingga patut memperoleh perhatian yang serius dari seluruh kalangan.



Gambar 1. Incidence of Violence in Schools (sumber : Walia, 2015).

Menurut laporan global dari UNICEF, adanya data-data yang menggiriskan bahwa 75% anak berusia 2-4 tahun menjadi sasaran kekerasan dengan alasan pendisiplinan oleh orang dewasa. Sementara, sekitar setengah remaja di dunia mengalami kekerasan oleh teman sebaya mereka di lingkungan sekolah. Lebih daripada itu, sebagian remaja menjadi korban kejahatan seksual atau menjadi korban pembunuhan. Seluruhnya merupakan gejala-gejala negatif yang patut mendapat perhatian dunia (UNICEF, diakses pada 10 Desember 2018).

UNICEF mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai bentuk perlakuan yang salahsecarafisikdanatauemosional, penganiayaan, seksual, penelantaran atau eksploitasi secara komersial yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangannya. Deputi Perwakilan UNICEF Indonesia Marc Lucet menjelaskan bahwa banyak tindakan kekerasan terhadap anak yang tidak

dilaporkan dan dapat berdampak buruk pada gangguan mental dan tumbuh kembang anak. Secara umum, kekerasan terhadap anak dapat merusak tatanan masyarakat serta memengaruhi produktivitas, kesejahteraan, dan kemakmuran (UNICEF Indonesia, 2013).

Dalam upaya membantu masalah kemanusiaan dan mengurangi kekerasan terhadap anak serta melindungi hak-hak anak di penjuru dunia, UNICEF memiliki peran untuk melindungi segala bentuk masalah kemanusiaan, khususnya yang terjadi pada anak-anak. Selain itu, UNICEF mendukung bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, formulasi kebijakan serta promosi isu-isu anak untuk membantu jutaan anak di Indonesia (UNICEF Indonesia, diakses pada 20 Oktober 2018).

Sebuah kampanye global #Endviolence yang diinisiasi UNICEF digulirkan pada 20 November 2013, sekaligus untuk memperingati Hari Anak Internasional. Inisiatif ini dapat sekaligus menjadi usaha pencegahan sebagai landasan bagi semua upaya untuk menangani kasus pelanggaran terhadap hak anak. Tujuan kampanye ini adalah dapat menjadikan kesadaran baru tentang dampak kekerasan pada anak terhadap individu dan masyarakat (UNICEF Indonesia, 2013).

Kampanye dalam hal ini dapat dimaknai sebagai satu usaha terorganisasi dalam kerangka upaya perubahan sosial. Kampanye perubahan sosial banyak menasar perilaku masyarakat, yang dengan itu diharapkan tumbuh kesadaran yang akan mengubah tindakan. Selain itu, kampanye yang sehat berupaya untuk mengambil pola dua arah dengan pendekatan persuasif demi meyakinkan publik bahwa perubahan itu perlu sekaligus penting.

Tinjauan terhadap kampanye #Endviolence tersebut dipandang penting

bukan semata karena masih tingginya angka kekerasan terhadap anak. Selain itu, fakta bahwa negativitas tersebut muncul antara lain karena rendahnya kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak anak menunjukkan kemendesakan kampanye yang berhasil guna. Dengan mencakup dua hal tersebut, tinjauan ini diharapkan menghasilkan perspektif lebih luas terhadap aktivitas komunikasi untuk mendorong perubahan sosial dimaksud.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian "bagaimana pelaksanaan kampanye #Endviolence UNICEF-Indonesia untuk mendorong pengakhiran kekerasan terhadap anak?". Selanjutnya, tinjauan ini dimaksudkan untuk mengetahui potret umum kesejahteraan anak di Indonesia dan menganalisis kampanye #Endviolence UNICEF-Indonesia. Selain dapat memberikan kontribusi terhadap kajian tentang kampanye perubahan sosial, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan lebih lanjut strategi kampanye dimaksud.

Tinjauan Pustaka

Kampanye Perubahan Sosial

Kampanye merupakan bagian dari aktivitas komunikasi, dan sebagaimana semua aktivitas komunikasi selalu dan pasti bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. Selain itu, kampanye tidak dapat dibayangkan sebagai komunikasi satu arah melainkan dua arah dan tergantung pada pola komunikasi yang dipilih (Liliweri, 2011, p.699).

Kampanye adalah suatu kegiatan berkomunikasi yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu dan berupaya untuk mempengaruhi khalayak sebagai target sarannya. Konsep kampanye melakukan kegiatan komunikasi secara

terencana yang lebih moderat, terbuka, toleran, dengan waktu terbatas atau jangka pendek, memiliki program yang jelas, persuasif dan dapat diidentifikasi dengan jelas narasumbernya (komunikator), serta selalu berkonotasi pada hal yang positif (Ruslan, 2007, p.22).

Rogers dan Storey (Venus, 2018, p.216) menyebutkan bahwa suksesnya sebuah kampanye dapat ditandai oleh empat hal :

1. Penerapan pendekatan yang bersifat strategis dalam menganalisis khalayak sasaran kampanye, dalam hal ini termasuk analisis pengetahuan khalayak tentang topik dan bagaimana persepsi mereka terhadapnya.
2. Pesan-pesan kampanye dirancang segmentatif sesuai dengan jenis-jenis khalayak yang dihadapi. Segmentasi tersebut dapat berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya dan gagasan.
3. Penetapan tujuan yang realistis.
4. Kampanye lewat media akan lebih mudah meraih keberhasilan bila disertai dengan penyebaran personel kampanye untuk menindaklanjuti interpersonal.

Kampanye perubahan sosial dirancang untuk mengubah perilaku publik, yaitu untuk mengubah sikap masyarakat menjadi lebih baik lagi serta memberikan kesadaran pada masyarakat melalui isi pesan yang dikampanyekan. Kampanye perubahan sosial memiliki elemen-elemen inti yang akan membantu proses berlangsungnya kampanye (Kotler dan Roberto, 1989, pp. 17-18) :

1. *Cause* (alasan/maksud). Suatu tujuan perubahan sosial yang dipercaya oleh agen perubahan akan menjawab permasalahan sosial yang ada sehingga perlu diadakan kampanye perubahan sosial.

2. *Change Agent* (agen perubahan). Yang dimaksud dengan agen perubahan disini adalah individu, organisasi, dan persekutuan yang akan membawa perubahan sosial dalam suatu masyarakat dengan mengadakan kampanye perubahan sosial.
3. *Target Adopters* (sasaran). Yang akan menjadi sasaran dalam kampanye perubahan sosial adalah individu, masyarakat, serta populasi.
4. *Channel* (saluran). Saluran komunikasi dan distribusi yang digunakan dalam melakukan kampanye perubahan sosial akan menjadi tempat terjadinya pertukaran pengaruh serta tanggapan antara agen perubahan dan pemakai sasaran.
5. *Change Strategy* (strategi perubahan). Suatu program dan pengaturan yang diberikan oleh agen perubahan untuk memberikan efek kesadaran dan perubahan perilaku terhadap setiap masyarakat.

Kampanye perubahan sosial akan memberikan nilai-nilai positif serta memberikan kesadaran terhadap masyarakat. Tujuan tersebut juga akan memberikan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masyarakat. Perubahan sosial juga akan membawa dampak pengaruh yang positif dalam memberikan perubahan *cognitive* (pengetahuan), tindakan tingkah laku serta nilai yang ada dalam masyarakat (Kotler dan Roberto, 1989, p.18).

Kekerasan Terhadap Anak

Gelles (Suyanto dan Sanituti, 2002) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan peristiwa pelukaan fisik, mental, dan seksual yang umumnya dilakukan oleh orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang itu semua dapat diindikasikan

dengan kerugian dan ancaman terhadap mental serta kesejahteraan anak. Kasus tindakan kekerasan terhadap anak yang sering terjadi adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik. Termasuk dalam kasus kekerasan terhadap anak adalah pornografi dan penyerangan seksual, pemberian makanan yang tidak layak bagi anak, pengabaian pendidikan dan kesehatan, serta kekerasan yang berkaitan dengan medis.

Selain itu kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai segala bentuk perlakuan yang menyakitkan baik fisik, seksual maupun emosional yang dilakukan orang tua atau orang lain dalam konteks hubungan tanggung jawab. Karena pertumbuhan seorang anak yang optimal akan dipengaruhi oleh peran serta dari orang tua hingga masyarakat di lingkungannya. Anak membutuhkan perlindungan sebaik mungkin dari orang tua, sehingga mereka mendapatkan pertumbuhan yang optimal (Widiastuti dan Sekartini, 2005, p.105).

The Global Partnership Ending Violence Against Children dalam Strategi 2016-2020 (United Nations International Childrens Emergency Fund, diakses pada 13 November 2018) menyatakan bahwa kekerasan dibagi menjadi empat macam bagian, sebagai berikut :

1. *Sexual Violence: Any form of sexual abuse and exploitation including the inducement or coercion of a child to engage in any unlawful or psychologically harmful sexual activity including unwanted comments and advances.*
2. *Physical Violence: Fatal and non-fatal physical violence including all corporal punishment and all other forms of torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.*

3. *Emotional Violence: Psychological maltreatment, mental abuse, verbal abuse and emotional abuse or neglect including all forms of persistent harmful interactions with a child.*
4. *Neglect or Negligent Treatment: The deliberate failure to meet children's physical and psychological needs, protect them from danger or obtain medical, birth registration or other services when those responsible for their care have the means, knowledge and access to services to do so.*

Selain itu, pada tingkat nasional kekerasan terhadap anak secara nasional akan menimbulkan kerugian finansial, IQ beberapa anak tidak mencapai pada titik yang optimal yang berakibat pada penurunan kualitas pendidikan. Kekerasan terhadap anak juga dapat menurunkan tingkat produktivitas dan kesehatan pada anak. Sedangkan bagi masyarakat lokal, kekerasan terhadap anak akan berdampak pada kehidupan sosial yang kurang baik, sehingga masyarakat menjadi tidak siap untuk bersaing. (Suyanto dan Sanituti, 2002, p.8).

Sementara itu ada tiga faktor yang dapat meningkatkan potensi kekerasan terhadap anak (Arna, et al. 2005, p.19):

1. Faktor orang tua atau keluarga, ada beberapa hal yang membuat faktor orang tua menjadi penyebab terjadinya kekerasan yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan orang tua tentang perkembangan dan mendidik anak, hubungan keluarga yang kurang harmonis dan faktor ekonomi.
2. Faktor anak, seperti kesalahan yang tidak di sengaja, melawan orang tua, keterbatasan fisik dan mental, keluar rumah tanpa izin dan melanggar peraturan dalam keluarga.

3. Faktor lingkungan, seperti adanya pengaruh negatif dari media elektronik. Dalam hal ini faktor lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh dan kembang anak.

Kekerasan terhadap anak memberi pengaruh besar terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan anak. Hal ini menuntut kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan kesejahteraan tersebut, sehingga pada akhirnya masyarakat bukan sekadar peduli, melainkan menjadi agen aktif untuk memberikan perlindungan dan untuk memenuhi kesejahteraan anak.

Konseptualisasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Creswell (Raco, 2010, p.7) mendefinisikan metode kualitatif deskriptif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Dalam hal ini untuk mengerti gejala sentral, peneliti mewawancarai partisipan dengan memberikan pertanyaan yang umum. Informasi yang didapat dari partisipan dikumpulkan. Setelah itu, hasil analisis dapat berupa penggambaran atau suatu deskripsi. Selanjutnya dari informasi tersebut, peneliti membuat interpretasi untuk mendapatkan makna tertentu.

Pengumpulan data primer dilakukan lewat wawancara, dengan informan sebagai berikut:

1. Budhy Prabowo, Fungsional Inspektoral umum di Komisi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
2. Retno Adji Prasetya, Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak di Indonesia (KPAI).
3. Zubedy Koteng, *Child Protection Advisor of Save the Children.*

4. Derry Fahrizal Ulum, *National Consultant UNICEF*,
5. Erry Salim, Duta UNICEF Indonesia.
6. Muhammad Ammar Hidayatulloh, Duta Anak 2012-2014.
7. Penny Hutabarat, pengamat dan ahli *social marketing*.

Selain itu, data-data sekunder diperoleh melalui suatu studi kepustakaan. Terhadap data-data tersebut dilakukan triangulasi sumber data agar dapat diperoleh data yang tepercaya. Selanjutnya, data-data yang sama direduksi, dianalisis, dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian dilakukan selama periode Maret hingga Juni 2018 di Jakarta. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada Kampanye #Endviolence 2017, meskipun di Indonesia kampanye ini telah diluncurkan sejak 2013.

Hasil dan Diskusi Penelitian Konvensi Hak Anak (KHA)

Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak perlindungan anak, hak anak berarti Hak Asasi Manusia untuk anak. Pengertian anak secara umum dalam Konvensi Hak Anak adalah anak yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional (Susilowati, et al. 2003, pp.2-3).

Konvensi Hak Anak diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada November 1989 dan berlaku mulai September 1990. Konvensi Hak Anak menjadi salah satu Instrumen Hukum HAM yang telah mendapatkan pengakuan secara universal, dan dalam kurun delapan tahun telah diratifikasi oleh 191 negara. Ada empat prinsip yang terkandung dalam

Konvensi Hak Anak (Susilowati, et al. 2003, p.6) yaitu:

1. Non Diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, prinsip ini merupakan cerminan universalitas HAM.
2. Yang terbaik bagi anak (best interest of the child), artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (survival and development), artinya bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (Respect for the views of the child).

Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak Anak pada tanggal 26 Januari 1990 dan meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990. Konvensi Hak Anak telah diperkenalkan ke seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat, melalui kegiatan di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam bentuk sosialisasi, advokasi, KIE, lokakarya dan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus (Kabupaten Layak Anak, 2017).

Langkah terpenting yang telah dilakukan Indonesia dalam mempercepat pelaksanaan Konvensi Hak Anak dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang melakukan penyusunan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi di bidang urusan wajib perlindungan anak di tingkat nasional. Selain itu juga dibentuk unit kerja yang

menangani urusan teknis terkait dengan hidup, tumbuh dan kembang serta perlindungan anak di setiap Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kabupaten Layak Anak, 2017).

Konvensi Hak Anak menegaskan pentingnya peranan keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan upaya pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, lingkungan keluarga memperoleh perhatian yang khusus dalam Konvensi ini. Keluarga atau keluarga pengganti bertanggung jawab agar kehidupan dan perkembangannya bisa dipenuhi dengan baik, sedangkan negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah agar hak-hak anak untuk memperoleh keluarga atau keluarga pengganti dapat terpenuhi (Eddyono, 2007, p.3).

Peran negara dalam Konvensi Hak Anak adalah berarti pihak yang diberikan mandat dalam mewakili negara untuk menyelenggarakan negara, untuk membuat atau mengubah Undang-Undang dan peraturan-peraturan, untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan administratif serta mengatur kehidupan masyarakat, ini berarti mencakup pihak eksekutif (pemerintah), legislatif dan yudikatif (Eddyono, 2007, p.5).

Kampanye #Endviolence UNICEF-Indonesia 2017

1. Cause

Kampanye #Endviolence UNICEF-Indonesia berangkat dari suatu titik tolak yang jelas tentang keprihatinan terhadap kondisi kesejahteraan anak-anak yang terancam oleh kekerasan. Sementara, anak-anak menjadi rentan terhadap kekerasan pada situasi kurangnya pengetahuan dan kesadaran umum masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan kesejahteraan anak,

termasuk perlindungan mereka dari tindak kekerasan.

Secara umum, faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia yakni: (a) sosio kultural, (b) pengetahuan, dan (c) kesadaran. Isu kekerasan terhadap anak secara umum dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya dan adat istiadat yang membenarkan kekerasan sebagai cara efektif untuk mendidik. Namun, sebenarnya orang dewasa tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Selain itu ada kecenderungan pada anak yang membenarkan bahwa jika bersalah, mereka memang patut mendapatkan hukuman tertentu (Arna, et al. 2005, p.14).

Wawancara 19 Maret 2018 dengan Fungsional Umum Inspektorat KPPPA Budhy Prabowo menunjukkan bahwa tingginya tingkat kekerasan pada anak di Indonesia cenderung disebabkan oleh masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Penanganan anak dianggap sebagai wilayah privat keluarga, sehingga tidak etis jika dicampuri oleh orang lain. Ketika terjadi kekerasan, masyarakat cenderung untuk diam, sehingga hal ini berkontribusi pada meningkatnya angka kekerasan (Wawancara 19 Maret 2018).

Hal ini diperkuat pernyataan *National Consultant* UNICEF Indonesia Derry Fahrizal Ulum bahwa terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman serta kebiasaan masyarakat bahwa kekerasan dapat terjadi dimana saja, namun seringkali kita abaikan karena faktor sosial budaya dan tradisi yang berlaku (Wawancara 12 Maret 2018).

Ketepatan identifikasi penyebab masalah merupakan hal pokok bagi keberhasilan suatu kampanye. Kekeliruan identifikasi dapat berdampak pada kekeliruan penentuan tujuan maupun

pilihan-pilihan strategi. Dalam kasus ini, UNICEF Indonesia memberi perhatian pada problem kognisi menyangkut masih kurangnya pengetahuan sebagian kelompok tentang isu perlindungan dari kekerasan dan pemenuhan kesejahteraan anak. Pada tataran afeksi, keterikatan sebagian orang terhadap isu ini juga kurang kuat karena kecenderungan praktik sosial budaya yang belum mendukung pemenuhan agenda kesejahteraan anak tersebut.

2. Actor

Pelaku kampanye adalah subyek-subyek yang terlibat dalam penyelenggaraan kampanye. Dengan skala kampanye yang luas, pelaku kampanye membutuhkan suatu kerja sama efektif berikut distribusi peran yang memadai. Pelaku kampanye bukan hanya aktif mengidentifikasi masalah melainkan pula datang dengan solusi tepat atas masalah yang dihadapi. Dalam kerangka kampanye #Endviolence kerja sama dilakukan di antara tiga aktor penting: organisasi internasional, pemerintah, dan masyarakat.

Kampanye global #Endviolence telah dimulai UNICEF pada awal 2013, dan dalam kerangka kerjanya di Indonesia, UNICEF Indonesia menjalankan program mereka berdasarkan kesepakatan kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Di antaranya, UNICEF Indonesia menyediakan layanan teknis, pengembangan kapasitas, advokasi, dukungan dalam formulasi kebijakan dan pemajuan hak anak-anak di Indonesia. UNICEF sendiri telah hadir di Indonesia sejak 1948, meskipun kerja sama resmi dengan pemerintah Indonesia baru mulai pada 1950. Prioritas awal UNICEF adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya. Saat ini UNICEF berkarya di 12 kantor

wilayah untuk membantu melaksanakan program di 15 provinsi di Indonesia (UNICEF Indonesia, n.d.).

Pada sisi lain, pemerintah Indonesia, terutama melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan peningkatan komitmen terhadap pemenuhan kesejahteraan anak. Dalam isu kekerasan terhadap anak, Menteri PP dan PA Yohana Yembise menyebutkan “Perlu dibangun mekanisme yang dapat dikelola sendiri oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang perandaa tanggung jawab serta kontribusinya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak” (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016).

Yang ketiga adalah masyarakat, terutama banyak diwakili oleh korporasi Non Governmental Organization (NGO). Kemitraan antara korporasi dan UNICEF menawarkan kerjasama yang berimbang balik; menggabungkan nilai nilai Corporate Social Responsibility, meningkatkan profil perusahaan sekaligus memperluas kinerja UNICEF bagi anak-anak yang paling rentan di Indonesia. UNICEF Indonesia juga menggandeng bekerja sama dengan berbagai NGO, misalnya dengan Youth Network on Violence against Children (YNVAC). Organisasi terakhir ini berusaha untuk mengakhiri berbagai bentuk kekerasan serta kondisi terburuk pada anak melalui partisipasi orang muda.

Keterlibatan ketiga aktor tersebut tidak berdiri sendiri. Dalam implementasinya, kampanye juga turut melibatkan banyak aktor dalam masyarakat, seperti orang tua, guru, figur publik, dan kelompok atau individu lain yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Dengan mengambil pola one to many, tampak bahwa UNICEF Indonesia, Kementerian PPPA,

dan NGO lebih merupakan pusat informasi yang menyebarkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran terkait isu kekerasan terhadap anak.

3. Target Adopters

Kampanye efektif umumnya menasar target audiens tertentu. Dengan target yang jelas dan tegas, lebih mudah bagi pelaku kampanye untuk mengemas pesan, memilih media, dan membuat perencanaan strategi kampanye yang sesuai. Tujuan untuk menggerakkan perubahan sosial dapat didorong sedemikian rupa pada kelompok audiens yang berlainan. Terutama pada *multisteps communication*, pelaku kampanye dapat mengambil pendekatan berbeda untuk audiens dengan karakter berlainan.

Terkait kampanye *#Endviolence*, disampaikan oleh Inspektorat Umum KPPPA Budhy Prabowo bahwa: "UNICEF Indonesia masih belum mampu menentukan target yang ingin disasar. Padahal harusnya kampanye itu membuat orang paham baik pelaku atau korban. Kampanye tersebut masih dilakukan secara umum jadi belum bisa memfokuskan target dengan benar, karena kan kita tahu sendiri kalau Indonesia masih memiliki masalah yang cukup besar terkait hak anak" (Wawancara 19 Maret 2018).

Merujuk pemetaan kekerasan terhadap anak di 18 provinsi (Arna, et al. 2015, p.12), pelaku kekerasan di lingkungan sekitar dapat dikategorikan, sebagai berikut.

1. Di lingkungan keluarga: ayah, ibu, kakak, paman, bibi, kakek, nenek.
2. Di institusi: polisi, petugas tramtrib, sipir, dan tenaga medis.
3. Di sekolah: ibu dan bapak guru, bapak guru olahraga, kepala sekolah dan penjaga sekolah.

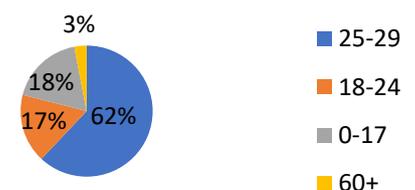
4. Di lingkungan masyarakat dan jalanan: preman, bencong, supir angkutan umum, kernet angkutan umum dan teman laki-laki.

5. Di tempat kerja: majikan atau bos, pekerja yang lebih tua.

Sementara, survei kekerasan terhadap anak yang dilakukan pertama kali pada tahun 2013 menyatakan bahwa "Kekerasan fisik yang dialami oleh anak di Indonesia sebagian besar adalah orang terdekat seperti orang tua dan kerabat lainnya. Sedangkan di masyarakat mayoritas dilakukan oleh guru dan teman sekolah atau di lingkungannya. Temuan survei kekerasan terhadap anak bahwa kekerasan emosi dan fisik pada anak baik laki-laki maupun perempuan didominasi oleh ibu dalam presentase 40-60%" (Survei Kekerasan Terhadap Anak Indonesia, 2013).

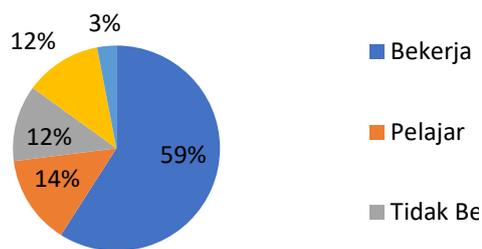
Berikut adalah data pengelompokan sosio demografi pelaku kekerasan dalam karakteristik umur, pelaku kegiatan, status perkawinan dan hubungan dengankorban pada tahun 2016 :

Karakteristik Umur Pelaku Kekerasan



Gambar 2. Karakteristik Umur Pelaku Kekerasan (sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

Kegiatan Pelaku



Gambar 3. Kegiatan Pelaku (sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

Jika hasil survei tersebut dijadikan acuan, kampanye #Endviolence sepatutnya dapat menyorot mereka yang potensial melakukan kekerasan terhadap anak di berbagai latar lingkungan. Pihak lain yang mungkin untuk disasar adalah tokoh masyarakat (*public figure*) yang mungkin sikap dan perilaku mereka menjadi acuan masyarakat. Selain tokoh masyarakat, kampanye dapat pula menyorot para pengambil kebijakan, baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, dengan pengandaian bahwa keberadaan kebijakan yang ramah terhadap hak anak akan menciptakan iklim kondusif bagi pemenuhan kesejahteraan anak.

Penentuan target juga dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik sosio demografi, profil psikologi dan *behavioral*. Akan lebih optimal kiranya jika UNICEF Indonesiamenetapkan sasaran berdasarkan kategori-kategori tersebut, kemudian sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dapat dirancang model pengemasan pesan dan strategi lain dalam kampanye.

4. Channel

Terkait pemanfaatan media, UNICEF Indonesia terutama mengandalkan saluran-saluran konvensional dan media sosial. Dalam berbagai penyelenggaraan event, UNICEF Indonesia menyebarluaskan

pesan-pesan anti-kekerasan terhadap anak melalui *leaflet*, *banner*, poster, spanduk, dan juga baju dengan tulisan senada.

Duta UNICEF Indonesia Ferry Salim dalam wawancara 19 Maret 2018 menyebutkan: “Kampanye ini dipublikasikan melalui berbagai media. Media offline telah memberitakan berbagai berita mengenai peluncuran kampanye #Endviolence ini. UNICEF Indonesia dan mitra pemerintah juga menggunakan saluran media sosial untuk menanyakan kepada masyarakat tentang apa yang mereka pikir harus lakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak melalui U-Report.” (Ferry Salim, wawancara data primer, 19 Maret 2018).

U-Report Indonesia adalah sistem polling berbasis twitter yang menanyakan kepada orang-orang muda tentang topik penting terkait isu anak di Indonesia. Tanggapan tersebut dapat dianalisis oleh UNICEF Indonesia, yang kemudian informasi ini diteruskan kepada pemerintah, mitra pembangunan dan masyarakat sipil (U-Report Indonesia, 2015).

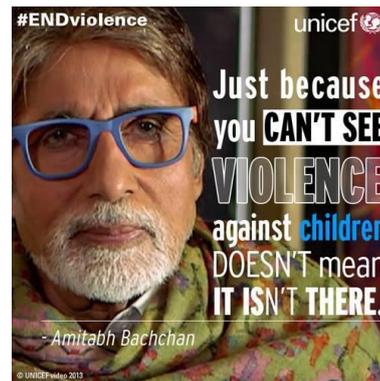
Penelitian We Are Social, perusahaan media asal Inggris, yang bekerja sama dengan Hootsuite menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan tiga jam 23 menit sehari untuk mengakses media sosial. Sedangkan dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, terdapat pengguna aktif media sosial 130 juta dengan penetrasi 49 persen” (Pertiwi, 2018, Maret 1). Data tersebut menunjukkan bahwa media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi penting bagi banyak orang Indonesia. Sehingga tepat jika media sosial dijadikan sebagai bagian *platform* untuk kampanye #Endviolence.

Hanya saja, pilihan media dan pengemasan pesan ini harus disesuaikan

dengan target audiens. Sayangnya, dengan pilihan target audiens yang kurang spesifik, pilihan media pun menjadi kurang memiliki relevansi dalam kerangka strategi komunikasi. Tampaknya, pilihan media ini lebih didasarkan pada penggunaan media secara umum, dan kurang menimbang alasan tertentu dengan pilihan lebih spesifik.

Selain lewat saluran tidak langsung (*mediated*), kampanye juga dilakukan secara langsung (*nonmediated*), yaitu lewat penyelenggaraan event oleh UNICEF Indonesia bersama sejumlah NGO. Bersama penyelenggaraan event, kampanye juga dilakukan melalui saluran media umum seperti spanduk, *banner* dan poster. Budhy Prabowo selaku Inspektoral Umum KPPPA menyebutkan bahwa: “UNICEF Indonesia yang mendanai program kampanye #Endviolence di Indonesia. Selain itu, UNICEF membuat cetakan seperti lifflat, bufflet, spanduk dan poster. Disamping itu, pada saat perayaan hari anak internasional di tahun 2013, UNICEF Indonesia membuat baju yang bertuliskan akhiri kekerasan pada anak yang akan diberi ke masyarakat dan juga anak-anak yang datang pada event tersebut” (Budhy Prabowo, wawancara data primer, 19 Maret 2018).

Melalui event yang diselenggarakan, mereka berharap bahwa ekspose media akan dapat membantu untuk menyebarkan pesan. Dapat dicermati bahwa #Endviolence digunakan secara konsisten dalam kampanye ini. Namun, diperlukan varian pesan untuk setiap kategori audiens; harapannya, audiens tidak hanya tahu tentang apa yang terjadi, melainkan pula tergerak untuk bertindak mengatasi persoalan yang ada.



Gambar 4. UNICEF's Poster (sumber : unicef.tumblr, 2018)



Gambar 5. Family for Every Child #Endviolence Campaign in twitter (sumber : Family for Every Child, 2018)

4. Change Strategy

Kampanye #Endviolence di Indonesia memiliki strategi untuk melakukan perubahan pada masyarakat Indonesia lewat penyampaian pesan secara masif. Kampanye #Endviolence yang diinisiasikan oleh UNICEF digulirkan sejak tahun 2013 hingga saat ini. Pada 2013 saat kampanye ini mulai digulirkan oleh UNICEF Indonesia, sebagian masyarakat belum mengetahui serta memahami Konvensi Hak Anak. Ini merupakan tahap awal strategi perubahan, yakni memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa anak memiliki hak sebagaimana tercantum pada Konvensi Hak Anak.

Derry Fahrizal Ulum selaku National Consultant UNICEF Indonesia menyebutkan bahwa: “langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi

dan program edukasi kepada semua golongan masyarakat mengenai pencegahan kejahatan terhadap anak dan tindakan-tindakan serta hukuman bagi pelaku. Sosialisasi dilakukan secara massif dan berkelanjutan pada berbagai tingkatan” (Derry Fahrizal Ulum, wawancara 12 Maret 2018).

Tahap awal sebuah kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini, sasaran pengaruh yang diharapkan adalah agar muncul kesadaran serta meningkatnya pengetahuan khalayak tentang isu atau gagasan tertentu (Venus, 2018, p.15). Meningkatnya pengetahuan tersebut diharapkan menumbuhkan kesadaran lebih lanjut tentang signifikansi masalah tersebut dan lebih daripada itu adalah kemendesakan aksi untuk mengatasinya.

Setelah melewati siklus awal, pada 2017 pemerintah dan UNICEF Indonesia memantapkan strateginya dengan orientasi agar masyarakat dapat menghentikan tindak kejahatan terhadap anak tersebut. Fakta menunjukkan bahwa tagar #Endviolence telah menjadi trending topik dunia pada 2017 (Solotrust, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dunia telah menaruh perhatian yang cukup besar terkait permasalahan yang dimaksud.

Demi mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak, diperlukan strategi yang holistik dan komprehensif. Terdapat enam strategi yang telah disusun oleh UNICEF terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dalam kemitraan global *Ending Violence Against Children* (Hasanah dan Raharjo, vol 6 no.1, pp.83-84) yakni:

1. *Supporting parents, caregivers and families*: pendekatan ini berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan serta

mengurangi keluarga yang rentan dan memperkuat keterampilan pengasuhan anak

2. *Helping children and adolescents manage risk and challenges*: pendekatan ini memberikan keterampilan terhadap anak untuk mengelola risiko kekerasan sehingga dapat membantu anak untuk mengurangi tindakan kekerasan di sekolah dan masyarakat
3. *Changing attitudes and social norms that encourage violence and discrimination*: Mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap kekerasan adalah bentuk dari disiplin sehingga dapat membedakan antara norma yang sesuai dan norma sosial yang membahayakan bagi anak. Disini terlihat peran dari masyarakat yang turut menjadi agen perubahan.
4. *Promoting and providing support services for children*: Pendekatan ini berupaya menyediakan layanan bagi anak, seperti layanan pengaduan ketika mengalami tindak kekerasan.
5. *Implementing laws and policies that protect children*: Pembuat kebijakan memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak. Pemerintah harus membangun kerangka hukum yang kuat bahwa implementasi dan monitoring perlu dilakukan.
6. *Carrying out data collection and research*: Mengoptimalkan ketersediaan data tentang isu-isu kekerasan anak.

Adanya keberhasilan strategi UNICEF dalam menangani kekerasan terhadap anak dapat dijadikan sebagai sebuah contoh positif bagi pemerintah untuk mengaplikasikannya di Indonesia. Kemudian, hal ini diperkuat oleh pernyataan UNICEF bahwa:

“This report features strategies that have been drawn from UNICEF’s decades of experience, informed by key partners, notably, the World Health Organization⁹ and the United Nations Secretary-General’s Study on Violence against Children. The report highlights case studies from around the globe that illustrate the impact that well-crafted prevention and response strategies can have on reducing the prevalence and impact of violence against children. Many have produced significant results in a relatively short period of time” (UNICEF, 2014).

Di Indonesia, UNICEF mendukung sejumlah program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Dengan memperhatikan bahwa kekerasan berlangsung dari generasi ke generasi, UNICEF bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan sedang mengembangkan modul pelatihan bagi orang tua dan masyarakat untuk mengatasi dampak antar generasi dari kekerasan terhadap anak. Di Papua, UNICEF mendukung program sekolah yang aman, yang mengajarkan para guru untuk mengambil metode baru dalam menanamkan disiplin positif tanpa kekerasan di dalam kelas (UNICEF Indonesia, 2013).

Keterlibatan aktor-aktor sentral tersebut sebenarnya dapat berlangsung lebih ekstensif seandainya mereka memasukkan unsur-unsur masyarakat yang bersentuhan langsung dengan isu perlindungan anak. Anak-anak menjalankan aktivitas mereka di rumah, di sekolah, di tempat-tempat umum, dan sebagainya. Di sini keterlibatan orang tua, guru, pemuka agama, aparatur negara, orang-orang dewasa, serta teman sebaya

menjadi bagian penting keberhasilan kampanye. Sayangnya pelibatan aktor-aktor tersebut dalam kampanye sangat terbatas, sehingga daya dukung masyarakat pun tidak optimal.

Simpulan

Isu kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang belum terpecahkan hingga saat ini di sebagian wilayah negara di dunia termasuk Indonesia. Faktor utama penyebab meningkatnya kasus kekerasan di Indonesia yaitu (a) Sosio Kultural, (b) Pengetahuan, (c) Kesadaran. Dalam hal ini, negara serta pemerintah telah melakukan berbagai upaya serta kebijakan hukum terkait perlindungan anak, akan tetapi upaya tersebut masih kurang untuk menangani isu ini di Indonesia.

Dengan adanya keterbatasan tersebut sehingga mendorong pemerintah dan UNICEF Indonesia untuk melakukan kemitraan yang bertajuk kampanye *#Endviolence*. Tinjauan terhadap kampanye *#Endviolence* tersebut dipandang penting bukan semata karena masih tingginya angka kekerasan terhadap anak. Selain itu, fakta bahwa negativitas tersebut muncul antara lain karena rendahnya kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak anak menunjukkan kemendesakan kampanye yang berhasil guna.

Adanya rekomendasi praktis terkait kampanye yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan terkait dengan penentuan target audiens. Akan lebih baik jika UNICEF Indonesia merujuk pada data Survei Kekerasan Terhadap Anak 2013 sehingga dapat menyasar mereka yang potensial melakukan kekerasan terhadap anak di berbagai latar lingkungan.

Selain itu, penentuan dan pemanfaatan media yang cukup baik

dilakukan oleh UNICEF Indonesia yakni saluran-saluran konvensional dan media sosial. Karena faktanya pilihan media dan pengemasan pesan harus disesuaikan dengan target audiens. Sehingga, dengan pilihan target audiens yang kurang spesifik, pilihan media pun menjadi kurang memiliki relevansi dalam kerangka strategi komunikasi. Karena terlihat bahwa pilihan media tersebut lebih didasarkan pada penggunaan media secara umum, dan kurang menimbang alasan tertentu dengan pilihan yang lebih spesifik. Namun, walaupun adanya kekurangan yang dimiliki, kampanye #Endviolence memiliki kelebihan yakni melaksanakannya secara masif sehingga masyarakat akan mengetahui dan mengambil tindakan terkait pentingnya menghindari perilaku kekerasan terhadap anak. Selain itu, adanya dukungan yang dilakukan dari berbagai NGO, kementerian dan masyarakat yang akan memperkuat keberhasilan kampanye #Endviolence di Indonesia

Sebagai penutup, secara akademis hasil penelitian ini memiliki keterbatasan peneliti yang hanya melakukan penelitian pada tahun 2016-2017, sehingga ruang lingkup pembahasan belum dapat diulas secara menyeluruh dengan fakta bahwa kampanye global ini memiliki ruang lingkup yang begitu besar yang menyebabkan peneliti belum mampu untuk membahas secara keseluruhan terkait dengan kemitraan yang dilakukan oleh UNICEF dan pemerintah melalui kampanye #Endviolence.

Daftar Pustaka

Arna, P.A. et al. (2005) *Kekerasan Terhadap Anak di Mata Anak Indonesia*. Jakarta.

Eddyono, S. W. (2007). *Pengantar Konvensi Hak Anak: Lembaga Studi*

dan Advokat Masyarakat.

Jakarta: ELSAM.

Family for Every Child (n.d.) dari website: <https://twitter.com/familyforeeryc>, diakses pada 11 Desember 2018 pukul 10:27.

Hasanah, U., Raharjo, T.S. *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. Studi Kesejahteraan Sosial*, 2(2), 80-90 dari website <https://media.neliti.com/media/publications/181570-ID-penanganan-kekerasan-anak-berbasis-masya.pdf>

Kabupaten Layak Anak. (2017, Juli 22). *Menteri PPPA Berikan Anugerah Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak 2017*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1453/menteri-pppa-berikan-anugerah-kabupaten-kota-menuju-layak-anak-kla-2017>, diakses pada 11 Desember 2018 pukul 10:38.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2016, Februari 23). *Menteri Yohana : Membangun Kepedulian Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Anak*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/427/menteri-yohana-membangun-kepedulian-masyarakat-dalam-upayaperlindungan-anak>, diakses pada 28 November 2018 pukul 16:00.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017, n.d). *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/u>

- ploads/list/71ad6- buku-ktpa-meneg-pp2017.pdf, diakses pada 23 November 2018 pukul 17:00.
- Kotler, P., & Roberto, E. L. (1989). *Social Marketing: Strategies For Changing Public Behaviour*. New York: The Free Press.
- Liliweri, A. (2011). *Komunikasi Serba Ada Makna*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group.
- Pertiwi, W.K. (2018, Maret 1). *Riset Ungkap Pola Pemakaian Medsos Orang Indonesia*, <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia>, Diakses pada 7 Juni 2018 pukul 16:02.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Ruslan, R. (2007). *Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Solotruster. (2017, November 1). *UNICEF Gandeng BTS Dalam Kampanye Anti Kekerasan Anak dan Remaja*, <http://www.solotruster.com/read/1492/UNICEF-Gandeng-BTS-dalam-Kampanye-Antikekerasan-Anak-dan-Remaja>, diakses pada 5 November 2018 pukul 08:05.
- Survei Kekerasan Terhadap Anak Indonesia. (2013, n.d.), *Survei Kekerasan Terhadap Anak Indonesia (SKTA 2013)* <http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/4fb404d806e55b69e7fa7d4106344914.pdf>, diakses pada 10 November 2018 pukul 13:14.
- Susilowati, et al. (2003). *Pengertian Konvensi Hak Anak : For Every Child Health, Education, Equality, Protection, Advance Humanity*. Jakarta : Harapan Prima.
- Suyanto, B. & Sanituti, S., *Crisis & Child Abuse: Potret Sosial Anak Rawan Di Indonesia Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Airlangga University, Surabaya, Lutfansah Mediatama 2002.
- (UNICEF, n.d.). *#Endviolence Children Should Feel Safe At Home, In School And In Their Communities*, <https://www.unicef.org/End-Violence>, diakses pada 10 Desember pukul 12:09.
- UNICEF Indonesia. (2013, November, 20) Tentang UNICEF Indonesia: *Pada Hari Anak Sedunia, Indonesia luncurkan kampanye Hentikan Kekerasan terhadap Anak (#Endviolence)*, https://www.unicef.org/indonesia/id/media_21861.html, diakses pada 10 Desember 2018 pukul 19:20.
- UNICEF. (2014). *Ending Violence Against Children: Six Strategies for Action, #Endviolence*. New York: Child Protection Section, https://www.unicef.org/publications/files/Ending_Violence_Against_Children_Six_strategies_for_action_EN_9_Oct_2014.pdf, diakses pada 20 November 2018 pukul 18:20.
- UNICEF Indonesia (n.d.). *UNICEF Indonesia: Sekilas Pandang UNICEF Indonesia*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/overview.html>,

- diakses pada 20 Oktober 2018 pukul 18:29.
- UNICEF (n.d.). *Goodwill Ambassador Amitabh Bachchan*, <http://unicef.tumblr.com/post/59695986208/bollywood-film-icon-and-goodwill-ambassador>, diakses pada 5 Oktober 2018 pukul 19:10.
- United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF). (n.d.) *End Violence Against Children: The Global Partnership Strategy 2016- 2020*, diakses pada 13 November 2018 pukul 18:00
- U-Report Indonesia (UNICEF). (2015, Agustus 4). *U-Reporter Angkat Suara Untuk Kekerasan Terhadap Anak*, <https://indonesia.ureport.in/story/121/>, diakses pada 4 Oktober 2018 pukul 18:23.
- Venus, A. (2018). *Manajemen Kampanye: Panduan Teoretis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi Publik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Walia, S. (Maret 2, 2015) *Seven Out of Ten Asian Students Are Victims of Rape, Bullying, or Other Violence*, <https://qz.com/india/350372/seven-out-of-ten-asian-students-are-victims-of-rape-bullying-and-other-violence/>, diakses pada 11 Desember 2018 pukul 17:20.
- Widiastuti, D., & Sekartini, R. (2005). *Deteksi Dini, Faktor Risiko, dan Dampak Perlakuan Salah pada Anak*. Sari Pediatri, 105.
- Zik. (2017, Desember 29). *Darurat Kekerasan Anak*, <https://nasional.sindonews.com/read/1269497/16/daruratkekerasan-anak-1514483971>, diakses pada 1 November 2018 pukul 18:00.

PERILAKU KOMUNIKASI MAHASISWA DALAM MENGAHADAPI INFORMASI HOAX FACEBOOK BERBASIS INDIVIDUAL COMPETENCE FRAMEWORK

Naifah Kurnia¹, Yanti Setianti², Aat Ruchiat Nugraha^{2*}

¹PT. Semut Merah Squad (J&T Express)

²Universitas Padjadjaran

*E-mail: ruchiat@unpad.ac.id

ABSTRAK

Era penggunaan teknologi informasi, menyebabkan posisi media sosial menjadi sangat berarti bagi kehidupan kaum milenial. Salah satunya adalah mahasiswa yang merupakan generasi milenial yang menjadikan media sosial sebagai rujukan dalam mencapai pergaulan di lingkungan masyarakatnya dalam mendapatkan informasi. Yang dimana isi informasi yang diduplikasinya tersebut bisa mengandung nilai-nilai fakta ataupun *hoax*. Adapun inti dari penelitian ini adalah tentang penggunaan media sosial Facebook di kalangan mahasiswa dengan kemampuan literasi media yang berbasiskan pada *Individual Competence Framework* mengenai informasi *hoax*. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data secara survey. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kuesioner dan studi pustaka dengan jumlah populasi penelitian sebanyak 2.252 orang dan responden berjumlah 96 orang melalui teknik sampling proporsional strata random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi media di kalangan mahasiswa secara keseluruhan berdasarkan variabel-variabel *Individual Competence Framework* yang terdiri atas 1) *technical skill* menunjukkan sudah cukup tinggi yang berada pada kategori *advance*; 2) *critical understanding* sudah menunjukkan cukup baik yang berada pada tingkat medium yaitu rata-rata responden sudah bisa memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten *hoax* di media sosial facebook; dan 3) *to communicate* berada pada kategori *basic* yaitu masih rendah dalam membangun relasi sosial serta berpartisipasi dan memproduksi konten di media.

Kata kunci : Facebook; Literasi Media; Informasi Hoax; Mahasiswa

Submisi : 15 Februari 2019

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir media sosial juga menjadi *tools* yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan *hoax*, fitnah, memutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, provokasi, dan hal terlarang lainnya yang dapat menyebabkan disharmoni sosial kemasyarakatan. Sejak tahun 2014, pasca pemilihan presiden, Indonesia dihebohkan

dengan fenomena berita *hoax* yang dapat dengan mudah tersebar melalui berbagai *platform* media sosial yang sudah bukan rahasia lagi bahwa berita palsu alias *hoax* merajalela di ranah digital sekarang ini di era tahun politik (2019). Tersebarnya informasi *hoax* ini melalui jalur situs *online*, media sosial, hingga *chatting* di aplikasi pesan instan. Menurut (Hikmat, 2018) mengenai eksistensi media sosial tidak dapat

dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari karena sudah menjadi bagian kehidupan manusia, baik personal maupun institusi, baik swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu, pentingnya media sosial dalam penyebaran informasi dapat memberikan kebaikan dan keburukan bagi seseorang maupun institusi dalam rangka membangun persepsi dan citra yang baik di khalayaknya yang terintegrasi dengan internet. Adapun keberadaan internet sekarang ini merupakan suatu pendekatan baru untuk mempengaruhi masyarakat (Holtz, 2002).

Menurut Kamus Merriam Webster, *hoax* adalah (1) sebuah perbuatan yang bertujuan mengelabui atau membohongi, dan (2) menjadikan sesuatu sebagai kebenaran umum melalui fabrikasi dan kebohongan yang disengaja. Celakanya, berbagai berita *hoax* disajikan lebih mengedepankan hasutan, kebencian, dan kebohongan publik tanpa merujuk pada data dan realitas sebenarnya. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian keberadaan *hoax* dapat diatasi melalui kehadiran kepercayaan pada masyarakat dengan menyebutkan kembali sumber-sumber informasi yang digunakan (Sihombing & Nuraeni, 2018). Tidak melek terhadap informasi yang dibawa media menimbulkan berbagai permasalahan karena apa yang disampaikan media tidak selalu benar. Sikap kritis terhadap isi pesan media sangat diperlukan untuk mewujudkan “literasi media” pada kalangan masyarakat terlebih kalangan terdidik yaitu Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang hidup di dunia sesak media (*media saturated world*) seperti saat ini. Internet yang saat ini dengan mudahnya diakses melalui ponsel cerdas atau *smartphone* sering kali membuat seseorang menjadi ketagihan sehingga tidak mengenal waktu untuk mengaksesnya.

Beberapa hal yang tidak menyenangkan dari kemudahan mengakses media internet ini yang menjadikan literasi media menjadi suatu hal yang penting untuk dipahami oleh berbagai kalangan. Karena mau tidak mau, mengakses informasi yang harus diedukasi untuk dapat memanfaatkan konten internet dengan baik. Literasi media berarti kemampuan untuk mengakses, menganalisa, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan dalam sebuah variasi yang mendalam dengan tidak hanya mempelajari segi-segi produksi, tetapi juga mampu mempelajari kemungkinan apa saja yang bisa muncul akibat kekuatan media serta dapat memanfaatkan media tersebut secara kritis dan bijak. Melalui pendidikan literasi media diharapkan publik memiliki kesadaran perannya sebagai *stakeholder* yang aktif dan berhak terlibat dalam proses produksi dan distribusi informasi (Achmad Nashrudin P, 2017).

Terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan konten media sosial dan internet, seseorang tidak hanya berada di posisi sebagai konsumen media sosial tetapi juga dapat menjadi sebagai produsennya. Dengan asumsi bahwa internet saat ini dapat dengan mudah diakses melalui ponsel pintar atau *smartphone* pada dasarnya adalah media yang netral, maka manusia sebagai pengguna yang dapat menentukan tujuan media tersebut digunakan dan manfaat yang dapat diambil. Berdasarkan asumsi tersebut, maka pendidikan media dan pemahaman akan penggunaannya menjadi suatu hal yang penting bagi semua orang. Blake menyebutkan bahwa literasi media dibutuhkan pelajar karena (1) hidup di lingkungan bermedia; (2) literasi media menekankan pada pemikiran kritis; (3) menjadi literat terhadap media merupakan bagian dari pembelajaran terhadap warga negara, membuat dapat berperan aktif dalam

lingkungan yang dipenuhi dengan media; dan (5) pendidikan media membantu dalam memahami teknologi komunikasi (Potter, 2013).

Sebagai bagian dari *agent of change*, mahasiswa sering dianggap memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Pengetahuan tersebut didapat dari jalur formal dan informal. Dalam jalur formal mahasiswa mendapatkan pengetahuan dari hasil pengajaran, penelitian maupun diskusi. Sedangkan pengetahuan informal diperoleh melalui informasi yang didapatkan di media massa maupun media sosial. Dengan memiliki kelebihan energi tersebut, yaitu termasuk pada usia produktif sering diaktikan dengan era milenial. Sehingga kelompok mahasiswa termasuk pada usia yang aktif dalam menggunakan internet, sebagaimana dari hasil survey dunia yang dikutip oleh (Zein, 2015) menunjukkan bahwa 77% dari pemuda-pemudi Indonesia usia antara 13-24 tahun memiliki perasaan ingin tersambung dengan internet dimanapun mereka berada. Jumlah ini lebih banyak daripada mereka yang berada di negara maju seperti Amerika Serikat atau Perancis. Selain itu, 69% responden di kelompok usia yang sama juga setuju dengan pernyataan bahwa mereka akan merasa kehilangan jika tidak menggunakan media sosial. Orang Indonesia yang pengguna internet secara aktif, rata-rata menghabiskan waktu di internet lebih dari lima jam per hari, melebihi Australia dan China. Hampir setengah dari waktu mereka digunakan untuk mengakses media sosial dan aplikasi ponsel lainnya.

Berdasarkan data tersebut diatas, maka literasi media menjadi bagian terpenting dalam menanggulangi informasi yang tersebar melalui media massa dan media sosial, lebih khusus informasi yang

berisikan *hoax*. Kondisi seperti ini sesuai dengan pernyataan Gun Gun M.Si selaku Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyatakan bahwa:

“Sekarang ini informasi hoax di Indonesia berkembang secara masif, karena itu Kominfo melakukan upaya-upaya untuk memerangi hoax, agar masyarakat memahami informasi itu. Yang pertama, Sosialisasi meningkatkan kesadaran tentang informasi yang disampaikan; Kedua kegiatan penyuluhan mengenai literasi media, dengan tujuan supaya masyarakat bisa memilih dan memilah dan agar dapat memahami dan memiliki kemampuan mengkritisi konten sehingga akan terhindar dari informasi hoax. Hal ini seiring dengan eranya citizen journalism”

Kemudian beliau mengatakan bahwa pengguna Facebook di Indonesia merupakan ke empat terbesar di dunia. Hal ini benar adanya berdasarkan dari laporan riset *We Are Social* dan *Hootsuite* yang dirilis di LinkedIn, Jumat (21/4/2017) Facebook diklaim kian mendominasi jagat media sosial di dunia. Sampai saat ini, raksasa media sosial milik Mark Zuckerberg itu sudah mengantongi 1.968 miliar pengguna aktif. Sebanyak 89% diantaranya mengakses *via smartphone* dan 61% mengakses Facebook setiap harinya. Setelah dipecah berdasarkan gender, 44% pengguna adalah wanita dan sisanya 56% merupakan pria. Sementara itu, Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho mengutarakan bahwa sebabnya berita *hoax* disebarkan karena mungkin berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tidak dibarengi dengan budaya kritis melihat suatu persoalan yang sedang terjadi. Dan hal

ini bertentangan dengan secara kuantitas Indonesia merupakan termasuk lima besar pengguna *smartphone* dunia, tetapi tingkat literasinya kedua terbawah setelah Botswana di benua Afrika. Kondisi ini juga diperkuat dari hasil riset World's Most Literate Nation yang menunjukkan bahwa dari 61 negara yang dilibatkan dalam studi tersebut, Indonesia menempati urutan ke-60 soal minat baca masyarakatnya.

Individual Competence Framework

European Commission pada tahun 2009 mengeluarkan *framework* sebagai indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat literasi media masyarakat Eropa pada waktu itu. Struktur literasi media yang dikeluarkan oleh European Commission menunjukkan terdapat dua faktor utama yang dapat mempengaruhi kemampuan literasi media seseorang yaitu *Individual Competences* dan *Environmental Factors*, yang masing-masing memiliki sub indikator.

Individual Competences Framework menurut European Commission adalah *framework* yang sering digunakan pada penelitian untuk mengukur kemampuan literasi media suatu kelompok. *Individual competences* merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan media. Beberapa kemampuan menggunakan dan memanfaatkan media diantaranya adalah kemampuan untuk menggunakan, memproduksi, menganalisis, dan mengkomunikasikan pesan melalui media. *Individual competences* memiliki dua variabel, diantaranya adalah pertama, *Personal Competences* yang merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan dan menganalisis konten-konten media internet.

Personal Competences memiliki dua dimensi diantaranya adalah pertama, *Technical Skills*, yaitu kemampuan teknik dalam menggunakan media internet. Dan kedua, *Critical Understanding* yang merupakan kemampuan kognitif dalam menggunakan media internet seperti kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten media internet.

Kedua, *Social Competences*, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan komunikasi dan membangun relasi sosial melalui media internet serta mampu memproduksi konten pada media internet. *Social Competences* terdiri dari *Communicative Abilities*, yakni suatu kemampuan untuk membangun relasi sosial serta berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat melalui media. Selain itu, juga mencakup kemampuan membuat dan memproduksi konten pada media internet.

Didalam *individual competences* ini terdapat 3 kriteria, kemudian untuk mengukur tingkat kemampuan literasi media, ketiga kriteria *individual competences* ini terbagi dalam 3 komponen pula, antara lain: (1) *Use (Technical skills)*, yaitu kemampuan teknik dalam menggunakan media. Artinya, seseorang mampu mengoperasikan media dan memahami semua jenis instruksi yang ada didalamnya. *Use skills* ini mencakup beberapa komponen, yaitu: kemampuan menggunakan komputer dan internet, kemampuan menggunakan media secara aktif, dan kemampuan menggunakan internet secara advance. (2) *Critical Understanding*, yaitu kemampuan kognitif dalam menggunakan media seperti kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten media secara komprehensif. Komponen *critical understanding* ini antara lain: kemampuan memahami konten dan fungsi media,

memiliki pengetahuan tentang media dan regulasinya, dan perilaku pengguna dalam menggunakan media. Dan (3) *Communicative Abilities (Social, participation, creative abilities)* yaitu kemampuan untuk bersosialisasi dan partisipasi melalui media. *Communicative abilities* ini mencakup kemampuan untuk membangun relasi sosial serta berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat melalui media. Selain itu, *communicative abilities* ini juga mencakup kemampuan dalam membuat dan memproduksi konten media. *Communicative abilities* ini mencakup beberapa kriteria, yaitu kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi sosial melalui media, kemampuan berpartisipasi dengan masyarakat melalui media, dan kemampuan untuk memproduksi dan mengkreasi konten media (Celot & Tornero, 2009).

Tingkatan Literasi Media

Kemampuan *media literacy* seseorang berdasarkan European Commission tahun 2009 dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yang diukur berdasarkan indikator diatas. Masing-masing indikator dan sub indikator untuk mengukur tingkatan kemampuan literasi media suatu kelompok memiliki bobot dengan prosentase yang berbeda pula, yaitu terdiri atas: 1) *Basic*, Individu memiliki seperangkat kemampuan yang memungkinkan penggunaan dasar media. Individu dalam tingkatan ini masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan media internet. Pengguna mengetahui fungsi dasar, dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu tanpa arah yang jelas. kapasitas pengguna untuk berpikir secara kritis dalam menganalisis informasi yang diterima masih terbatas. Kemampuan komunikasi melalui media juga terbatas. 2) *Medium*, Individu sudah fasih dalam penggunaan media,

mengetahui fungsi dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, menjalankan operasi yang lebih kompleks. Pengguna media internet dapat berlanjut sesuai kebutuhan. Pengguna mengetahui bagaimana untuk mendapatkan dan menilai informasi yang dia butuhkan, serta menggunakan strategi pencarian informasi tertentu. 3) *Advanced*, Individu pada tingkatan ini sangat aktif dalam penggunaan media, menjadi sadar dan tertarik dalam berbagai regulasi yang mempengaruhi penggunaannya.

Pengguna memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teknik dan bahasa serta dapat menganalisis kemudian mengubah kondisi yang mempengaruhinya. Dapat melakukan hubungan komunikasi dan penciptaan pesan. Di bidang sosial, pengguna mampu mengaktifkan kerjasama kelompok yang memungkinkan dia untuk memecahkan masalah.

Konseptualisasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif dengan metode survey. Metode survey adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Survey adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrument pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu (Kriyantono, 2012). Selanjutnya, menurut (Prasetyo & Jannah, 2005) menjelaskan bahwa penelitian survey merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur/ sistematis yang sama kepada banyak orang, untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis yang disebut dengan istilah kuesioner. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian

survey merupakan penelitian dalam kuantitatif, dimana metode ini menggunakan sistem pertanyaan yang terstruktur atau yang dikenal dengan nama kuesioner yang disebarakan kepada banyak orang yang dianggap mewakili populasi tertentu.

Metode survey sendiri terbagi menjadi dua, yakni metode survey deskriptif dan metode survey eksplanatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode survey deskriptif karena peneliti ingin mengetahui dan menggambarkan mengapa situasi atau kondisi tertentu bisa terjadi. Metode eksplanatif sendiri merupakan metode yang tidak hanya menggambarkan terjadinya fenomena (deskriptif), tetapi mencoba menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi dan apa pengaruhnya (Kriyantono, 2012).

Selain itu metode eksplanatif juga bertujuan untuk menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan dan juga menghasilkan pola sebab akibat. Hasil akhir yang didapat dari penelitian dengan metode eksplanatif ini sendiri adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanasi, yaitu meneliti hubungan antara variabel yang dihipotesiskan. Menurut (Rakhmat, 2012) menyebutkan bahwa metode survey bertujuan untuk meneliti sejauhmana variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi pada faktor lain.

Hasil Penelitian

Penelitian mengenai kemampuan mahasiswa pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dalam menghadapi informasi *hoax* di Facebook berbasis *individual competence framework*, dengan jumlah populasi sebanyak 2.252 orang

terdiri dari angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Berdasarkan perhitungan rumus Yamane, sampel yang dihasilkan adalah sebanyak 96 orang, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan situasi lapangan. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah strata random sampling proporsional, penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada mahasiswa jenjang S1 angkatan 2013 sampai 2016 yang terdiri dari mahasiswa yang berasal program studi Hubungan Masyarakat, Jurnalistik, Manajemen Komunikasi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Informasi & Perpustakaan, dan TV & Film. Adapun data yang diperoleh dari kuesioner selanjutnya diolah melalui *coding sheet (summery sheet)* yaitu lembar ringkasan jawaban responden untuk masing-masing pertanyaan dan *coding book* yaitu lembaran ringkasan dibuat untuk menghimpun semua data dalam suatu ringkasan sehingga memudahkan dalam membuat tabulasi, kemudian setelah data diperoleh mengenai jawaban yang diberikan, penelitian juga didukung dengan wawancara Ahli dari Kominfo terkait literasi media terhadap informasi Hoax dan beberapa responden.

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis kelamin	f	%
1	Laki –laki	47	49 %
2	Perempuan	49	51 %
Total		96	100 %

Pada tabel 1 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden mahasiswa S1 Fikom Unpad adalah Perempuan yang berjumlah 49 orang dengan presentase

sebesar 51% dari keseluruhan jumlah responden, sedangkan laki-laki berjumlah 47 orang dengan presentase sebesar 49% dari keseluruhan jumlah responden. Berdasarkan hasil penelitian diatas mayoritas responden Mahasiswa S1 Fikom Unpad adalah Perempuan, meski perbedaan jumlahnya tidak begitu jauh dengan jumlah responden laki-laki. Hal ini sesuai dengan tingkat trend peminat yang memilih studi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas menunjukkan terus meningkat dari komposisi mahasiswa perempuan sejak awal tahun 2000-an.

Tabel 2. Usia Responden

No	Usia	f	%
1	Usia 23	5	5 %
2	Usia 22	22	23 %
3	Usia 21	16	17 %
4	Usia 20	27	28 %
5	Usia 19	20	21 %
6	Usia 18	6	6 %
Total		96	100 %

Pada tabel 2 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden mahasiswa S1 Fikom Unpad ada pada usia 20 tahun dengan presentase sebesar 28% dari keseluruhan jumlah responden dengan rentang usia 18 sampai 23 tahun. Berdasarkan data dari Badan Statistik Pusat (2018) bahwa usia antara 18-23 tahun merupakan termasuk kategori usia produktif. Hal ini diperkuat dengan ciri-ciri dari usia produktif ialah pekerja keras, energik, bisa berkarya, mandiri, dan memiliki rencana masa depan yang optimis.

Hasil Penelitian

Setelah melihat dan menganalisis data penelitian secara deskriptif, selanjutnya

adalah pengkategorian data penelitian. Pengkategorian data penelitian ini menggambarkan tingkat literasi media pengguna Facebook di kalangan mahasiswa S1 Fikom Unpad dari angkatan 2013 – 2016.

Data yang diperoleh disusun ke dalam bentuk tabel tunggal yang telah dikategorikan oleh penulis dan disajikan dengan menggunakan pendekatan distribusi frekuensi yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kategori dan kemudian dihitung banyaknya pengamatan yang masuk ke dalam tiap kategori serta menggunakan perhitungan presentase.

Untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden pada tiap variabel digunakan analisis deskriptif yang dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu skor uji pada tiap variabelnya. Hasil penelitian ini dibuat kedalam tiga kategori, yaitu basic, medium dan advance. Sesuai dengan kategori tingkat literasi media dari penelitian yang pernah dilakukan European Commission, 2009, yaitu : 1) Basic : Kemampuan dalam mengoperasikan media tidak terlalu tinggi, kemampuan dalam menganalisa konten media tidak terlalu baik dan kemampuan berkomunikasi lewat media terbatas; 2) Medium : kemampuan mengoperasikan media cukup tinggi, kemampuan dalam menganalisa dan mengevaluasi konten media cukup bagus, serta aktif dalam memproduksi konten media berpartisipasi secara sosial. Dan 3) Advanced : kemampuan mengoperasikan media sangat tinggi, memiliki pengetahuan yang tinggi sehingga mampu menganalisa konten media secara mendalam, serta mampu berkomunikasi secara aktif melalui media.

Pengkategorian tersebut dilakukan berdasarkan interval batasan dengan cara berikut ini:

Nilai Minimum = skor minimum untuk skor sub variabel.

Nilai maksimum = skor maksimum untuk skor sub variabel.

Rentang data = Nilai maksimum dikurangi nilai minimum.

Banyak kategori = 3 (*basic, medium, dan advanced*)

Jarak interval = rentang data dibagi banyak kategori

Penentuan kategori:

Basic = Nilai minimum + interval

Medium = nilai kategori Basic + interval

Advanced = Nilai kategori Medium + interval

Untuk memberikan penilaian pada setiap item pertanyaan mengenai pengukuran tingkat literasi media mengunakan individu *competence framework* yaitu menggunakan skala likert. Dari mulai pilihan Sangat Setuju diberi skor 5, kemudian Setuju 4, Ragu-ragu 3, Tidak setuju 2 dan Sangat tidak setuju 1.

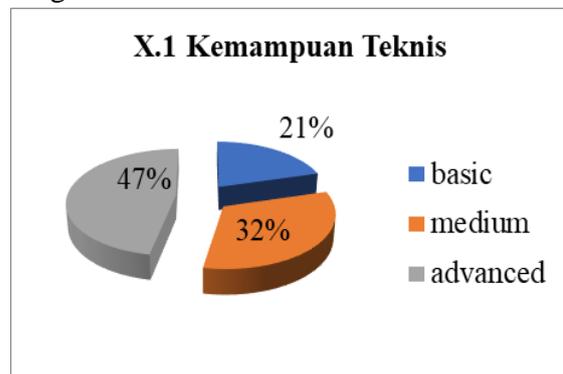
Kemampuan Teknis

Sebagai kesimpulan atas sub variabel kemampuan teknis, berikut disajikan pengkategorian variabel kemampuan teknis basic, medium, advanced.

Tabel 3 Pengkategorian Variabel

Minimum	4
Maximum	20
Rentang	16
Jarak Interval	5,3
Kategori	Interval
Basic	4 – 9
Medium	10 – 14
Advance	15 – 20

Setelah dicari batas intervalnya untuk masing-masing kategori kemampuan teknis, maka selanjutnya skor jawaban untuk semua responden dikelompokkan berdasarkan kategori *basic, medium, dan advanced*. Hasilnya disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 1. Kategori Kemampuan Teknis

Diagram diatas menunjukkan bahwa sub variabel kemampuan teknis. Dari tabel diketahui ternyata 47% responden memiliki kemampuan teknis pada kategori Advanced dan 32% responden memiliki kemampuan teknis medium, diikuti dengan 21% berada pada kemampuan basic. Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan teknis responden atau dalam Individual Competences Framework disebut Use (Technical Skills) adalah kemampuan teknik dalam menggunakan media. Artinya seseorang mampu mengoperasikan media dan memahami semua jenis instruksi yang ada didalamnya. Berdasarkan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa responden memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam mengoperasikan media, namun sebagian besar responden memang masih termasuk kedalam kategori medium dan basic dalam sub variabel ini. Kemampuan teknis ini terkait dengan kejelasan dan keakuratan informasi yang didapatkan oleh mahasiswa mengenai sajian informasi yang terdapat dalam facebook (Rokhimah, 2018).

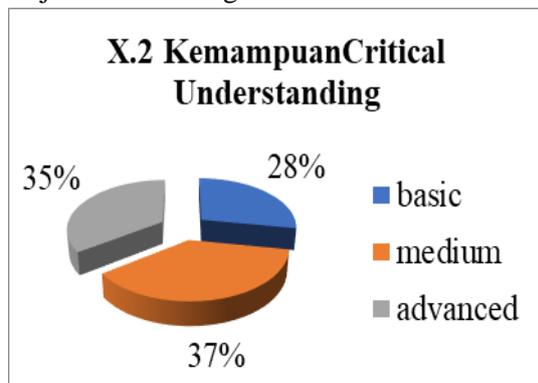
Kemampuan Kognitif

Sebagai kesimpulan atas sub variabel kemampuan kognitif, berikut disajikan pengkategorian variabel kemampuan teknis *basic, medium, advanced*.

Tabel 4 Pengkategorian Variabel Kemampuan Critical Understanding

Minimum	10
Maximum	50
Rentang	40
Jarak Interval	13,3
Kategori	Interval
Basic	10 - 23
Medium	24 - 37
Advance	38 - 50

Setelah dicari batas intervalnya untuk masing-masing kategori kemampuan Kognitif, maka selanjutnya skor jawaban untuk semua responden dikelompokkan berdasarkan kategori *basic, medium, dan advanced*. Hasilnya disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 2. Kategori Critical Understanding

Gambar 2. diatas menunjukkan bahwa sub variabel kemampuan kognitif, dari tabel diketahui ternyata 37% responden memiliki kemampuan kognitif pada kategori *Medium* dan 35% responden memiliki kemampuan teknis *advanced*, diikuti dengan 28% berada pada kemampuan *basic*.

Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan kognitif responden atau dalam

Individual Competences Framework disebut *Critical Undersatnding (Cognitive Competeces)* adalah kemampuan kognitif dalam menggunakan media seperti kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten media, terutama terkait dengan informasi *Hoax* di facebook. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa responden memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten media. Kondisi ini ditunjang dari hasil penelitian dari (NK, RW, & SK, 2012) yang menunjukkan bahwa penggunaan berbagai media untuk memperoleh informasi memperlihatkan bahwa tingkat literasi kaum muda dalam pemahaman tentang suatu peristiwa cukup kritis dan tinggi.

Kemampuan Kognitif

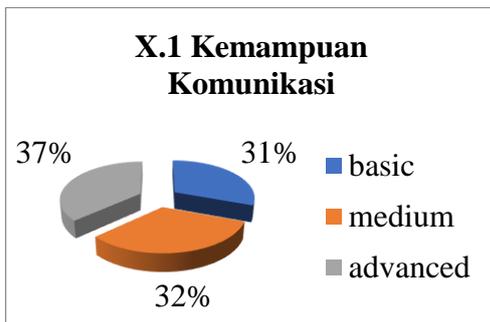
Sebagai kesimpulan atas sub variabel kemampuan komunikasi, berikut disajikan pengkategorian variabel kemampuan teknis *basic, medium, advanced*.

Tabel 5 Pengkategorian Variabel Kemampuan Komunikasi

Minimum	4
Maximum	20
Rentang	16
Jarak Interval	5,3
Kategori	Interval
Basic	4 - 9
Medium	10 - 14
Advance	15 - 20

Setelah dicari batas intervalnya untuk masing-masing kategori kemampuan komunikasi, maka selanjutnya skor jawaban untuk semua responden dikelompokkan

berdasarkan kategori *basic*, *medium*, dan *advanced*. Hasilnya disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3. Kategori Kemampuan Komunikasi

Gambar 3. diatas menunjukkan bahwa sub variabel kemampuan komunikasi, dari tabel diketahui ternyata 37% responden memiliki kemampuan komunikasi pada kategori *Advanced* dan 32% responden memiliki kemampuan teknis *medium*, diikuti dengan 31% berada pada kemampuan *basic*. Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan komunikasi responden atau dalam *Individual Competences Framework* disebut *Communicative Abilities (social, participation, creative abilities)* adalah kemampuan komunikasi mencakup kemampuan untuk membangun relasi sosial serta berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat melalui media. Selain itu, *communicative abilities* ini juga mencakup kemampuan dalam membuat dan memproduksi konten media. Sementara masyarakat memanfaatkan media sebagai alat untuk memperoleh hiburan belaka (Ishaq, 2013).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa responden memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam memahami, dalam membangun relasi sosial serta berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat melalui media.

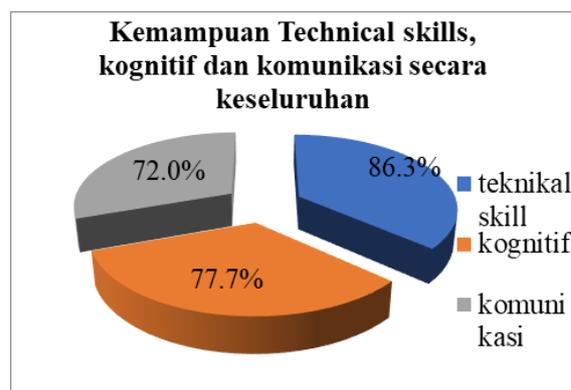
Kemampuan Kognitif

Sebagai kesimpulan atas semua sub variabel, berikut disajikan pengkategorian variabel kemampuan teknis *basic*, *medium*, *advanced*.

Tabel 6 Pengkategorian Variabel Kemampuan Komunikasi

Minimum	18
Maximum	90
Rentang	72
Jarak Interval	24
Kategori	Interval
Basic	18 - 42
Medium	43 - 66
Advance	67 - 90

Setelah dicari batas intervalnya untuk semua, maka selanjutnya skor jawaban untuk semua responden dikelompokkan berdasarkan kategori *basic*, *medium*, dan *advanced*. Hasilnya disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 4. Kemampuan *Technical Skills*, Kognitif dan Komunikasi secara Keseluruhan

Dapat disimpulkan dari gambar 4. diatas yang menunjukkan bahwa sub variabel *technical skills*, berada pada kemampuan *advance* dimana terdapat 86% dari responden memiliki kemampuan ini, sedangkan untuk kemampuan kognitif berada pada tingkat medium yaitu 77% dari responden. Dan yang terakhir adalah tingkat untuk kemampuan komunikasi berada pada kategori *basic* yaitu hanya 72.0% dari responden. Menurut (Mahanani, 2014) bahwa interaksi mahasiswa dengan media sosial dapat menjelaskan mengenai hubungan dan keterlibatan yang mendalam antara pengguna dengan media sosial yang dimanfaatkannya

tersebut, termasuk mengenai isi informasi facebook.

Kemampuan Kognitif

Sesuai dengan salah satu teori literasi media yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu *framework* dari European Commission tahun 2009, yang mengukur kemampuan literasi media terhadap informasi *hoax* di facebook, konsep literasi media tersebut menekankan kepada kemampuan personal setiap individu dalam menyikap persebaran informasi yang masuk dari berbagai media yang ada. Kompetensi individu tersebut terbagi menjadi 2 yaitu *personal competences* yang terdiri dari kemampuan teknis dan kemampuan pemahaman kritis, dan *social competences* yang terdiri dari kemampuan berkomunikasi dan berpartisipasi secara sosial dalam masyarakat (European Commission, 2009).

Dengan hasil temuan bahwa faktor kemampuan teknis yang memiliki faktor yang paling dominan pada penelitian ini, menunjukkan bahwa hasil temuan data berbanding terbalik dengan konsep literasi media pada umumnya. Konsep literasi media tidak hanya menekankan pada kemampuan teknis individu dalam menggunakan media (dalam penelitian ini internet) namun menuntut pemahaman kritis, kemampuan mengevaluasi dan membuat pesan tiap individu agar dapat dikatakan *literate* (Livingstone, 2006).

Hal serupa didukung oleh European Commission 2009 dalam *report*-nya yang menjelaskan mengenai konsep literasi media yang “tidak hanya menyiratkan perluasan namun juga penguatan terhadap fungsi elemen yang didefinisikan oleh semua literasi. Literasi media bukan semata-mata sebagai sebuah kemampuan teknis yang simpel, namun juga termasuk di dalamnya sebuah kemampuan pemahaman kritis dan kemampuan menganalisis secara

simultan terhadap berbagai sumber informasi, penalaran, kode simbolik dan kode sosial dan konvensi” (Celot & Tornero, 2009).

Dalam penelitian ini, kemampuan teknis yang ditemukan sebagai faktor yang paling dominan dalam menghadapi informasi *hoax* di *facebook* berbasis *individual competence framework* oleh mahasiswa fikom unpad dalam terdiri dari 3 kompetensi yaitu kemampuan menggunakan *smartphone* dan internet, kemampuan menggunakan media secara aktif dan kemampuan menggunakan internet secara *advance*. Hasil temuan data pada faktor kemampuan teknis ini jika mengabaikan uji analisis yang telah dilakukan adalah berada pada tingkat medium (menengah).

Secara lebih detail, kemampuan menggunakan *smartphone* dan internet responden sudah cukup baik dengan mampu menggunakan *smartphone* dan internet sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemampuan menggunakan media secara aktif tergolong sangat baik dengan mampu mengakses internet secara seimbang dan teratur diimbangi dengan akses terhadap media diluar internet seperti surat kabar, buku dan bioskop / cinema. Jika dihubungkan dengan *critical understanding*, responden tergolong pada tingkatan *advanced* (mahir) dalam kemampuan pemahaman kritis terhadap media.

Responden sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan pengaruh media internet mengenai informasi yang disebarkan terhadap audiens sehingga responden memiliki kecenderungan untuk mengecek kembali informasi yang beredar sesuai dengan kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan oleh individu tersebut. Sesuai dengan konsep teori efek media yaitu teori *uses and gratification* yang memiliki asumsi bahwa pengguna media memiliki kebebasan untuk memutuskan bagaimana (lewat media mana) mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya (Nurudin 2007).

Namun pengetahuan responden mengenai regulasi akan berbagai konten yang berbeda-

beda di media tergolong menengah, pengetahuan responden mengenai regulasi terhadap konten di media dan berbagai jenis hak cipta di media masih pada tahapan sedang. Pengetahuan mengenai regulasi konten media dan berbagai jenis hak cipta berguna untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan baik media sebagai distributor maupun individu sebagai produsen (pembuat konten) dalam media internet.

Untuk faktor kemampuan membangun komunikasi dan partisipasi sosial di dalam masyarakat, responden masih berada pada tingkat sedang. Kompetensi ini terdiri dari kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi sosial melalui media, kemampuan berpartisipasi dengan masyarakat melalui media dan kemampuan untuk memproduksi dan mengkreasi konten media. Dilihat dari ketiga faktor kompetensi individu yang ada, kemampuan mahasiswa fikom unpad dalam menghadapi informasi *hoax* di *facebook* berbasis *individual competence framework*.

Simpulan

Kemampuan teknis memperlihatkan bahwa kemampuan teknis responden atau dalam *Individual Competences Framework* disebut *Use (Technical Skills)* adalah kemampuan teknik dalam menggunakan media. Artinya seseorang mampu mengoperasikan media dan memahami semua jenis instruksi yang ada didalamnya, jadi dapat disimpulkan bahwa responden memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam mengoperasikan media, namun sebagian besar responden memang masih termasuk kedalam kategori *medium* dan *basic* dalam sub variabel ini.

Kemampuan kognitif, memperlihatkan bahwa kemampuan kognitif responden atau dalam *Individual Competences Framework* disebut *Critical Understanding (Cognitive Competences)* adalah kemampuan kognitif dalam menggunakan media seperti kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten media, terutama terkait dengan informasi *Hoax* di *facebook*, jadi dapat disimpulkan bahwa responden memiliki kemampuan yang cukup

tinggi dalam memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten media.

Kemampuan komunikasi, memperlihatkan bahwa kemampuan komunikasi responden atau dalam *Individual Competences Framework* disebut *Communicative Abilities (social, participation, creative abilities)* adalah kemampuan komunikasi mencakup kemampuan untuk membangun relasi sosial serta berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat melalui media. Selain itu, *communicative abilities* ini juga mencakup kemampuan dalam membuat dan memproduksi konten media, jadi dapat disimpulkan bahwa responden memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam memahami, dalam membangun relasi sosial serta berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat melalui media.

secara keseluruhan berdasarkan tingkat *technical skills*, *critical understanding* dan *communicative abilities* secara simultan (bersama-sama) berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan mahasiswa fikom unpad dalam menghadapi informasi *hoax* di *facebook* berbasis *individual competence framework*.

Daftar Pustaka

- Achmad Nashrudin P. (2017). Konstruksi realitas Radar Banten pada pemberitaan pilkada Banten 2017. *Journal of Communication (Nyimak)*, 1(1), 49–77.
- Celot, P., & Tornero, J. manuel P. (2009). *Study on assessment criteria for media literacy levels. European Association for Viewers' Interests*. Brussels.
- Hikmat, M. M. (2018). Strategi pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan citra positif DPRD dalam persepsi rakyat daerah. *Jurnal Common*, 2(1), 35–56.
- Holtz, S. (2002). *Public relations on the net* (Second). New York: Amacom.
- Ishaq, R. El. (2013). Dakwah di Tengah Industrialisasi Media. *Jurnal Komunikasi Islam*, 03(01), 137–151.
- Kriyantono, R. (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada

Media.

- Mahanani, P. A. R. (2014). Media Sosial dan Gaya Komunikasi. *Jurnal Komunikator*, 6(1), 59–69.
- NK, J. E., RW, R. R., & SK, C. D. (2012). Literasi Kaum Muda tentang Good Governance Melalui Isu Korupsi di Televisi. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 9(1), 56–69.
- Potter, J. W. (2013). *Media literacy* (6th ed.). California: Sage Publication, Inc.
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Rakhmat, J. (2012). *Metode penelitian komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Rokhimah, A. (2018). Studi pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa FMIPA Untad angkatan 2016 melalui laman Ankuntad.com. *Jurnal Online Kinesik*, 5(3), 16–32.
- Sihombing, T. E. C., & Nuraeni, R. (2018). Peran siaran radio sebagai media pemenuhan kebutuhan informasi bagi orangtua untuk anak. *Jurnal Dialetika*, 5(1), 1–11.
- Zein, L. (2015). Penggunaan internet di Indonesia. Retrieved March 10, 2017, from <http://fortunepr.com>

KOMUNIKASI DALAM KEPEMIMPINAN TRADISIONAL MASYARAKAT KAILI

Nuraedah

Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Palu Sulawesi Tengah

E-mail: nuraedaha@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui komunikasi dalam kepemimpinan tradisional masyarakat Kaili di Palu. Metode yang digunakan adalah Pencarian sumber penelitian ini sebenarnya sudah cukup lama dilakukan, bahkan sebelum tema penelitian ini diwacanakan. Oleh karena itu, hal ini sangat membantu dalam penelusuran bukti-bukti sejarah yang ada. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode sejarah dengan langkah-langkah dalam melaksanakan sebuah penelitian sejak dari persiapan hingga selesai penyusunan hasil akhir. Data yang didapatkan kemudian direduksi, diseleksi dan diverifikasi untuk maksud memenuhi kebutuhan sumber guna menjawab persoalan penelitian ini. Akan tetapi, ketika diadakan verifikasi dan reduksi, serta seleksi atas data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, komunikasi merupakan faktor terpenting dalam pengesahan keputusan magau di tanah Kaili, kedua, perlu dukungan komunikasi dalam menentukan setiap langkah jalannya kegiatan dewan hadat, ketiga, kegagalan komunikasi dapat terjadi karena kesalahan pemahaman dan kurang pedulinya elit-elit lokal untuk mengusung ketokohan.

Kata Kunci : Komunikasi; Kepemimpinan; Kaili

Submisi : 21 Maret 2019

Pendahuluan

Kepemimpinan Tradisional di Indonesia: Mempawah dan Kaili adalah sebuah ungkapan yang menarik bahwa ada dua lembaga yang melahirkan pemimpin yakni *Libu Ntodea dan Libu Nu Maradika* (Natsir & Haliadi, 2015: 268-269). Ungkapan ini menandakan bila kepemimpinan tradisional di Tanah Kaili hanya berasal dari dua lembaga itu, artinya selain kedua lembaga itu tidak ada kemungkinan hadirnya seorang pemimpin atau konsep kepemimpinan lain. Ahmad Adaby Darban juga mengungkapkan bahwa konsep kepemimpinan suatu pemerintahan memandang raja selain sebagai kepala negara juga keturunan dewa. (Darban, 1998).

Padahal jika diamati lebih dalam mengenai kebudayaan, khususnya kearifan lokal masyarakat Kaili, dapat ditemukan ungkapan-ungkapan yang menjelaskan kepemimpinan dalam masyarakat Kaili di Palu. Berdasarkan cara pandang ini, maka kepemimpinan tradisional masyarakat Kaili bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para elite (politik) dan para bangsawan semata, melainkan kepemimpinan juga dapat dimiliki oleh orang-orang biasa. Oleh karena itu, para pemikir dari aliran *postcolonial* berpendapat bahwa dalam hal kekuasaan, semua orang berhak atas kekuasaan tersebut. Ini dapat diartikan bahwa orang kecil sekalipun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi

seorang pemimpin, sebab kepemimpinan adalah sesuatu yang azali dari setiap manusia di muka bumi. Tidak ada pengecualian, apapun alasannya (Budianta, 1998; Said, 2006).

Dewan raja dan juga dewan eksekutif selalu dipersepsikan sebagai pemilik tunggal kekuasaan atau kepemimpinan dalam satu wilayah tertentu. Namun ketika menelisik cerita-cerita rakyat di Palu, maka akan ditemukan sebuah kenyataan bahwa kepemimpinan tidaklah dominan menjadi milik kelompok elite dan para bangsawan. Sekurang-kurangnya ada tiga model kepemimpinan yang ada dalam masyarakat Kaili di Palu. Pertama, kepemimpinan yang bersumber dari asal-usul dan kekerabatan seseorang. Kepemimpinan model ini biasanya diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Pewarisan seperti ini sangat lazim dalam masyarakat Kaili di Palu. (Abdullah, 1976). Kedua, kepemimpinan yang berasal dari pemberian elite penguasa. Namun itu tidak berlaku kepada anak turunannya. Akan tetapi, si penerima gelar tersebut selalu berusaha agar anak-anaknya tetap mendapatkan kedudukan seperti itu. (Sumiman Udu, *Di Bawah Bayang-Bayang Ode*). Ketiga, kepemimpinan yang berasal dari cerita rakyat-cerita rakyat dalam masyarakat. Nilai-nilai kepemimpinan yang tertuang dalam setiap cerita menjelaskan kenyataan lain bahwa kepemimpinan yang dipahami oleh banyak orang selama ini merupakan model kepemimpinan politis, karenanya perlu direvisi kembali. Orang kecil pun mempunyai jiwa seorang pemimpin. Pola yang ditempuh dalam mewariskan kepemimpinan adalah melalui komunikasi. Kepemimpinan tipe pertama, kedua dan ketiga sangat diperlukan komunikasi. Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang tertuang dalam pendahuluan

penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk menelusuri komunikasi dalam kepemimpinan tradisional masyarakat Kaili di Palu.

Kepemimpinan Tradisional

Membicarakan kepemimpinan dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat Kaili di Palu harus dilihat dalam beberapa segi kehidupan. Sebabnya adalah bahwa kepemimpinan tidak hanya dilihat dari sisi figur dan asal-usul keturunannya saja, namun ada sisi lain yang perlu disampaikan lagi, yakni gaya kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Menurut Hans Antlov dan Sven Cederroth, (2001:7) bahwa gaya kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada keadaan setempat terus berkembang selama puluhan tahun. Kepemimpinan lokal diperkuat oleh pemberontakan, mobilisasi partai politik dan persaingan ideologis yang memerlukan pemimpin kuat dan dapat dipercaya. Para pemimpin biasanya memposisikan diri sebagai seorang pelindung (patron) yang kuat, memberikan bantuan, dan melindungi kliennya dengan imbalan dukungan dan kepatuhan.

Gaya kepemimpinan pada hakikatnya menjadi hal yang pertama kali diperhatikan oleh seorang peneliti maupun masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan seseorang sangat ditentukan oleh adanya rasa tanggung jawab dalam dirinya. Lagi-lagi mengutip Hans Antlov dan Sven Cederroth, (2001: 7): Tipe tanggung jawab kepemimpinan dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Pemimpin yang berorientasi moral dengan rasa tanggung jawab kemasyarakatan yang tinggi. Pemimpin yang demikian itu merasa sangat risau karena mereka adalah hasil pilihan, dan mereka dibentengi oleh ekspos publik, dan mendapat berkah moralitas. (2)

Pemimpin dengan orientasi ke atas dan keluar. Pemangku jabatan seperti itu ditetapkan dengan mandat resmi, dibebani dengan tugas-tugas administratif dan tertarik karena akses terhadap sumber daya negara.

Seorang pemimpin yang bertanggung jawab merupakan pemimpin yang akan selalu dikenang oleh masyarakatnya. Tidak banyak pemimpin yang seperti itu di era kini, bahkan di masa lalu pun masih cukup jarang. Kehadiran pemimpin yang seperti itu diyakini karena dia membentuk karakter dirinya melalui pembacaan terhadap peristiwa di masa lalu. Pembacaan terhadap fenomena di masa lalulah yang menyebabkan seorang pemimpin merasa memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk mewakili masyarakat dan melindungi masyarakat yang dipimpinnya dari pengaruh luar. Dengan posisi demikian itu mereka dianggap sebagai perantara di antara negara dan masyarakat di satu sisi. Dengan demikian mereka berusaha untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan berusaha mendapatkan persetujuan rakyat sebelum melaksanakan program pembangunan pemerintah.

Ketika menengok lebih jauh ke dalam masyarakat lama, maka dapat dikatakan bahwa kepemimpinan berakar pada struktur sosial yang tersusun berdasarkan kelahiran, kekayaan dan status. Oleh karena itu, kepemimpinan formal selalu menjadi milik seorang raja, serta para bangsawan dan golongan aristokrasi lainnya. Secara umum di Sulawesi Tengah demikian adanya, sehingga mereka berusaha untuk bekerja sama dengan pihak kolonial Belanda. Hampir semua raja hidup dan bergerak bersama simbol-simbol kebesaran mereka. Golongan ini lazim disebut sebagai kelas memerintah atau elite politik. Sebagai

pemegang kekuasaan, elite ini mencakup formasi sosial yang merupakan asal-mula kepemimpinan itu. Pengaturan lembaga untuk keputusan-keputusan politik menunjukkan suatu hierarki di mana ketentuan politik ada di tangan golongan aristokrasi itu. Elite ini memegang pemerintahan, administrasi dan memimpin perang.

Kepemimpinan tradisional biasanya masih dipertahankan hingga kini. Oleh karena posisinya yang pernah masyhur dan kemudian hilang dan berganti dengan sebuah model pemerintahan otoriter pada masa Pemerintahan presiden Soeharto, maka kepemimpinan tradisional kini dianggap sebagai sebuah kearifan lokal saja. Namun demikian, kearifan lokal ini ternyata memiliki beberapa keunggulan dan keutamaan, seperti yang dimaksudkan oleh Ulfah Fajarini (2014: 123-124), bahwa "Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. "Masyarakat (Kaili) dewasa ini memahami kearifan lokalnya sebagai sebuah karakter dasar manusia yang apabila terus dipertahankan akan memberikan keuntungan tersendiri dalam kehidupan mereka.

Kepemimpinan tradisional kini telah dianggap sebagai sebuah kearifan lokal, karena mengingat pengalaman hidup masyarakat Kaili yang sedemikian unik dan penuh peristiwa sejarah. Ada dua masa yang memberikan pengalaman historis kepada masyarakat Kaili untuk tetap eksisi hingga di masa kini, yaitu masa kekuasaan Belanda atau sebelumnya dan masa kemerdekaan khususnya saat penghancuran kekuasaan feodal masa pemerintahan Presiden

Soekarno. Ketika masa pemerintahan Presiden Soeharto, model pemerintahan otoriter menjadikan kearifan lokal seperti nilai-nilai kepemimpinan tradisional hilang. Kini mulai diingat kembali dan coba dilestarikan lagi. Oleh karena itu, pengalaman historis seperti di masa lalu kemudian dijadikan sebagai langkah maju untuk menjelaskan keinginan masyarakat Kaili di masa kini. Sehingga yang muncul kemudian adalah proses sejarah. Proses sejarah sebenarnya menjelaskan bahwa dalam proses sejarah itu terdapat (1) dinamika masyarakat yang menunjukkan pergerakan dari tingkat perkembangan terdahulu hingga yang mutakhir. (2) ada juga perubahan sosial, dari yang sederhana menjadi yang kompleks. (3) Sebagai sebuah studi sejarah, setiap perubahan memiliki pola-pola, struktur dan tendensi dalam perubahan itu.

Lebih lanjut, Ulfah Fajarini menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah hasil dari pengalaman suatu masyarakat dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Ada nilai-nilai di dalamnya, dan nilai-nilai tersebut melekat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. Ungkapan Ulfah Fajarini di atas telah memberi gambaran yang cukup istimewa bahwa secara konseptual, kearifan lokal mempunyai beberapa aspek yang harus dilihat lebih jauh yaitu aspek pengalaman masyarakat yang terlihat melalui rekaman-rekaman memori mereka sendiri. Aspek lainnya adalah nilai-nilai kearifan tersebut yang masih melekat pada masyarakat tersebut. Bila berbicara nilai, maka ada tiga hal yang perlu diketahui yakni baik – buruk, benar – salah dan indah – tidak indah. Aspek terakhir yang perlu diketahui lebih jauh, yaitu aspek sejarah masyarakat.

Pengetahuan terhadap sejarah masyarakat menjadi dasar yang kuat bagi terciptanya kearifan lokal oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Oleh para ilmuwan sosial, ketiga aspek di atas biasanya disebut potensi sosial dan kebudayaan masyarakat. Profesor Ade Saptono (2010) menyatakan bahwa “jauh sebelum negeri ini berdiri, telah lahir kebiasaan yang tidak saja mengatur hubungan antara orang perorangan, orang dengan kelompok, dan antarkelompok, tetapi juga antara orang dan kelompok itu sendiri di satu pihak dengan sumber alam sekitar di pihak lain.” Dengan demikian, aspek sejarah dan pengalaman masyarakat menjadi sangat penting posisinya dalam memahami kearifan lokal yang ada di suatu tempat. Apalagi didukung dengan adanya interaksi masyarakat dengan segala macam bentuk sumber daya alam di sekitar tempat tinggalnya.

Kembali ke persoalan awal, kearifan lokal masyarakat Kaili tentang kepemimpinan tradisional di era modern kini. Untuk itu, studi ini juga membahas dengan melihat kearifan lokal yang ada dalam masyarakat tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ulfah Fajarini bahwa kearifan lokal masyarakat Kaili antara lain Kitorang bersaudara (persaudaraan); Toraranga (saling mengingatkan), Rasa Risi Roso Nosimpotobe (sehati, sealur pikir, setopangan, sesongsongan). Akan tetapi, tidak hanya seperti itu sebenarnya ungkapan-ungkapan arif dari masyarakat Kaili. Masyarakat ini begitu kompleks kehidupannya.

Sejarah lokal harus dijadikan sebagai satu unit analisis atau satu unit kajian sejarah. Menurut Taufik Abdullah (1985) bahwa sejarah lokal dapat dibedakan dalam empat kategori yaitu: (1) Studi yang memfokuskan pada suatu peristiwa tertentu (studi peristiwa khusus atau apa yang

disebut *evenementiel l'e*, (2) Studi yang lebih menekankan pada struktur. (3) Studi yang mengambil perkembangan aspek tertentu dalam kurun waktu tertentu (studi tematis). (4) Studi sejarah umum, yang menguraikan perkembangan daerah tertentu (propinsi, kota, kabupaten), dari masa kemasa". Taufik Abdullah (1985: 28), Keempat corak tersebut tidaklah terlalu eksklusif, sebab suatu corak mengandung unsur-unsur corak lain. Untuk penelitian ini pada hakekatnya lebih pada corak keempat dan didukung oleh corak lainnya.

Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi pengetahuan atau perilaku seseorang. Dalam komunikasi juga terdapat unsur-unsur, diantaranya: sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, umpan balik, lingkungan. (Ammaria, 2017). Komunikasi efektif jika maksud pengirim pesan dimaknai sama oleh penerima pesan.

Komunikasi yang sering terjadi dalam kepemimpinan tradisional juga terlihat pada komunikasi keluarga. Ayah dan ibu sebagai orang tua adalah tempat untuk mengungkapkan perasaan emosional. Dalam keluarga melalui mereka semua anggota keluarga saling menyayangi, sehingga muncul nuansa tanggung jawab untuk mewujudkan keluarga bertanggungjawab, dan senantiasa berbagi pengalaman bersama untuk mewujudkan kebahagiaan bersama.

Lewat keluarga kita berbagi kebahagiaan, menciptakan kebahagiaan seperti dikutip (Ratnasari, 2007) bahwa: Untuk memperoleh kebahagiaan tersebut, antara lain bergantung pada keharmonisan komunikasi antara anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak.

Pada kepemimpinan tradisional, kepemimpinan dalam keluarga masuk dalam pola tradisional. Komunikasi tidak serta merta dapat diterima oleh orang lain, karena komunikasi memiliki tantangan luar biasa untuk bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar.

Menurut Ema Khotimah (2000), tantangan terbesar dalam komunikasi adalah mengerti pikiran, latar belakang dan proses berpikir pendengar anda. Bila anda tahu ini, anda dapat mencegah banyak gangguan komunikasi. Lebih jauh menurut Dornan, Jim, (Khotimah, 2000) ada cerita tentang "Suatu perang terjadi antara sebuah kerajaan dengan penjajah karena perkara "sepele". Ketika berkunjung ke kerajaan itu, komandan bule mencium tangan sang permaisuri sebagai tanda penghormatan, Raja marah, menganggap pemimpin kolonial itu kurang ajar.

Ema Khotimah (2000) pula mengungkapkan dalam tulisannya tersebut, kegagalan beradaptasi dengan budaya lain, yang baru dimasukinya dapat berakibat buruk. Dalam dimensi komunikasi, kegagalan tersebut dapat dirumuskan sebagai ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain.

Menurut Hafied Cangara (2012), bahwa: Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Lasswell bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan "siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya".

Metode Penelitian

Pencarian sumber penelitian ini sebenarnya sudah cukup lama dilakukan, bahkan sebelum tema penelitian ini diwacanakan. Oleh karena itu, hal ini sangat membantu dalam penelusuran data. Menurut

Kuntowijoyo (2013) bahwa dalam studi sejarah, ada tiga kategori sumber yaitu sumber menurut jenisnya, sumber menurut bentuknya dan sumber macamnya. Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi yang didapatkan dari buku-buku, selain itu, jurnal-jurnal ilmiah yang memuat topik yang sedang dibahas. Penelusuran data juga dilakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jurnal online juga digunakan guna mencari sumber-sumber lain, khususnya yang berkaitan dengan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Majalah dan koran nasional pun ditelusuri guna mencari informasi lain yang mungkin lebih memberi gambaran detail mengenai kondisi Palu di masa lalu.

Data yang didapatkan kemudian direduksi, diseleksi dan diverifikasi untuk maksud memenuhi kebutuhan sumber guna menjawab persoalan penelitian ini. Akan tetapi, ketika diadakan verifikasi dan reduksi, serta seleksi atas data yang ada, maka terdapat kekurangan di beberapa bagian. Kekurangan sumber tertulis juga ditemui dalam penelitian ini, sehingga perlu dilakukan wawancara kepada beberapa informan yang diperkirakan mengetahui lebih jelas mengenai persoalan yang dibahas dalam penelitian ini. Penggunaan wawancara ini didasarkan pada pernyataan Bambang Purwanto (2013) beliau menyatakan bahwa ketika sejarah lisan diposisikan sebagai langkah-langkah sistematis yang dioperasionalkan dalam pengumpulan data untuk melengkapi atau mengisi kebutuhan akan data, karena ketiadaan sumber-sumber tertulis. Maka, tradisi lisan diposisikan sebagai representasi dari kenyataan yang ada dalam masa lalu pendukungnya, yang pada proses pengumpulannya memerlukan metode lisan. Lebih jauh, dalam buku yang lain, Bambang

Purwanto (2013) menyatakan bahwa: "Melalui kerja sejarah lisan, wawancara yang dilakukan mampu mendokumentasi aspek-aspek tertentu dari pengalaman sejarah yang cenderung hilang dalam sumber lainnya, seperti hubungan personal di dalam rumah tangga atau kehidupan keluarga dan persepsi subyektif seseorang atau kelompok terhadap sebuah pengalaman historis. Para penutur tidak hanya menceritakan kembali masa lalu, tetapi juga membuat penilaian atau interpretasi sendiri terhadap masa lalu.

Setelah itu, kerja metodologis selanjutnya yang mengelompokkan data berdasarkan kebutuhan, sebagaimana istilah yang dikemukakan oleh Jones (2009) bahwa: ada dua sebab yang biasa ditemukan oleh banyak orang yaitu sebab yang diperlukan, dan sebab yang mencukupi. (1) Sebab yang diperlukan yakni pernyataan mengenai satu kondisi atau faktor (variabel) yang harus ada untuk kondisi atau factor yang kedua supaya ada (atau berubah dengan cara tertentu). (2) Sebab yang mencukupi, yakni pernyataan mengenai sebab yang cukup menegaskan bahwa kalau suatu variabel atau faktor tertentu berubah karena kehadirannya atau karena perubahan dalam variabel kedua. Kedua kondisi itu harus dipahami oleh peneliti agar mampu menyampaikan fakta dengan baik. Sebab tidak semua data itu dibutuhkan atau berstatus sama sebagai yang utama dalam setiap subtopik studi ini.

Saat melakukan kritik terhadap sumber dengan cara memadukannya antara sumber satu dengan sumber yang lainnya, peneliti dengan mudah merumuskan sebuah fakta sosial berkaitan dengan topik yang sedang dikaji ini. Peneliti kemudian menginterpretasi fakta-fakta tersebut, dengan tidak melupakan kondisi sosial di lokasi penelitian. Namun satu hal yang tidak

pernah dilupakan adalah konsep kepemimpinan tradisional masyarakat Kaili, karena hal ini sangat sentral posisinya dalam penelitian ini. Dengan cara itulah, maka peneliti dapat menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dikaitkan atau harus memeriksa secara terus menerus kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

Melalui interpretasi dapat dipetik makna dari fakta yang telah disusun sebagai sebuah kesimpulan. Interpretasi yang dimaksudkan disini yaitu bukan hanya sekedar sintesa dari fakta yang satu dengan fakta yang lain, melainkan dipertajam dengan analisa mendalam atas fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisa kondisional dan situasional, serta sebab akibat. Sartono Kartodirdjo (2016) menyatakan bahwa “Penggambaran kita mengenai peristiwa sangat bergantung pada pendekatan, ialah dari segi mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan. Unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya. Hasil pelukisan akan sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai.

Pembahasan

Banyak sudah tulisan mengenai orang Kaili dengan pola kepemimpinannya, namun yang masih kurang adalah kepemimpinan bila dikaitkan dengan komunikasi. Sebelum masyarakat mengenal kekuasaan magau, mereka telah mengenal dua tipe kepemimpinan yaitu *tomalanggai* dan *tomanuru*, bahkan ada juga *to baraka*. (Kutoyo dkk, 2005).

Ketiganya hadir silih berganti dan membentuk peradaban Kaili di Lembah Palu, salah satunya adalah Palu sekarang ini. Setiap tipe (*tomalanggai*, *tomanuru* dan *tobaraka*) memiliki keunggulan dan kekurangan, sehingga dapat digantikan oleh

tipe yang lain. Pada masa *tomalanggai*, seorang penguasa adalah mereka yang terkuat dan gagah berani. Kehidupan masih ditentukan oleh keberanian dan kemampuan fisik dalam berperang. Oleh karena itu, *tomalanggai* adalah manusia pilihan di antara mereka yang telah terpilih. Sementara *tomanuru* hadir sebagai pengganti *tomalanggai*, meletakkan sebuah dasar baru, di mana perempuan dapat diangkat menjadi pemimpin. Ini kemudian menjadi tradisi dalam masyarakat Kaili, tidak hanya di Palu. Kehidupan masyarakat Kaili tampaknya mulai berubah, dari kehidupan agraris ke dunia maritim melalui perdagangan. (Ricklefs, 2008).

Dunia maritim ini kemudian mengundang para pedagang dan juga muballiq untuk datang ke Palu. Selain berdagang, para pedagang itu pun berdakwah. Begitu juga dengan para muballiq, mereka datang dengan cara berdagang, lantas kemudian menjadi penyiar Islam yang gigih. Mereka juga menyebarkan islam dengan pola komunikasi dengan menggunakan pola budaya yang berbeda-beda yang mereka kombinasikan. Misalkan, adat dan simbol-simbol keagamaan mereka selipkan dalam kegiatan budaya. Selain itu mempergunakan atribut adat dalam mengokohkan kemapanan kekuasaan magau, dengan menggunakan pakaian tradisional dalam pelantikan raja, dengan mempergunakan motif bomba menggunakan kain sutra yang ditenun secara tradisional hingga menjadi batik, kain tradisional ini memiliki makna filosofis. Dalam Tulisan Nuraedah, et al (2018), terkait makna filosofis mempergunakan motif bomba tersebut juga diungkapkan bahwa: *The Bomba textile is one of the textile fabrics in Indonesia used in a province called Sulawesi Tengah. Bomba Textile has a unique pattern and has a*

philosophical meaning in human life in Sulawesi Tengah. Dengan demikian perlu dipahami bahwa aspek yang mempengaruhi efektif atau tidaknya komunikasi, yakni proses menyampaikan pesan yang dapat diterima terkait pelantikan raja atau magau. Pelantikan raja di Tanah Kaili merupakan sebuah upacara yang sangat sakral. Kesakralannya terletak pada moment, kebutuhan, media yang digunakan dalam hal ini pakaian adat dan kelengkapan lainnya dan bermakna filosofis, pengistimewaan keturunan para raja tersebut. Hal ini didukung dari kemampuan menyampaikan pesan dari orang tua adat, lembaga adat, dan para pembesar kerajaan ketika prosesi pelantikan magau berlangsung.

Posisi seorang *magau* menegaskan bahwa magau tidak berposisi sebagai pengambil keputusan tunggal, artinya setiap orang yang menduduki jabatan-jabatan memiliki tugas dan kewenangan sendiri berdasarkan jabatannya tersebut. Seorang magau hanya mengetahui keputusan apa yang diambil oleh bawahannya sekaligus memberikan penguatan terhadap putusan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari cara pengambilan keputusan adat yang dilakukan oleh Dewan Hadat *Pitunggota* yang tidak pernah dicampuri oleh seorang *magau*. Jadi dalam pengambilan keputusan adat, maka dewan hadat hanya berkomunikasi dengan magau ketika penetapan akhir sebagai penguatan atas keputusan dewan hadat. Dia hanya mendengarkan penyampaian keputusan tersebut dan apabila dalam keputusan itu ada yang menurutnya keliru, maka ia akan memngkomunikasikan dengan seorang *kali* (*Qadhi*). Nasehat *kali* selalu dijadikan pertimbangan pokok dalam pengesahan keputusan tersebut. Begitu dalam urusan pemerintahan yang dijalankan *madika matua*, seorang *magau* hanya berperan sebagai pemberi perintah dan

pengesah rencana kerja *madika matua* dan bawahannya. Ini menandakan bila cara kerja di sebuah *kagaua* memiliki keterhubungan dan keterkaitan yang erat antara dewan hadat dan dewan pemerintahan, namun di antara mereka tidak punya wewenang untuk saling menghentikan atau merubah keputusan tanpa meminta persetujuan *magau*.

Dari uraian di atas, maka disini yang ditemukan adalah cara memaknai pesan dari dewan hadat ke magau hingga magau berkomunikasi terlebih dahulu dengan Qadhi jika ada yang dianggap perlu dikomunikasikan sebelum keputusan akhir diambil dalam bentuk pengesahan, kedua, masalah gaya komunikasi yang nampak antara dewan hadat dan magau pasti terjalin dengan alotnya, hingga kemudian magau memerlukan pertimbangan dari Qadhi sebelum mengesahkan keputusan. Gaya inilah yang menjadi penciri seseorang individu yang akan menjadi pemimpin tradisional, sebuah gaya yang dapat diterima oleh semua komponen, baik bangsawan maupun rakyat. Hal ini dapat dipahami dari pendapat Hafied Cangara (2012: 21), yang dikutip dari Harold D. Lasswell bahwa: cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya”. Dengan demikian komunikasi akan diterima dengan baik oleh penerima pesan jika dilihat dari aspek, penyampai, pesannya apa?, melalui saluran apa, ditujukan untuk siapa dan sejauhmana pengaruh pesan itu, karena komunikasi disampaikan oleh tokoh-tokoh penting dalam masyarakat maka komunikasi dengan mudahnya diterima oleh penerima pesan.

Hal yang terkadang membuat komunikasi gagal dalam sebuah fase

tradisional adalah pemahaman dan keinginan elit-elit lokal untuk mengungkap ketokohan “magau” berdasar sepak terjang, kemampuan, kewibawaan calon pemimpin yang belum sampai dikomunikasikan dengan baik karena setiap elit memiliki “jago” masing-masing. Selain itu biasa juga karena kurangnya kepedulian elit-elit lokal dalam mengungkap tokoh atau figur seseorang. Hal ini hampir sama dengan kutipan berikut: “Kalaupun terjadi, yang terpenting adalah “Tidak ada yang paling buruk kecuali ketidakpedulian, dan tidak ada yang paling baik selain dihargainya perbedaan pendapat” (Kuswarno, 2017),

Kepemimpinan tidak hanya dilihat dari sisi politik semata, melainkan juga dapat dilihat dari sisi yang lain, yakni sisi sosial dan budaya dimana peran penting elit yang mampu dan bersikap peduli terhadap semua perbedaan di antara mereka. Berdasarkan hal ini, kepemimpinan masyarakat Kaili menjadi menarik untuk ditelusuri lebih jauh lagi. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa konsep yang telah ada selama ini. Ada istilah *tonda talusi*, ada cerita *randantovea*, ada juga lagu-lagu berbahasa Kaili yang mengisyaratkan karakter kepemimpinan di dalamnya. Hasil-hasil kebudayaan seperti itu menarik untuk dilihat sebagai sumber yang tidak pernah lekang dalam ingatan, bahkan pada saat tertentu ia menjadi sebuah ajaran. Persoalan seperti itu tidak pernah disadari oleh masyarakat Kaili dewasa ini. Pesan-pesan penting dari konsepsi itu sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dengan perspektif atau pendekatan sejarah (Kartodirdjo, 2016).

Dengan mengacu pada konsep yang kemukakan oleh Peter Burke mengenai kebudayaan yang mengarah pada soal studi tentang perubahan yang menyangkut transmisi atau yang lebih dikenal dengan istilah tradisi dan reproduksi budaya. Tradisi

tidak selalu bertahan selamanya, karena tradisi begitu lentur terhadap perubahan sosial dan mungkin juga politik. Sementara itu, reproduksi budaya dipahami sebagai tindakan atau cara masyarakat menghadirkan kebudayaan sebagai sarana untuk melakukan perubahan. (Peter Burke, 2011: 188).

Perubahan ini sangat ditentukan oleh adanya agen-agen perubahan itu sendiri. Giddens menyebutkan bahwa agen bisa melakukan perubahan terhadap struktur ketika mengalami dinamisasi (*agency*). Melalui kreativitas agen, yang ditopang oleh kekuatan (*power*) dan kemampuan (*capability*), serta melewati proses interaksi yang terus-menerus dan dimungkinkan oleh struktur, agen bisa merombak struktur dan menciptakan kembali struktur dalam bentuk baru (*reproduksi*) (Anthony Giddens, 2007: 162).

Dengan demikian, Kepemimpinan tradisional Kaili tidak boleh hanya dilihat pada sisi politisnya, yakni hanya dengan menyebutkan kedudukan dan fungsi pemimpin itu sendiri, tetapi yang terpenting juga adalah menghadirkan masyarakat dalam cerita sejarah itu sendiri.

Cara berpikir seperti di atas tadi, pada dasarnya hendak menegaskan bahwa penelitian mengenai kepemimpinan dalam masyarakat Kaili perlu dilakukan. Pasalnya, kearifan lokal masyarakat sebagaimana tertuang dalam puisi, cerita rakyat dan juga ungkapan-ungkapan berbahasa Kaili masih ada sampai sekarang. Artinya masih tetap bertahan di tengah modernisasi dan globalisasi. Ada hal menarik pada konteks ini, kearifan lokal inilah yang dipakai untuk melihat lebih jauh dua persoalan menarik yang berkaitan dengan kepemimpinan, yakni reproduksi kebudayaan dan pelanggaran tradisi yang pada akhirnya menciptakan kearifan lokal baru di zaman

yang serba modern ini. Bila demikian, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mencari tahu hakikat sebenarnya kearifan lokal masyarakat Kaili di Palu yang berubah seiring dengan munculnya modernisasi dengan menggiring komunikasi sebagai hal yang penting. Pelanggungan tradisi dan reproduksi kebudayaan yang sedang atau telah dilakoni masyarakat Kaili di Palu memberi gambaran bahwa keadaan yang sejatinya adalah (budaya) politik elite penguasa dapat juga dilihat dari sudut pandang sosial budaya serta komunikasi masyarakat. Sebab dalam beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan, masyarakat kecil terkadang lebih jujur dan apa adanya dari pada para penguasa. Oleh karena itu, penelitian ini hendak melihat aspek historis masyarakat Kaili di Palu perlu dijadikan dasar pijak yang utama.

Kesimpulan

Hal yang perlu disimpulkan bahwa: pertama, komunikasi merupakan faktor terpenting dalam pengesahan keputusan magau di tanah Kaili, kedua, perlu dukungan komunikasi dalam menentukan setiap langkah jalannya kegiatan dewan hadat, ketiga, kegagalan komunikasi dapat terjadi karena kesalahan pemahaman dan kurang pedulinya elit-elit lokal untuk mengusung ketokohan.

Daftar Pustaka

- Ade Saptono, 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: Grasindo.
- Anthony Giddens, 2007. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Maiden, Polity Press.

- Bambang Purwanto, 2013. “*Belajar Dari Afrika: Tradisi Lisan Sebagai Sejarah Dan Upaya Membangun Historiografi Bagi Mereka yang Terabaikan*”, dalam Jan Vansina, *Tradisi Lisan Sebagai Sejarah*, Yogyakarta: Ombak.
- Hafied Cangara. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hans Antlov dan Sven Cederroth (Peny.), 2001. *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo, 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- M. C. Ricklefs, 2008. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- M. Djaruddin Abdullah, 1976. *Adat Kaili Dalam Lembaran*. Palu: Tanpa Penerbit.
- M. Natsir dan Haliadi, 2015. *Kepemimpinan Tradisional di Indonesia: Mempawah dan Kaili*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Melani Budianta, “Oposisi Biner Dalam Wacana Kritik Postkolonial. Makalah dibentangkan pada Kolokium Mempersoalkan Pascakolonialisme oleh Balai Seminar Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur 8-10 Desember 1998 (Catatan : Kertas Kerja ini merupakan buram yang belum disunting), Arsip: Haliadi-Sadi tidak diterbitkan.
- Peter Burke, 2011. *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- PIP Jones, 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme hingga*

- Post-modernisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sartono Kartodirdjo, 2016. *Pendekatam Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* Yogyakarta: Ombak.
- Sumiman Udu, *Di Bawah Bayang-Bayang Ode*
- Sutrisno Kutoyo dkk, 2005. *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*. Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah.
- Taufik Abdullah, 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ahmad Adaby Darban, “Bangsawan Jawa Dalam Struktur Birokrasi Majapahit”, *Humaniora* No. 9, November-Desember 1998, hlm. 97.
- Anne Ratnasari, Komunikasi Harmonis Orang Tua dengan Anak. (*Jurnal Mediator*: vol. 8 No. 2, 2007, ISSN: 1411-5883 | EISSN: 2581-0758, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/index>).
- Ema Khotimah, Vol. 1, No.1, 2000, ISSN: 1411-5883 | EISSN: 2581-0758, (<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/680>).
- Engkus Kuswarno Efektivitas Komunikasi Organisasi, *Jurnal Komunikasi (mediator)*. (ISSN: 1411-5883 | EISSN: 2581-0758, Volume 10, No.1 (June 2017)).
- Hanix Ammaria, *Jurnal Peurawi*: Vol. 1, No. 1, 2017). (ISSN 2598-6023 E-ISSN 2598-6031).
- Nuraedah, Muhammad Bakri, Anita Ahmad Kasim, Quadratic Support Vector Machine For The Bomba Traditional Textile Motif Classification. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*. <http://www.iaescore.com/journals/index.php/IJEECS/article/view/11749/9143>, Vol. 11, No. 3, September 2018, pp. 1004~1014.
- Ulfah Fajarini: Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter”, *Sosio Didaktika*: Vol. 1, No. 2 Des 2014, pp. 123-124.

WONDER WOMAN ERA GENERASI Z (RESEPSI GENERASI Z PADA REPRESENTASI KARAKTER WONDER WOMAN DALAM FILM WONDER WOMAN TAHUN 2017)

Patrisia Amanda Pascarina

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media, Universitas Ciputra Surabaya

E-mail : patrisia.amanda@ciputra.ac.id

ABSTRAK

Sosok Wonder Woman sebagai superhero wanita pertama dalam sejarah komik dunia tidak pernah dilupakan oleh banyak orang. Kemunculan karakter ini dalam layar lebar sudah dinanti selama beberapa dekade. Warner Bros.' kemudian memberanikan diri untuk menampilkan Wonder Woman sebagai karakter utama dalam film Hollywood pada tahun 2017. Film yang bertajuk "Wonder Woman" ini seakan menjawab isu-isu seputar gender yang selalu dikait-kaitkan pada karakter Wonder Woman. Kemasan film yang menggunakan teknologi pengambilan gambar yang canggih membuat segmentasi film ini bukan hanya penggemar komik tahun 1970-an namun juga Generasi Z. Generasi Z yang selalu digadang-gadang sebagai generasi yang "melek" teknologi ini tumbuh dan besar di era digital tahun 2000-an. Dalam penelitian ini, perempuan Generasi Z menjadi objek penelitian sebagai khalayak media yang menikmati film Wonder Woman. Untuk menggali kesadaran mereka akan isu gender, metode focus group discussion (FGD) digunakan sebagai medium pengambilan data dan hasil penelitian akan dianalisis dengan metode encoding dan decoding milik Stuart Hall secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Generasi Z menganggap sosok Wonder Woman masih membutuhkan dukungan dari keluarga, lingkungan sekitar, serta sosok laki-laki agar menjadi figur yang tangguh. Generasi Z juga merasakan kesamaan perilaku dan pola berpikir dengan Wonder Woman, yaitu ambisius, keinginan untuk dipuji dan diakui, pembangkang, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan orang baru.

Kata kunci : Media, Gender, Generasi Z, Hollywood, Film

Submisi : 15 Maret 2019

Pendahuluan

Pada 21 Oktober 2016, karakter pahlawan wanita di komik, Wonder Woman, sempat dinobatkan sebagai *ambassador* di bidang pemberdayaan remaja perempuan dan wanita dewasa lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sayangnya, Diana Prince nama asli karakter Wonder Woman hanya 'menjalankan' tugasnya selama 2 bulan saja. Pada 16 Desember 2016, Wonder Woman

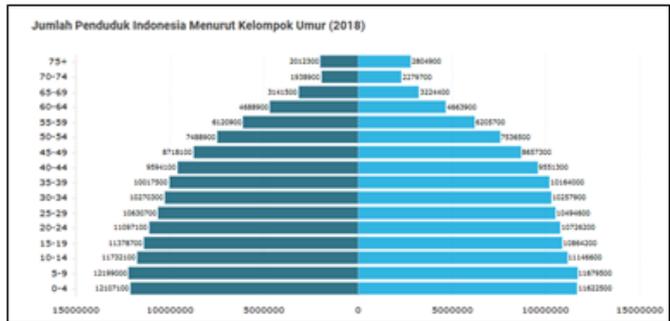
ditarik sebagai Duta Pemberdayaan Remaja Perempuan dan Wanita Dewasa karena meskipun tujuan awal pencipta Wonder Woman adalah untuk merepresentasikan wanita yang kuat dan mandiri namun pada kenyataannya karakter Wonder Woman di dalam komik masih digambarkan sebagai wanita kulit putih (ras dominan), dengan bentuk tubuh yang tidak proposional (pinggang sangat kecil namun memiliki dada besar), serta berpakaian

sangat minim dengan corak warna seperti bendera Amerika. Pada tanggal 31 Mei 2017 lalu, DC meluncurkan Wonder Woman dalam versi film dimana film ini merupakan film pertama yang menampilkan sosok pahlawan wanita (*superheroine*) sebagai tokoh utamanya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerimaan wanita Generasi Z (kelahiran 1995-2000) dari representasi sosok Wonder Woman di film dan dalam hal apa saja Generasi Z memiliki kedekatan representasi dengan karakter Wonder Woman.

Wonder Woman merupakan jagoan wanita pada tahun 1970-an dimana komiknya digandrungi banyak remaja dan orang dewasa pada masa itu. Selama 40 tahun, Wonder Woman tak pernah dilupakan sebagai *superhero* wanita pertama, meskipun pada akhirnya banyak orang tua yang resah karena adanya unsur-unsur sensualitas yang terkandung di dalam komik Wonder Woman. Sutradara Patty Jenkins, salah satu sutradara perempuan di Hollywood, mempertaruhkan reputasinya sebagai sutradara dengan mengangkat karakter Wonder Woman pertama kalinya ke dalam layar lebar. Di bawah naungan Warner Bros., film perdana Wonder Woman meraup pendapatan di *Box Office* sebesar \$821,74 juta dan mendahului rekor film *superhero* lainnya yakni Spider-Man di tahun 2002 sehingga membuat *superhero* asal Pulau Amazon ini menjadi film origin *superhero* dengan pendapatan bersih tertinggi di tahun 2017 (Hughes 2017).

Meskipun diangkat dari komik originalnya, film Wonder Woman dikemas secara apik dengan unsur-unsur cerita yang seolah-olah hendak menjawab kritik dunia atas karakter Wonder Woman seperti mengapa Wonder Woman memakai pakaian yang sangat minim dan mengapa karakter Wonder Woman diperankan oleh orang kulit

putih. Target penonton film ini juga dibuat tidak hanya untuk generasi tahun 70-an yang sudah “khatam” membaca komiknya tetapi juga ingin menyentuh kesadaran generasi muda tentang isu-isu yang berakitan dengan kesetaraan gender di era milenium saat ini.



Gambar 1. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2018 (Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019)

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 didominasi oleh penduduk usia produktif, dimana dominasi terbesar diduduki oleh Generasi Z yang berada pada kategori rentang usia 15 hingga 24 tahun. Namun beberapa ahli demografi masih memperdebatkan karakter dari Generasi Z, terutama tentang pola pandang, pola berpikir, kebiasaan, dan topik apa yang banyak mereka perbincangkan.

Peneliti kemudian tertarik untuk melihat cara pandang Generasi Z khususnya perempuan dalam melihat isu yang hingga saat ini masih terus berkembang luas yaitu isu kesetaraan gender. Dengan munculnya film Wonder Woman yang mewakili era terbaru kesetaraan gender di media, Generasi Z sebagai khalayak media memiliki keunikan sendiri dalam menerima paparan media. Oleh karena itu, dalam

penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana karakter Wonder Woman di mata Generasi Z dan apakah karakter Wonder Woman dalam film Wonder Woman (2017) memiliki kemiripan atau kesamaan dengan karakter dari Generasi Z. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dengan metode *focus group discussion* (FGD) dengan 10 perempuan dari Generasi Z. Metode analisis data yang digunakan adalah metode *encoding* dan *decoding* milik Stuart Hall dan akan dianalisis dengan metode kualitatif.

Tinjauan Pustaka

Representasi Wanita di Media

Wanita menjadi objek yang selalu menarik untuk disoroti bagi media. Segala sisi yang dimiliki wanita tak pernah lepas dari perhatian media. Mulai dari sisi wanita sebagai seorang ibu, sebagai seorang pengajar (guru), model seksi, dan juga istri yang berbakti kepada suaminya. Namun representasi media tidak selalu tepat sasaran dalam menggambarkan sosok wanita. Di media, wanita dianggap selalu berada di ranah domestik. Wanita digambarkan sebagai ibu yang menyiapkan bekal anaknya, menyiapkan sarapan suaminya, membersihkan rumah, sampai mengantarkan anaknya ke tempat tidur pada waktu malam hari. Penggambaran ini di media dianggap sebagai suatu hal yang “ideal” yang dilakukan oleh wanita-wanita di dunia nyata. Konstruksi di media inilah yang kemudian membuat wanita sulit untuk mengubah posisinya di masyarakat, bahwa wanita juga berhak untuk memiliki karir pekerjaan, meraih pendidikan tertinggi, dan mendapat pengakuan atau penghargaan.

Kemampuan media untuk membuat dan menampilkan tanda-tanda berupa gambar, suara, dan pergerakan merupakan bentuk representasi (Danesi

2012). Media berperan sebagai penyedia informasi, pengemasan informasi, dan pendistribusian informasi ke khalayak pengguna media. Segala hal yang termuat di dalam media belum tentu menjadi penggambaran nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang membuat representasi oleh media selalu menarik untuk dibahas.

Film sebagai salah satu media yang juga tak lepas dari tuduhan sebagai “perusak” gambaran wanita di dunia nyata. Dunia perfilman Indonesia bergenre horor menampilkan hantu atau setan yang semuanya adalah wanita. Contoh film horor legendaris Indonesia adalah *Sundelbolong* yang tayang pada tahun 1981 dimana hantu *sundel bolong* sendiri diperankan oleh Suzanna. Film horor terbaru Indonesia yang laris hingga pasar mancanegara adalah *Pengabdian Setan* di tahun 2017 yang disutradarai Joko Anwar juga memiliki sosok ibu sebagai hantu yang diperankan oleh Ayu Laksmi.

Hollywood sebagai rumah produksi film Amerika terbesar pun tidak lepas dari sorotan. Hollywood sejak masa awal selalu menampilkan wanita sebagai sosok yang terdominasi oleh kaum laki-laki serta sosok yang lemah. Kemolekan tubuh wanita juga selalu menghiasi layar bioskop dan bahkan menjadi salah satu faktor yang dapat dijual. Orang-orang berlomba-lomba membeli tiket untuk menonton kemolekan tubuh aktris idolanya. Dalam penelitian Hohls, sebuah film musikal berjudul *Nine* (2009) menampilkan sebuah scene dimana selingkuhan Guido, Carla, menampilkan tarian erotis yang diiringi dengan lagu berjudul *A Call from Vatican* dengan mengenakan pakaian dalam berwarna hitam dan putih dan ia berayun dalam kain warna merah jambu yang tergantung dari langit-langit. Pada adegan tersebut, seluruh bagian

tubuh Carla terpapar oleh kamera dari berbagai angle, mulai dari kaki, buah dada, serta pantatnya (Hohls 2017).

Generasi Z

Menurut Andre Gabriella, & Timea (2016), generasi Z merupakan generasi yang lebih cenderung cerdas daripada bijaksana, mereka suka memimpin saat mereka merasa berani. Generasi Z merupakan generasi yang tidak sabar dan lebih lincah dibanding generasi-generasi sebelumnya. Mereka tidak takut akan adanya perubahan yang terjadi secara terus menerus dan karena mereka hidup dalam dunia internet, mereka memiliki banyak sekali informasi, namun hanya sampai batas tertentu. Sedangkan menurut Bejtkovský (2016), generasi Z merupakan pekerja yang cenderung inovatif dan kreatif. Mereka memiliki keinginan untuk selalu membuat dampak positif dalam masyarakat. Selain itu mereka juga memiliki keinginan untuk maju dan tumbuh secara profesional, dan memiliki kemauan untuk menggunakan pengalaman belajar mereka untuk mencapai hal tersebut.

Bruce Tulgan (2013), founder dari Rainmaker Thinking, Inc sebuah perusahaan Amerika terkemuka yang bergerak dalam bidang pelatihan manajemen dan konsultasi pada lintas generasi di tempat kerja, berpendapat bahwa di lingkungan kerja terdapat 5 kunci tren yang dapat membedakan Generasi Z dari generasi lainnya:

1. Media sosial adalah masa depan

Kemampuan Generasi Z dalam mengejar proses transisi perkembangan teknologi membuat mereka unggul dalam memanfaatkan konektivitas di dunia maya. Untuk mendekati Generasi Z dibutuhkan penguasaan media sosial yang cukup namun mereka masih tetap

membutuhkan panduan dari seorang pemimpin.

2. Hubungan antar manusia menjadi lebih diutamakan

Generasi Z lebih suka terlibat dalam hubungan kerja yang intensif dari anggota lain namun, mereka tidak terlalu suka adanya hubungan yang bersifat terlalu otoriter.

3. Kesenjangan dalam kecakapan

Dalam membina Generasi Z di tempat kerja, akan tampak perbedaan yang cenderung mencolok dalam hal teknis dan non-teknis di antara mereka. Namun butuh upaya yang besar dalam mengarahkan kemampuan dan kekurangan kerja menjadi hal-hal yang sifatnya umum seperti kebiasaan kerja, komunikasi antar personal, pemikiran kritis, dan investasi besar untuk pelatihan teknis.

4. Pola pikir global, realitas lokal

Generasi Z menguasai informasi-informasi di luar negara mereka karena kemampuan mereka dalam akses online, namun mereka kurang “berpetualang” secara geografis. Maka kunci dalam melibatkan mereka di lingkungan mereka secara taktis adalah dengan menerapkan apa yang mereka ketahui tersebut ke ranah lokal.

5. Keragaman tak terbatas

Generasi Z menawarkan sesuai yang baru dalam memandang sebuah perbedaan. Mereka cenderung mencampur-campurkan dan mencocokkan berbagai komponen identitas dari sudut pandang yang menarik.

Kajian Penerimaan Khalayak

Teori penerimaan khalayak ini memiliki asumsi awal bahwa khalayak media bukan merupakan figur yang pasif menerima segala terpaan informasi. Mereka

dianggap pengemban tugas sebagai agen budaya (cultural agent) yang memiliki pendapat dan pola berpikirnya sendiri dalam memaknai konstruksi realitas media (Morissan 2013). Pendapat khalayak akan konten media yang mereka konsumsi akan berbeda satu dengan yang lain, oleh karena itu, khalayak media bisa dibagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok sosial, misalkan gender, usia, status ekonomi, agama, etnis, dan lain sebagainya.

Pencetus Teori Penerimaan Khalayak ini adalah Stuart Hall dan hingga saat ini semua penelitian yang berhubungan dengan penerimaan khalayak masih menggunakan model *encoding* dan *decoding* milik Hall. Berawal dari proses penerimaan pesan yang disebut *decoding*, dimana kegiatan *decoding* adalah proses menerjemahkan pesan-pesan fisik ke dalam bentuk-bentuk makna baru yang dapat dipahami oleh penerima. Proses *encoding* adalah kegiatan pemaknaan yang dilakukan oleh pembuat pesan (*text*) ke dalam bentuk konten media (film, lagu, puisi, dll). Jadi dalam film, proses *encoding* yang dilakukan oleh sutradara ke dalam bentuk adegan, pemilihan pemeran, dan lain sebagainya akan dimaknai dalam proses *decoding* oleh penonton (Morissan 2013). Proses inilah yang akan digunakan untuk bahan analisis khalayak dalam penelitian ini dimana khalayak Generasi Z dianggap sebagai khalayak yang aktif dan kritis dalam melihat fenomena representasi wanita dalam sosok karakter Wonder Woman di film Wonder Woman.

Konseptualisasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data berupa *focus group discussion* (FGD). Dalam menentukan objek penelitian, peneliti akan memilih sebanyak 10

perempuan dengan metode *purposive sample* dengan pertimbangan pemilihan objek penelitian berdasarkan gender (perempuan) dengan kelahiran di atas tahun 1998. Objek penelitiannya adalah wanita dari Generasi Z kelahiran tahun 1998, 1999, 2000, ke atas yang diwakili oleh mahasiswi *Marketing Communication* (MCm) Universitas Ciputra Surabaya angkatan 2016 dan 2017.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan *Focus Group Discussion* atau FGD dimana peneliti akan menunjuk seorang moderator yang akan memimpin jalannya diskusi. Sebelum FGD diselenggarakan, peneliti akan membuat rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan subjek penelitian serta panduan wawancara untuk digunakan oleh moderator FGD. Moderator FGD adalah orang yang akan memimpin jalannya proses dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh peneliti. Moderator akan dipilih berdasarkan kompetensinya terhadap isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam diskusi, peserta akan diberi 2 pertanyaan oleh moderator dan akan mendapat giliran menjawab secara berurutan. Semua peserta diwajibkan untuk menjawab pertanyaan dan identitas peserta tidak akan disebutkan di dalam hasil analisis. Proses FGD akan direkam dengan perekam audio dan akan diubah dalam bentuk transkrip wawancara. Analisis data akan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) hasil FGD dengan mengkategorikan data berupa pernyataan anggota diskusi ke dalam proses *encoding* dan *decoding* milik Stuart Hall.

Hasil Penelitian

Peneliti mengambil 10 orang mahasiswi yang lahir tahun 1998 dan 1999 dan masih masuk dalam kategori sebagai

Generasi Z sebagai peserta FGD. Mereka kemudian berkumpul dalam sebuah ruangan dan dengan dipimpin oleh seorang moderator perempuan yang memimpin jalannya FGD. Sebelum memulai proses FGD, terlebih dahulu para peserta dan moderator FGD menonton film *Wonder Woman* secara bersama-sama. Peserta FGD dipersilahkan untuk membuat catatan selama menonton film. Setelah selesai menonton, moderator memulai FGD dengan menyebutkan peraturan dan proses jalannya FGD, salah satunya adalah terdapat 2 pertanyaan yang diajukan oleh moderator

dan harus dijawab oleh masing-masing peserta. Masing-masing jawaban dari kedua pertanyaan kemudian diolah peneliti dalam tabel *encoding* dan *decoding*, dimana dalam kolom *Encoding* berisi konten dalam film dan kolom *Decoding* berisi pemaknaan dari khalayak film, yaitu peserta FGD.

Pertanyaan pertama berhubungan dengan bagaimana pendapat peserta FGD tentang sosok Diana Prince, alias *Wonder Woman*, dalam film yang telah mereka tonton dan berikut adalah tabel *decoding* dan *encoding* dari hasil diskusi peserta:

Tabel 1. Hasil *Encoding* dan *Decoding* Pertanyaan 1

Encoding	Decoding
Di masa mudanya Diana Prince dilatih untuk menjadi seorang petarung handal.	Diana memang menjadi <i>superhero</i> , namun dalam prosesnya ia masih membutuhkan dukungan dari orang lain untuk melatihnya bertarung dan menemukan kemampuan terhebatnya.
Hadirnya sosok Steve Trevor di Pulau Amazon yang membawa kabar tentang Perang Dunia, membuat Diana ingin pergi dari Pulau tersebut dan membantu manusia mengalahkan Ares, Dewa Perang yang membuat manusia berperang di “Dunia Manusia”.	Meskipun menjadi <i>superhero</i> wanita yang kuat, namun nyatanya Diana masih membutuhkan bantuan Steve Trevor, sosok laki-laki, untuk mengantarkannya ke medan perang. Setelah tiba di London pun mereka menghimpun beberapa laki-laki lainnya untuk ikut ke medan perang.
Ketika telah tiba di Garis Depan (<i>The Front</i>), Diana melihat kesengsaraan orang-orang yang mengungsi karena perang di wilayahnya. Meskipun tahu Diana dapat bertarung, namun Steve Trevor selalu menahan Diana ketika ia hendak melakukan tindakan perlawanan dan mengajak Diana untuk tetap mengikuti rencana semula.	Diana masih terdominasi oleh laki-laki, dimana ia masih diingatkan oleh Steve Trevor untuk jangan gegabah dalam bertindak dan ketika Diana tetap <i>ngotot</i> untuk bertindak, Steve Trevor dan kawan-kawannya tetap setia membantu dan melindungi Diana.

Lanjutan Tabel 1.

<p>Setelah tiba di “Dunia Manusia” (<i>Men’s World</i>), banyak hal baru yang dilihat dan dialami Diana. Ia harus mengganti baju perangnya dengan baju yang layaknya digunakan oleh kaum perempuan di London, selain itu dia juga melihat bahwa dalam rapat para anggota dewan dan Jenderal tidak boleh ada kaum wanita dalam ruangan.</p>	<p>Perbedaan budaya mengakibatkan Diana harus beradaptasi dengan mengubah penampilan khususnya sebagai Putri Amazon. Ia juga menggunakan kemampuannya berbahasa untuk berkomunikasi dan membantu para pengungsi perang dan menerjemahkan buku peneliti Jerman untuk membuktikan kepada para anggota dewan dan Jenderal bahwa ia bukan sekedar wanita biasa.</p>
<p>Di masa mudanya Diana Prince dilatih untuk menjadi seorang petarung handal.</p>	<p>Diana memang menjadi <i>superhero</i>, namun dalam prosesnya ia masih membutuhkan dukungan dari orang lain untuk melatihnya bertarung dan menemukan kemampuan terhebatnya</p>

Pertanyaan 2 adalah apakah peserta FGD merasakan adanya kesamaan watak, sifat, maupun penggambaran dari sosok Diana Prince/Wonder Woman yang juga terdapat dalam diri mereka. Jika ada, peserta

FGD diminta untuk menyebutkan apa saja kesamaan mereka dengan karakter di film. Berikut adalah tabel *encoding* dan *decoding* pertanyaan kedua:

Tabel 2. Hasil *Encoding* dan *Decoding* Pertanyaan 2

Encoding	Decoding
<p>Keinginan menggebu-gebu Diana untuk membunuh Ares dan menyelamatkan “Dunia Manusia”</p>	<p>Sama seperti Gen Z, yang jika sudah ada sesuatu yang diinginkan maka akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya (ambisius) Sama seperti Gen Z, yang tidak bisa mengontrol emosinya</p>
<p>Diana pergi dari Pulau Amazon meskipun telah dilarang oleh ibunya demi keinginannya untuk membunuh Ares dan menyelamatkan “Dunia Manusia”</p>	<p>Sama seperti Gen Z, sifat <i>rebellion</i> atau membangkang/memandel yang muncul ketika keinginannya ditentang oleh orang lain (dalam hal ini orang tua)</p>
<p>Diana bertempur melawan prajurit Jerman di Garis Depan dibantu oleh kawan-kawan satu timnya, mereka berhasil merebut kembali wilayah yang diduduki oleh tentara Jerman</p>	<p>Sama seperti Gen Z, yang mudah bekerja sama dan memiliki empati serta kepekaan akan lingkungan di sekitarnya</p>

Lanjutan Tabel 2.

Diana memohon kepada Antiope untuk mengajari dirinya bagaimana cara bertempur dan dalam prosesnya ia giat dan tekun berlatih meskipun harus sembunyi-sembunyi dari ibunya

Sama seperti Gen Z, yang di masa kini selalu punya keinginan untuk belajar hal-hal baru. Kemudahan dalam mengakses informasi dan *skill* di internet membuat Gen Z mudah menerima ilmu baru

Setelah menumpas semua prajurit Jerman di desa Veld, penduduk desa bersorak sorai dan menyalami Diana untuk mengucapkan pujian dan rasa terima kasih karena Diana telah menyelamatkan mereka dari tangan prajurit Jerman yang kejam.

Sama seperti Gen Z, yang butuh pengakuan dari orang lain akan kemampuan yang mereka miliki. Gen Z juga butuh untuk merasa dipuji dan dikagumi atas pencapaian yang mereka dapatkan.

Analisis dan Interpretasi

Media membuat sebuah produk budaya yang beragam yang mana mengandung unsur-unsur identitas sosial yang ditawarkan kepada penikmat produk tersebut, namun sebagai masyarakat budaya, mereka tidak serta merta harus setuju kepada bentuk identitas yang ditawarkan oleh pencipta produk media tersebut. Itulah mengapa Hall membuat 2 proses yang membedakan pemaknaan dari kacamata si pembuat teks budaya (*encoding*) dan dari kacamata penonton atau khalayak (*decoding*).

Generasi Z sebagai generasi yang lahir ketika dunia sudah memasuki era digitalisasi menjadi generasi yang serba instan. Kemudahan mengakses informasi membuat mereka lebih peka terhadap isu-isu di sekitar mereka. Keunikan generasi ini belum sepenuhnya digali oleh peneliti-peneliti sosial dan budaya, terutama tentang bagaimana cara mereka melihat dunia dan, yang paling utama, media. Sadarkah Generasi Z akan isu-isu penting yang sudah menjadi perdebatan bahkan sebelum mereka lahir hingga saat ini yang masih selalu diangkat berulang-ulang dalam produk-produk media? Pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam hasil analisis penelitian ini.

Film *Wonder Woman* yang tayang pada tahun 2017 mencetak rekor pendapatan sebagai film dengan pendapatan tertinggi yang disutradarai oleh sutradara perempuan (Patty Jenkins). Dalam film ini, sebuah identitas sosial yang diangkat oleh Patty Jenkins adalah sosok wanita yang serba bisa, yang dapat mengurus dirinya sendiri, yang dapat memecahkan segala permasalahan dunia, dan dapat membongkar dominasi laki-laki sebagai pemimpin. Patty Jenkins memvisualisasikan sosok *Wonder Woman* ke dalam diri Gal Gadot, aktris yang dulunya merupakan Miss Israel, yang berparas cantik dengan tubuh tinggi semampai. Dalam film *Diana Prince*, nama yang dipakai oleh *Wonder Woman* saat menjadi orang biasa, pergi dari Pulau Amazon meninggalkan ibu dan rakyatnya ke “Dunia Manusia” (*Men’s World*) di London untuk menghentikan perang abadi yang diciptakan oleh Dewa Ares, Dewa Perang. Ia ditemani oleh mata-mata Inggris, Steve Trevor (diperankan oleh Chris Pine), yang kebetulan dapat masuk ke Pulau Amazon yang tersembunyi karena dikejar oleh sekelompok prajurit Jerman setelah ia mencuri buku penelitian milik ilmuwan Jerman. Diana bersama Steve menuju ke *Garis Depan* (*The Front*) untuk mencegah Jenderal Ludendorff melepaskan

senjata kimia ke penduduk desa, di mana Diana yakin bahwa Dewa Ares telah mengambil rupa sebagai Jenderal Ludendorff untuk mengisi otak manusia agar penuh dengan kebencian dan ketamakan.

Pada penelitian, peserta FGD nomor 4, 5, 7, dan 10 berpendapat bahwa untuk menjadi sosok yang kuat dan petarung yang unggul Diana membutuhkan dukungan dari orang lain untuk melatihnya bertarung dan menemukan kemampuan terhebatnya. Tumbuh besar sebagai anak dari Ratu di Pulau Amazon, Diana dikelilingi oleh wanita-wanita yang berpengaruh dalam hidupnya. Ada yang berperan sebagai pengajar (dimana Diana selalu melarikan diri saat pelajaran dimulai) dan ada juga yang berperan sebagai pelatih perang (Antiope). Selain dari ibunya, sejak kecil Diana sudah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Stafford (2004) dalam tulisannya menyebutkan bahwa saat bertumbuh kembang, anak akan mengalami 3 tahap pembelajaran. Pertama, kemampuan komunikasinya akan berkembang ketika ia terlibat dalam percakapan interaktif dengan beberapa pihak (di luar keluarganya). Kedua, sang anak akan tahu ada aturan-aturan tentang mana yang patut dan tidak patut diucapkan dan bagaimana cara mengucapkannya, dan ketiga adalah saat sang anak terjun ke “dunia orang dewasa”, mereka diharapkan menjadi pencipta pengetahuan sosial dan bukan hanya menjadi bagian dari pengetahuan sosial itu saja (Stafford, 2004). Dukungan dari sang pelatih perang, Antiope, dan pada akhirnya sang ibu juga turut mendukung, membuat Diana tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan pandai bersosialisasi dengan warga Amazon lainnya.

Ketika seorang lelaki dan mata-mata Inggris terdampar di Pulau Amazon dengan

membawa kabar bahwa “Dunia Manusia” sedang berperang, Diana mulai menemukan perannya sebagai penyelamat “Dunia Manusia” dan ia ingin lepas dari naungan komunitas Amazon yang selama ini membesarkannya. Setelah mendapat persetujuan untuk pergi dari Pulau Amazon dan masuk ke “Dunia Manusia”, peserta FGD nomor 1, 2, dan 8 beranggapan bahwa Diana rupanya masih bergantung pada sosok laki-laki untuk membantu mengantarnya ke London dan ke Garis Depan. Ia juga dituntut oleh Steve Trevor untuk menyesuaikan penampilannya dengan penampilan “yang sewajarnya” wanita di London dengan mengganti pakaian khas petarung Kaum Amazon ke pakaian “sopan” (*modest*) yang dipakai oleh wanita terhormat di Inggris. Mengambil setting Perang Dunia I, peran Diana setibanya di London berubah sesuai dengan peran wanita di London pada masa itu. Reed dalam bukunya (2015: 82) mengatakan di masa itu, terdapat banyak poster-poster yang berisi propaganda tentang wanita adalah korban dari Perang Dunia I. Para prajurit Inggris maju berperang dengan gembleran bahwa jika mereka tidak maju berperang melawan tentara Jerman, maka wanita-wanita di rumah – ibu, istri, anak, saudara perempuan – akan menjadi korban (rumah hancur, istri dan anak dibunuh, atau lebih buruk lagi istri dan anak mereka diperkosa oleh tentara Jerman). Oleh karena itu, pada masa Perang Dunia I wanita-wanita Inggris memiliki waktu luang yang lebih banyak dihabiskan untuk bersolek. Standar-standar pun dibuat, mulai dari cara berpakaian, berbicara, berjalan, dan lain-lain, untuk membedakan wanita yang bermartabat dengan wanita yang hanya kaum jelata.

Meskipun sudah sempat diberitahu bahwa wanita di masa itu tidak terjun ke medan perang, Diana tetap bersikeras untuk

pergi ke Garis Depan (*The Front*). Saat bertempur di Garis Depan, Diana memimpin kawan-kawannya untuk menumpas tentara Jerman yang menduduki Desa Veld. Bagi peserta nomor 3, 6, dan 9 hal tersebut merupakan gebrakan baru bahwa dibalik kesuksesan wanita pasti ada laki-laki yang setia membantu dan mendukungnya. Jadi kesuksesan wanita tak pernah lepas dari peran laki-laki juga. Hal ini berbanding terbalik dengan penggambaran wanita di masa Perang Dunia I. Di Inggris, salah satu poster propaganda yang paling sering dibuat adalah sosok wanita sebagai pahlawan di bidang keperawatan. Wanita perawat selalu digambarkan menyerupai sosok malaikat dalam poster yang memberikan bantuan pada prajurit yang terluka. Prajurit yang biasanya dilihat sebagai sosok yang kuat dan wanita sebagai sosok yang lemah dan butuh pertolongan namun di film ini justru wanitalah yang menyelamatkan laki-laki. Citra perempuan sebagai malaikat penolong inilah yang menjadi gebrakan bahwa wanita juga memiliki kekuatan (Reed 2015: 84).

Selanjutnya, peserta disodorkan dengan pertanyaan berkaitan dengan apakah karakter Wonder Woman memiliki kesamaan dengan watak dan sifat dari Generasi Z dan seluruh peserta menjawab bahwa beberapa karakter Wonder Woman memiliki kesamaan yang erat dengan perilaku Generasi Z masa kini. Kesamaan pertama yang diungkapkan oleh peserta nomor 3, 5, dan 8 adalah keinginan menggebu-gebu Diana untuk membunuh Ares dan menyelamatkan "Dunia Manusia". Saking kuatnya keinginannya ini membuat ia tidak dapat mengendalikan emosinya dan menjadi keras kepala. Sifat ini menurut peserta memiliki kedekatan dengan sifat Generasi Z yang cenderung ambisius dalam usahanya mencapai target atau keberhasilan

tertentu yang mengakibatkan mereka dicela sehingga menjadi terlalu keras kepala dan tertutup dalam menerima saran dan kritik dari orang lain.

Kesamaan kedua yang disebutkan oleh peserta nomor 1, 5, dan 7 adalah sifat *rebellion* atau membangkang yang dimiliki oleh Diana. Ketika Diana mengetahui bahwa "Dunia Manusia" telah disusupi oleh Dewa Perang, ia bertekad untuk pergi dan membantu manusia menaklukkan Dewa Ares. Meskipun mendapatkan larangan dari ibunya, Ratu Hippolyta, ia tetap nekad untuk berangkat ke London dibantu oleh Steve Trevor. Sifat membangkang atau membandel tersebut diakui oleh para peserta juga sering muncul dalam diri Generasi Z ketika keinginan mereka ditentang oleh orang lain (atau dalam hal ini adalah orang tua). Namun selama yang diperjuangkan itu benar (Diana memperjuangkan keselamatan manusia dari pengaruh buruk Dewa Ares), mereka yakin apa yang mereka lakukan itu akan membuahkan hasil yang positif.

Kesamaan ketiga yang disebutkan juga oleh peserta nomor 2 dan 5 adalah kemudahan Diana beradaptasi dan bekerja sama bersama dengan orang baru. Ketika berada di "Dunia Manusia", Diana dituntut untuk menyesuaikan diri baik secara penampilan maupun kemampuan. Keberhasilan merebut Desa Veld dari tangan pasukan Jerman adalah hasil kerja sama Diana dengan timnya. Sifat ini diamini oleh peserta yang menganggap sifat ini sama seperti Gen Z, yang mudah bekerja sama dan memiliki empati serta kepekaan akan lingkungan di sekitarnya.

Kesamaan keempat yang disebutkan oleh peserta nomor 2 adalah keinginan Diana untuk belajar bagaimana menjadi seorang petarung yang hebat kepada Antiope. Ia belajar dengan tekun dan giat meskipun harus sembunyi-sembunyi dari

ibunya. Di masa yang modern ini, Generasi Z dianggap selalu punya keinginan untuk mengetahui hal-hal baru. Kemudahan dalam mengakses informasi dan *skill* di internet membuat Gen Z mudah menerima dan menguasai ilmu-ilmu baru.

Kesamaan kelima yang disebutkan oleh peserta nomor 1 dan 6 adalah hasrat untuk diakui. Setelah menumpas semua prajurit Jerman di desa Veld, penduduk desa bersorak sorai dan menyalami Diana untuk mengucapkan pujian dan rasa terima kasih karena Diana telah menyelamatkan mereka dari tangan prajurit Jerman yang kejam. Pengakuan merupakan penghargaan tertinggi yang diharapkan dapat diperoleh oleh Generasi Z. Setelah bekerja keras dan bersusah payah belajar dan bekerja, mereka butuh untuk merasa dipuji dan dikagumi atas pencapaian yang mereka dapatkan. mewakili analisis dan interpretasi sehingga bagian ini bisa maksimal dianalisis..

Simpulan

Sejak muncul dalam bentuk komik, kemudian ditampilkan dalam bentuk serial televisi, hingga abad ke-21 ini muncul kembali dalam format film yang sudah mengadaptasi teknologi sinematografi tercanggih, Wonder Woman belum kehilangan popularitasnya dikalangan pecinta pahlawan super dan aktivis perempuan. Kemampuan Wonder Woman untuk menyentuh berbagai generasi pun patut dianggap sebagai sebuah prestasi yang super.

Saat ini dunia sedang didominasi oleh Generasi Z, generasi baru yang dianggap lahir dan tumbuh besar di saat teknologi sudah digunakan di sebagian besar bidang. Berbagai asumsi dan pertanyaan muncul di benak cendekiawan tentang bagaimana sifat-sifat Generasi Z dan

bagaimana cara mereka melihat dunia di era digital. Kemunculan penelitian-penelitian tentang karakter Generasi Z pun bermunculan.

Penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan angin segar dalam mendeskripsikan pola berpikir Generasi Z, khususnya perempuan, tentang isu-isu seputar gender yang dibawa di film Wonder Woman (2017). Menurut perempuan kelahiran 1996 ke atas, sebelum menjadi pahlawan super dengan kemampuan bertarung yang luar biasa, sosok Wonder Woman membutuhkan peranan keluarga sebagai sistem pendukungnya (*support system*). Tidak hanya ibunya saja, namun seluruh warga Pulau Amazon menciptakan lingkungan yang kondusif selama Diana bertumbuh dan berkembang menjadi wanita dewasa. Bagi Generasi Z, Wonder Woman juga masih bergantung pada peran laki-laki yang membantunya menuju medan perang dan bertempur bersama di Garis Depan (*The Front*). Meskipun demikian, adalah wajar bila pasti ada laki-laki di belakang wanita yang sukses. Kedatangan Diana di Dunia Manusia (*The Men's World*) juga membuatnya harus beradaptasi dengan mengubah penampilan dan pemahaman mendasar tentang bagaimana wanita di masa itu berperilaku. Di perpindahan era yang cukup pesat ini keterbukaan menjadi syarat utama agar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan, dan itulah yang dilakukan Wonder Woman saat keluar dari Pulau Amazon.

Kedekatan karakter Wonder Woman dengan karakter Generasi Z diamini oleh seluruh peserta FGD di penelitian ini. Mereka mengakui bahwa setelah menonton film Wonder Woman (2017), banyak kesamaan perilaku dan pola berpikir Diana yang juga dianut oleh kebanyakan perempuan Generasi, yaitu sifat ambisius

dan gegabah yang ditunjukkan Diana saat berniat untuk membunuh Dewa Perang, Ares. Sifat ambisius yang dimiliki Generasi Z biasanya muncul ketika mereka ingin mencapai sebuah keberhasilan atau prestasi. Ada keinginan juga dari Generasi Z untuk mendapatkan pengakuan dan pujian atas apa yang mereka capai. Selain itu, Generasi Z juga merasa bahwa sifat membangkang (*rebel*) Diana juga pernah mereka lakukan saat apa yang mereka inginkan tidak dapat diwujudkan oleh orang tua mereka. Namun, layaknya Diana, Generasi Z juga merasa mereka lebih luwes dalam bekerja bersama orang lain dan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru didukung dengan kemajuan teknologi yang memudahkan mereka mengakses informasi dan belajar skill baru.

Penelitian ini belum sempurna karena masih memiliki beberapa kekurangan. Sorotan penelitian ini adalah Generasi Z dan karakteristik mereka namun masih khusus pada perempuan. Karakter perempuan dan laki-laki Generasi Z bisa jadi memiliki perbedaan yang signifikan sehingga tidak dapat digeneralisasikan dalam penelitian ini. Selain itu, sebagai dasar penelitian di masa depan, karakter Generasi Z juga dapat digali melalui fenomena tertentu atau kejadian tertentu yang memaksa mereka untuk membuat keputusan atau melakukan sebuah tindakan tertentu.

Daftar Pustaka

- Andrea, B., Gabriella, H.-C., & Tímea, J. 2016. Y and Z Generations at Workplaces. *Journal of Competitiveness* (p. 92).
- Bejtkovský, J. 2016. The Current Generations: The Baby Boomers, X, Y and Z in the Context of Human Capital Management of the 21st Century in Selected Corporations in the Czech Republic. *Littera Scripta* (pp. 25-45).
- Danesi, Marcel. 2012. *Pesan, Tanda, dan Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Demografi: 2018, *Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa*. (2019, Maret 3). Diambil kembali dari Dkatadata Web site: <https://databoks.katadata.co.id>
- Hohls, Vyonne Linda. 2017. 'The Representation of Women in Hollywood Film Musicals: a Qualitative, Critical and Visual Analysis of "Gentlemen Prefer Blondes" and "Nine"'. Disertasi. Afrika Selatan: Universitas KwaZulu-Natal.
- Hughes, Mark. 2017. 'Wonder Woman' Is Officially The Highest-Grossing Superhero Origin Film. Retrieve from URL <https://www.forbes.com/sites/markhughes/2017/11/02/wonder-woman-is-officially-the-highest-grossing-superhero-origin-film/#424ac2abebd9>. Diakses 7 Maret 2019.
- Morisan. 2013. *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana.
- Reed, Stacey. 2015. Victims or Vital: Contrasting Portrayals of Women in WWI British Propaganda. *Momonu* (pp. 81-92).
- Stafford, Laura. 2004. Communication Competencies and Sociocultural Priorities of Middle Childhood. *Handbook of Family Communication* (pp. 312).
- Tulgan, Bruce. 2013. "Meet Generation Z: The Second Generation Within The Giant 'Millennial Cohort'". RainmakerThinking, Inc.

OTORITAS PENANGGULANGAN BENCANA DI KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PALU

Subhan Haris

Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Tadulako

Jln. Soekarno Hatta Km. 9 Kota Palu Sulawesi Tengah.

Email : subhanharis71@gmail.com

ABSTRAK

Rentetan bencana yang menimpa Indonesia, telah membangun kesadaran mengenai kerentanan masyarakat dan rapuhnya masyarakat akan bencana, bahwa sikap reaktif dan pendekatan represif yang dilakukan selama ini sudah tidak memadai, dibutuhkan pengembangan sikap baru yang lebih proaktif, komprehensif, dan fundamental dalam menyikapi persoalan bencana, Untuk mengurus hal tersebut, maka dibentuk kelembagaan BNPB di tingkat Pusat dan BPBD di tingkat daerah, sesuai tatanan sistem pemerintahan Republik Indonesia yang tersusun dalam stratifikasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kata Kunci : Otoritas; Penanggulangan; Bencana

Submisi : 4 Februari 2019

Pendahuluan

Rentetan bencana yang menimpa Indonesia, telah membangun kesadaran mengenai kerentanan masyarakat dan rapuhnya masyarakat akan bencana, bahwa sikap reaktif dan pendekatan represif yang dilakukan selama ini sudah tidak memadai, dibutuhkan pengembangan sikap baru yang lebih proaktif, komprehensif, dan fundamental dalam menyikapi persoalan bencana,

Kondisi tersebut, kemudian mendorong pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan perspektif untuk membangun ketahanan (resilience) masyarakat menghadapi bencana, kebijakan ini selain merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab atas amanat konstitusi yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, juga merupakan jawaban atas hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan.

Untuk mengurus hal tersebut, maka dibentuk kelembagaan BNPB di tingkat Pusat dan BPBD di tingkat daerah, sesuai tatanan sistem pemerintahan Republik Indonesia yang tersusun dalam stratifikasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 18 ayat 2 hasil amandemen ke II disebutkan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pembagian urusan tersebut kemudian terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam 3 (tiga) klasifikasi yakni urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Salah satu urusan konkuren yang bersifat wajib sebagai pelayanan dasar ialah urusan perlindungan masyarakat sebagaimana Pasal 12 bahwa “(1). Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dijelaskan dalam Lampiran bahwa “Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; terdiri atas sub urusan Ketentraman dan ketertiban Umum, Bencana dan Kebakaran.”

Salah satu pemerintah daerah yang segera merespon pendirian kelembagaan penanggulangan bencana daerah ialah Pemerintah Daerah Kota Palu, dimana melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan tercatat sebagai BPBD kelima di Indonesia, pembentukan BPBD di Kota Palu juga dilatar-belakangi oleh beberapa pertimbangan :

1. Inisiasi pemimpin daerah (Walikota Palu) yang melihat dan terlibat secara langsung dalam bencana kemanusiaan di Aceh tahun 2004.
2. Tingginya potensi bencana alam Kota Palu yang ditunjukkan dengan Sejarah Tsunami pada tahun 1927 (Wilayah Besusu-talise) dan 1968 (wilayah Mamboro), dan
3. Letak geografis Kota Palu yang berada tepat di atas Jalur Sesar Geser Regional Palu-Koro dan riwayat kebencanaan peristiwa Tanah Runtuh (Bencana Longsor).

Terbentuknya kelembagaan BPBD Kota Palu, dengan ekspektasi

mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana di Kota Palu yang sesuai dengan kondisi dan potensi bencana di wilayah Kota Palu, sehingga pada gilirannya akan berimplikasi terhadap operasi penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab III tentang tanggung jawab dan wewenang Pasal 5 termuat bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana” (UU 24 tahun 2007). Selanjutnya untuk melaksanakan tanggung-jawab dan wewenang yang menjadi tanggung jawab daerah dalam penanggulangan bencana, maka pada Bab IV kelembagaan dari Undang Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Bagian Kedua tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pasal 18, tercantum: “ (1). Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.”

Hal ini menunjukkan bahwa pendirian BPBD di tingkat daerah merupakan amanat dari Undang Undang.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penanggulangan bencana, maka kelembagaan BPBD kemudian mendapatkan otoritas atau kewenangan sebagai dasar pelaksanaan, menurut J.B.J.B Ten Berger yang dikutip oleh Ni'Matul Huda mengklasifikasi otoritas sebagai legitimate power (kekuasaan yang

terlegitimasi), menyatakan bahwa “dikenal ada tiga macam sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat” (Ni'matul Huda, 2016) hal ini menunjukkan bahwa kewenangan BPBD terbagi atas 3 jenis yakni kewenangan yang bersumber dari undang undang secara langsung bersifat asli (atribusi) maupun turunan (delegasi dan mandat).

Hal ini menunjukkan, bahwa dengan terbentuknya kelembagaan BNPB ditingkat pusat dan BPBD ditingkat daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka kewenangan penanggulangan bencana yang selama ini diurus oleh kementerian/lembaga seyogyanya dilimpahkan kepada BNPB/BPBD, sebab dalam kewenangan berlaku asas hukum khususnya hirarki ketiga menurut Harjono bahwa “Asas yang khusus mengesampingkan asas yang umum (*lex specialis derogate legi generale*)” (Ni'matul Huda, 2016). sehingga berdasarkan asas tersebut kewenangan penanggulangan bencana seyogyanya menjadi otoritas kelembagaan BNPB/BPBD.

Namun realita menunjukkan, bahwa meskipun telah terbentuk kelembagaan BNPB ditingkat pusat dan BPBD ditingkat daerah, namun sub urusan penanggulangan bencana belum sepenuhnya menjadi otoritas sepenuhnya, hal ini ditunjukkan dengan fenomena-fenomena sebagai berikut.

Dalam penanganan bencana akibat ulah manusia (bencana sosial) sebagian kewenangan masih ditangani oleh masing-masing sektor, hal ini terlihat pada Sub Urusan Kebakaran dan konflik menjadi urusan Kementerian Dalam Negeri, yang dalam pelaksanaannya di tingkat kabupaten dan Kota ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sub urusan perlindungan masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat untuk bencana sosial lainnya seperti Epidemii menjadi urusan Kementerian Kesehatan yang ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota Palu di tingkat kota, demikian pula dengan Bencana akibat alam seperti Kebakaran Hutan dan Lahan ditangani oleh Dinas Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu.

Fenomena lainnya terlihat pada tahap pra bencana fase pencegahan dan kesiapsiagaan terlihat program yang tumpang tindih seperti Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dari BNPB, dimana untuk Kota Palu tahun 2015 kelurahan Baru dan Lolu Utara dan pengembangannya tahun 2017, namun terdapat juga program Kampung Siaga Bencana (KSB) dari Kementerian Sosial.

Pada fase tanggap darurat, yakni pada fenomena tumpah tindih terlihat dalam hal penanganan pengungsi selain ditangani oleh BPBD juga masih ditangani oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu, dan Dinas Kesehatan, demikian pula dengan kelembagaan Taruna Siaga Bencana (Tagana), masih dalam pembinaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu.

Pada fase pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) masih ditangani sesuai sektor, sebagai contoh penanganan sungai dalam seluruh wilayah Kota Palu dibawah kewenangan Balai Wilayah Sungai III Sulawesi (Kementerian Pekerjaan Umum).

Paradigma baru lainnya sesuai amanat Undang Undang Penanggulangan Bencana bahwa kelembagaan BPBD memiliki 3 (tiga) fungsi yakni “a. fungsi koordinasi, b. komando; dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan,” (Ni'matul Huda, 2016).

Eksistensi BPBD sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi : “a. Prabencana, b. saat tanggap

darurat; dan c. pascabencana.” Namun dalam perspektif pejabat pemerintahan di daerah masih tertanam paradigma lama, bahwa bentuk kelembagaan BPBD yang berbentuk badan melekat fungsi koordinatif dan bukan fungsi pelaksana (selama ini berbentuk dinas), fenomena lain ialah rasa sungkan untuk melaksanakan fungsi komando, yang selama ini melekat pada lembaga keamanan dan ketertiban seperti TNI/POLRI.

Fenomena-fenomena di atas, mengindikasikan masih belum harmonisnya (*dispute*) peraturan perundang-undangan, tumpang tindihnya (*Overlapping*) kewenangan dalam penanggulangan bencana, bahwa dengan berdirinya BPBD sebagai institusi khusus yang menangani bencana, maka secara otomatis urusan yang selama ini diurus oleh lintas kementerian terkait kebencanaan tidak dapat dilakukan lagi, terlebih bahwa dalam rapat kerja Nasional Bapak Presiden Republik Indonesia tahun 2016, Hotel Bidakara, Jakarta menegaskan “1. Setiap kejadian bencana, merupakan tanggung jawab Bupati/Walikota, 2. Gubernur merapat untuk memberikan bantuan, 3. TNI dan POLRI dilibatkan dalam penanganan darurat, 4. Penanggulangan Bencana harus dilakukan sedini mungkin” (Pidato Presiden 24 Februari 2016), hal ini menunjukkan bahwa BPBD kabupaten/Kota sebagai penerima otoritas atribusi, delegasi dan mandat merupakan ujung tombak penanggulangan bencana di daerah kabupaten/kota, memiliki permasalahan terkait otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan realitas sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji *Otoritas Penanggulangan Bencana* dengan mengambil lokus kajian di

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Palu.

Salah satu unsur terpenting dari Negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam Negara. Ajaran ‘pemisahan kekuasaan’ (*separation of power*) telah memperlihatkan corak yang beragam di berbagai Negara. prinsip-prinsip hukum yang dianut suatu Negara. Menurut Marshall menyatakan, bahwa:

“The phrase ‘separation of power’ is, however, one of the most condusing in the vocabulary of political and constitutional thought. It has been used with varying implications by historians and political scientists.” (ungkapan pemisahan kekuasaan merupakan salah satu yang paling membingungkan di dalam kosakata pemikiran politik dan konstitusional. Ungkapan pemisahan kekuasaan tersebut telah digunakan dengan berbagai implikasi oleh para sejarawan dan ilmuwan politik) (Marshall, 1971).

Jadi Pemisahan kekuasaan dapat dipahami sebagai doktrin konstitusional atau doktrin pemerintahan yang terbatas, yang membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian ini adalah *checks and balances*, yang mengatakan bahwa masing-masing cabang pemerintahannya membagi sebagian kekuasaannya pada cabang yang lain dalam rangka membatasi tindakan-tidaknya, sehingga menurut Marshall “Kekuasaan yang terbagi semacam inilah yang mencegah *absolutism* (sebagaimana dalam kekuasaan monarki atau ditaktor ketika semua tercabang terpusat pada otoritas tunggal), atau mencegah korupsi kekuasaan

yang timbul karena kemungkinan kekuasaan tanpa pengawasan (Marshall, 1971).

Dalam konteks kajian kekinian menurut pandangan Fukuyama “Negara harus diperkuat” (Fukuyama, 2005). Suatu Negara yang kuat ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati oleh masyarakat, tanpa harus menebarkan ancaman, paksaan, dan kecemasan yang berlebihan. “Elemen pada dasar yang ada pada Negara yang kuat adalah otoritas yang efektif dan terlembaga” (Fukuyama, 2005).

Robert Bierstedt wewenang (*authority*) adalah “*institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan)” (Huda, 2016) jadi kekuasaan tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai, sedang menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, bahwa Otoritas adalah “kekuasaan formal (*formal power*), yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya” Pemahaman yang ditangkap dari pengertian yang dikemukakan di atas bahwa otoritas ialah kekuasaan yang melekat pada lembaga yang menjadi pedoman bagi para pejabatnya untuk melaksanakan fungsi yang diemban oleh lembaga dalam bentuk perintah dan aturan-aturan, serta ekspektasi kepatuhan dari kebijakan tersebut.

Adapun cara kewenangan itu diberikan dan dijalankan organ pemerintah, menurut J.B.J.B Ten Berger dalam Ni’Matul Huda “dikenal ada tiga macam sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat” (Huda, 2016) Atribusi diartikan sebagai :

“Cara organ pemerintah mendapatkan wewenang pemerintah yang

ditentukan. Organ dengan kewenangan membuat peraturan itu menciptakan wewenang pemerintahan baru dan memberikannya pada organ pemerintah lain; organ pemerintah kadang-kadang secara khusus menciptakan kesempatan - untuk munculnya suatu wewenang. Organ dengan kewenangan mengatur itu dapat diketahui baik dari pembuat undang-undang formal maupun membuat peraturan daerah.

Jadi atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ (lembaga/institusi) pemerintah, baik pembuat undang-undang itu bersifat asli (*originare wetgevers*) seperti MPR, DPR dan presiden di tingkat pusat, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota bersama gubernur dan walikota di tingkat daerah, Pemikiran ini sejalan dengan pernyataan Indroharto yang mengemukakan bahwa “atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang diadakan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator* (Indiharto, 1991).

Pengertian atribusi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa “Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.”

Pada Bagian Keempat tentang Atribusi, Delegasi, dan Mandat disebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila

- a. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan. (delegasi: pelimpahan membuat peraturan atau wewenang pemerintahan dan terkait dengan pertanggung jawaban, orang yang mendapat delegasi, berwenang atas nama sendiri dan melaksanakan kekuasaan sendiri). Delegasi menurut H.D. van Wijik/Willem Konijnenbelt adalah “pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat yang lain sehingga setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi” (Huda, 2016).

J.B.J.M. Ten Berge (Huda, 2016) mendefinisikan mandat sebagai berikut;

“Mandat adalah suatu ‘perintah’ terhadap pegawai yang secara hierarkis merupakan bawahan untuk melaksanakan wewenang mengambil keputusan. Mandat kepada pegawai yang tidak memiliki hubungan hierarkis – seperti pegawai dari badan publik, dewan atau yayasan pemerintah yang berbeda – dapat dipertimbangkan, namun pemberian mandat seperti itu memerlukan persetujuan dari pihak yang diberi mandat.”

Menurut Solway (2004), tujuan pemerintah daerah dalam pengelolaan bencana meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Mengidentifikasi orang dan wilayah yang rentan bencana dalam lingkup kabupaten
- b) Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari potensi dampak bencana alam,
- c) Membagikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat untuk mitigasi bencana,
- d) Menjaga hubungan dengan para pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, kesehatan dan kesejahteraan,
- e) Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan first aid atau pertolongan pertama yang sesuai,
- f) Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat.
- g) Mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi tempat yang aman serta lokasi pengungsi.

Metode Penelitian

Otoritas penanggulangan bencana, disajikan dengan metode “kualitatif bermakna yakni penyajian data yang disertai dengan pemberian makna dibalik data yang tampak“

Penelitian dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif, sedang sumber data dalam penelitian meliputi data primer, dan data sekunder.

Untuk memperoleh hasil penelitian obyektif dengan dukungan data yang benar, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang

meliputi observasi, Wawancara, dan dokumentasi.

Model analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, Menurut Miles, Huberman dan Saldana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*) merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
2. Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian data adalah hasil pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*) dan verifikasi. mulai dari mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-koritifurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.

Hasil dan Pembahasan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu terbentuk sejak tanggal 4 Bulan Juni Tahun 2009, memiliki tugas penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang mencakup tugas pencegahan, penanganan kondisi kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan fungsi

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang meliputi usaha

pencegahan bencana, penanganan kedaruratan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

2. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan instansi lainnya dalam kegiatan penanggulangan bencana;
3. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan berkoordinasi dengan perangkat daerah Kota Palu serta instansi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah secara berkala baik dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Penyelenggaraan ketata-usahaan dan tata-laksana;
8. Mempertanggung-jawabkan sarana dan prasarana, keuangan, personil dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
9. Melakukan pembinaan pada unit-unit yang membantu penyelenggaraan tugas penanggulangan bencana;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tupoksi.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran dari kewenangan penanggulangan bencana di daerah, belum dilakukan penyesuaian struktur kelembagaan, kuantitas dan kualitas pegawai yang mumpuni.

Beranjak dari prespektif bahwa kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi,

sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan organisasi dapat tercapai. kewenangan atau otoritas adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.

Bahwa setiap kebijakan publik disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah, baik yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat, jika kewenangan atribusi dilekatkan sebagai pembagian kekuasaan negara melalui peraturan perundang-undangan yang dapat diterjemahkan sebagai kewenangan asli, maka kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari atribusi atau bersifat turunan, Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan merupakan dasar dari kebijakan pengelolaan urusan pemerintahan seperti penanggulangan bencana yang diatributifkan maupun yang non atributif sehingga akan berjalan efisien dan efektif sesuai jenjang hirarki kelembagaan pengelola bencana.

Sesuai hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagai sumber dan dasar dari otoritas, khususnya otoritas yang bersifat asli atau atribusi, menunjukkan bahwa dari 8 (delapan) Kali metamorphosis kelembagaan, kewenangan yang bersifat atribusi dimulai pada tahun 2005 dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2005, tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB), namun dalam regulasi ini belum secara jelas mencantumkan kewenangan penanggulangan bencana, sehingga Kewenangan penanggulangan bencana dalam bentuk atribusi baru termaktub secara jelas dalam Undang-Undang dimulai pada

tahun 2007 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kewenangan penanggulangan bencana dapat dilihat sebagai kewenangan atribusi dan sebagai kewenangan delegasi. Meskipun penulis cenderung menggunakan bahwa kewenangan penanggulangan bencana merupakan kewenangan atribusi dengan pertimbangan bahwa dalam Undang-Undang memuat amanat pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang dipertegas dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang meuat bahwa kewenangan atribusi ialah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Berikunya tentang Kewenangan penanggulangan Bencana apakah merupakan Hak semata atau merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab atas kekuasaan, pemikiran bahwa kewenangan adalah hak semata menyebabkan dapat diterjemahkan bahwa dalam penanggulangan bencana sangat tergantung kepada kepala daerah apakah mau menggunakan haknya atau tidak, namun bila ditinjau dari pertimbangan bahwa dalam kekuasaan melekat kewajiban tanggung jawab, maka otoritas yang telah dilimpahkan seyogyanya dilaksanakan, sebab kewenangan merupakan dasar dari penjabaran tugas dan fungsi, sehingga bila kewenangan tidak dijalankan akan berimplikasi terhadap tidak berjalannya tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana.

Kelembagaan penanggulangan bencana yang terbentuk pada tahun 2007 menunjukkan bahwa sebagai lembaga ini terbentuk belakangan, sebab kelembagaan

yang mengurus penanggulangan bencana sebelumnya dalam bentuk Tim Koordinasi atau bersifat tugas tambahan dan bukan berbentuk organisasi perangkat daerah. hal ini sekaligus menyiratkan 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. Bahwa kewenangan atribusi dalam penanggulangan bencana telah termuat dalam Undang Undang sebelumnya yang telah terbit lebih dahulu ada.
2. Urusan penanggulangan bencana telah diurus oleh lembaga lain baik bersifat tampung tantra maupun sebagai tugas tambahan.

Dari hasil perbandingan kewenangan penanggulangan bencana pemerintah bersifat nasional sedang kewenangan pemerintah daerah bersifat spesifik dengan termuatnya kata pada wilayahnya sebagaimana terlihat pada point a. dan g., Kewenangan Pemerintah Pusat bersifat perumusan kebijakan sedang kewenangan pemerintah daerah bersifat pengaturan hal ini terlihat pada point e tentang teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya, Kewenangan penentuan kebijakan kerja sama dari badan-badan atau pihak internasional dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak- pihak internasional lain, sedangkan kewenangan pemerintah daerah pada pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain, Kewenangan atribusi penanggulangan bencana pada pemerintah pusat yang tidak menjadi tanggung jawab daerah yakni Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah, Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah di atas menggunakan sesuai amanat Undang

Undang meliputi indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan status darurat bencana berdasarkan indikator dari amanat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana berimplikasi :

1. Wewenang dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana dititik beratkan pada kabuapetn/kota
2. Terdapat fenomena keengganan dan kekhawatiran dari pimpinan daerah untuk menetapkan status tanggap darurat karena berimplikasi terhadap penggunaan dana darurat, yang memiliki resistensi dalam penyalahgunaan wewenang, yang berdampak pada tidak tuntasnya permasalahan bencana, sebab model penanganan bencana cenderung bersifat pemberian bantuan/hibah saat tanggap darurat, belum dibarengi dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat antisipatif atau penyelesaian sampai ke penyebab bencana,

Dari data kejadian bencana menunjukkan bahwa dari 2 (kali) banjir bandang, 8 (delapan) kali banjir, 1 (satu) kali cuaca ekstrim, 2 (dua) kali Kebakaran hutan dan 30 (tiga puluh) kali gempa, hanya ditetapkan status tanggap darurat sebanyak 1 kali, seyogyanya banjir bandang Talise yang memiliki korban terparap terbesar dapat ditetapkan sebagai status tanggap darurat namun tidak dilakukan dengan pertimbangan hanya 1 (satu) kelurahan.

Identifikasi penelitian kemudian permasalahan otoritas penanggulangan dijabarkan dalam bentuk tabulasi definisi bencana sebagai berikut :

Tabel 1 : Defenisi permasalahan otoritas PB

Jenis Kewenangan		Kondisi Otoritas PB	Argumentatif Pedukung kondisi Otoritas PB Kota Palu
Atribusi	Penetapan kebijakan PB pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;	Belum jalan	1. Dokumen RPB belum jadi salah satu dok. acuan dalam RPJMD 2. Perbedaan Waktu Penyusunan
	pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan PB;	Belum jalan	1. Tidak ada kewajiban untuk dalam SP2N untuk mempedomani RPB, 2. Asumsi besarnya kebutuhan dana untuk pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi,
	pelaksanaan kebijakankerjasama dalam PB dengan provinsi dan kabupaten lainnya;	Belum jalan	Belum pernah dilakukan baik dengan pemerintah Propinsi maupun kabupaten sekitar dalam bentuk MoU dan LoI terkait kebencanaan.
	Pengaturanpenggunaanteknologi yg berpotensi sebagaisumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;	Sebagian telah berjalan	Inisiasi pembentukan Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung sebagai pedoman penerbitan Izin Mendirikan bangunan
	perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim	Sebagian telah berjalan	1. Dalam Perizinan, belum dipersyaratkan seperti Dokumen Analisis Risiko Bencana 2. Keterlibatan sebagai anggota Tim teknis lingkungan, BKPRD dan TKPRD. 3. Keberadaan TP-SDAPB di BPBD
	Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kota.	Sudah Berjalan	1. Pengendalian pemanfaatn dana darurat/kontijensi 2. Penyaluran bantuan dari Propinsi, masyarakat dan orpol
Delegasi	Delegasi dari Walikota ke BPBD dalam dalam pengelolaan keuangan	Sudah berjalan	Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Penata-usahaan keuangan, bendahara pengeluaran dan Bendahara barang
	Delegasi dari BNPB untuk pengelolaan Dana BNPB		Satker, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
Mandat	Mandat terkait dengan fungsi komando dan koordinator pada saat tanggap darurat	Sudah Berjalan	1. BPBD yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana darurat 2. Pengawasan pelaksanaan oleh instansi terkait atas dikoordinir oleh BPBD
	Diskresi kebijakan meliputi : 1. Proses Pengadaan barang dan Jasa	Sudah Berjalan	1. Waktu proses pengadaan barang dan jasa selama 28-45 hari 2. waktu proses pencairan 4-14 hari kerja sedang Masa Tanggap hanya 14 hari (7 hari tanggap + 7 hari Pemulihan)

Lanjutan Tabel 1.

	2. Proses pencairan Belanja Tidak langsung dana darurat	namun resisten	
--	---------------------------------------------------------	----------------	--

Sumber : Rangkuman penjabaran kewenangan dalam Penanggulangan Bencana, 2017

Dari tabel defenisi permasalahan dalam otoritas penanggulangan bencana kemudia disusun alternatif (*Construct the alternatives*) sebagai berikut :

1. Otoritas atribusi penanggulangan bencana ada 2 (dua) otoritas yang belum berjalan yakni penetapan kebijakan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, dan pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana, belum berjalannya otoritas ini disebabkan :

a. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD sebagai amanat dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional belum ada muatan untuk mempertimbangkan kebijakan penanggulangan bencana dan unsur unsur penanggulangan bencana dari pencegahan, kesiapsiagaan (mitigasi), Tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi namun menekankan pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah, untuk itu diperlukan upaya yang meliputi :

1) Memanfaatkan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), sebagai celah untuk memasukkan kebijakan

penanggulangan bencana sebagai salah satu kebijakan pembangunan daerah.

2) Upaya lainnya ialah yang dapat dilakukan ialah menjamin terakomodirnya kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, melalui proses Pilkada, sebab kebijakan dan strategi dalam pembangunan daerah merupakan penjabaran dari tawaran visi dan misi saat proses pemilihan kepala daerah (pilkada), sehingga untuk memasukkan kebijakan penanggulangan bencana daerah ialah dalam proses Pilkada yakni pada saat penyampaian visi dan misi.

3) Pada bab 2 SP2N tentang asas dan tujuan tercantum bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Asas ini dapat digunakan sebagai celah untuk memnagjukan usulan penyempurnaan perangkat regulasi perencanaan pembangunan daerah seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, untuk mengakomodir kebijakan penanggulangan bencana sebagai salah satu kebijakan pembangunan daerah.
- b. Waktu penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana RPB) yang tidak sinkron dengan waktu penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), akibat keterbatasan anggaran, dan dukungan pembiayaan penyusunan dokumen dari luar Pemerintah Daerah Kota Palu, dapat dilakukan upaya yang meliputi :
 - 1) Menganggarkan dalam APBD atau dengan mengupayakan sumber pembiayaan lainnya yang sah melalui anggaran SKPD Bappeda Kota Palu sehingga dokumen RPB memiliki substansi muatan yang sinkron dan selaras dengan RPJMD.
 - 2) Mengajukan usulan kepada BNPB untuk mewajibkan kepala daerah menetapkan RPB Kota Palu sebagai dokumen jangka menengah daerah dalam bidang penanggulangan bencana melalui regulasi Peraturan Walikota, berdasarkan amanah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana sebagai dasar pelaksanaan otoritas pemerintah Daerah.
 2. Otoritas atribusi ketiga yang belum dilaksanakan ialah otoritas kebijakan kerjasama dengan propinsi dan kabupaten yang ada berbatasan langsung dengan Kota Palu (kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong), dapat dilakukan upaya :
 - a. identifikasi kebutuhan kerjasama dengan daerah sekitar, sebab terdapat kemungkinan perbedaan hal yang dikerjasamakan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya dalam arti pelibatan OPD sektor terkait
 - b. Meminta fasilitasi pemerintah propinsi melalui BPBD Propinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kerjasama antar daerah dalam bentuk Memory of Understanding (MoU) yang dijabarkan dalam bentuk Letter of Intent (Loi) dalam penanggulangan bencana sebagai contoh ialah pencegahan bencana banjir kiriman.
 3. Permasalahan otoritas pengaturan penggunaan teknologi yg berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya dan kewenangan dalam perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim diajukan alternatif ;
 - a. Persinggungan otoritas dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam menjalankan fungsi pelaksana penanggulangan bencana sebagai contoh ialah Penerbitan surat-surat perizinan dimana tidak dipersyaratkan dokumen yang menyatakan bahwa teknologi yang digunakan memiliki dampak terhadap masyarakat, dapat dilakukan melalui upaya :
 - 1) Memanfaatkan peran BPBD sebagai anggota tim teknis Lingkungan Hidup yang akan menghasilkan rekomendasi untuk menghindari dampak bencana sosial yang ditimbulkan khususnya Bencana gagal teknologi, atau

menggunakan payung hukum yang ada.

- 2) Mengajukan permohonan kepada BNPB, untuk mengeluarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Dokumen Analisa Risiko Bencana untuk masuk dalam salah satu persyaratan dalam pengurusan Izin.

4. Otoritas Mandat

- a. Otoritas mandat penanggulangan bencana, meskipun telah berjalan namun, penggunaan diskresi kebijakan dalam otoritas mandat pada saat tanggap darurat, berupa proses pencairan belanja tidak terduga khususnya Dana Darurat/Kontijensi memiliki resistensi bagi Badan Penanggulangan Bencana sebagai koordinator dan komando, dapat dilakukan upaya :

- 1) Penetapan Peraturan Walikota tentang mekanisme pengelolaan keuangan pada saat darurat bencana dengan berlandaskan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 2) Daerah menyiapkan Dana Siap Pakai (on Call) dalam struktur APBD Kota Palu sebagaimana yang dilakukan di beberapa daerah, dan kemudian menetapkan Peraturan Walikotanya Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat,

- b. Diskresi kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, termuat bahwa Pen-gadaan Barang/Jasa adalah keg-iatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebu-tuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk mem-peroleh Barang/Jasa, dengan mengurangi resistensi.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan otoritas yang bersifat atribusi dalam penanggulangan bencana sejak tahun 2005 dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2005 tentang BAKORNAS-PB, namun baru tercantum secara jelas sejak tahun 2008 dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meskipun secara kelembagaan telah berdiri sejak jaman kemerdekaan dan telah 8 (delapan) kali mengalami metamorfosis, yang berimplikasi persinggungan kewenangan dengan Undang Undang yang lebih dahulu terbentuk.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh BPBD terdapat 3 (tiga) jenis kewenangan yakni atribusi, delagasi dan mandat, dimana dari 6 (enam) otoritas atribusi BPBD Kota Palu baik yang bersumber dari Undang-Undang maupun Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana terdapat 3 (tiga) otoritas yang belum dilaksanakan yakni kewenangan penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada

wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, kewenangan pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana dan kewenangan pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain, sebanyak 1 kewenangan yang baru sebagian dijalankan yakni kewenangan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; sedang kewenangan yang sudah berjalan yakni kewenangan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kota, demikian pula dengan kewenangan delegasi baik pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD maupun APBN serta kewenangan yang bersifat mandat yang dijalankan pada saat tanggap darurat.

3. Dalam masa tanggap darurat dilakukan kewenangan yang sifatnya diskresi dalam proses pencairan dana maupun proses pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan resistensi bagi BPBD Kota Palu.

Daftar Pustaka

- Abdul A'la Al-Maududi, 1998, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Mizan, Bandung, Cetakan VII,
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia, Bandung
- Bardach, Eugene, 2012, *A Practical Guide for Policy Analysis The Eightfold Path to More Effective Problem Solving* Fourth Edition, CQ Press, an Imprint of SAGE Publications, United Kingdoms.
- Bevaola Kusumasari, 2014, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintahan Lokal*, Gava Media, Yogyakarta.
- Dunn, William, 2013, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marshall, Geoffrey, 1971, *Constitutional Theory*, oxford University Press, London,
- Moran, Michael, Rein Martin and Goodin E. Robert, 2015, *Handbook Kebijakan Publik*, Nusa Media Bandung.
- Dwinyanto, Agus, 2009, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik (Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Gava Media, Yogyakarta.
- Dwinyanto, Agus, 2012, *Manajemen Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Etridge, E Marcus and Handelman, Howard, 2016, *Politik dalam Dunia Yang Berubah*, Nusa Media Bandung.
- Fischer, Frank, Miller J. Gerand and Sidney S. Mara, 2015, *Handbook Analisis Kebijakan Publik*, Nusa Media Bandung.
- Fukuyama, Francis 2001, *The End Of History And The Last Man, Kemenangan Kapitalisme Dan Demokrasi Liberal* diterjemahkan Moh. Husein Amrullah, , Penerbit, Qalam, Yogyakarta.
- Fukuyama, Francis 2005, *State Building: Governance and World Order in the 21 Century. Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Diterjemahkan oleh A. Zaim Rafiqi, , kerjasama Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, Freedom Institute, dan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

- Handayani, Soewarno, 1990, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta
- Huda, Ni'matul, 2016, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, FH UH Press, Yogyakarta.
- Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan tata usaha negara*, Sinar harapan Jakarta.
- Kencana, Inu, 2015, *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Magnis, Franz-Suseno, Etika. 1999. *Politik: prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta,
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga*. Sage Publications: Inc
- Miriam Budiardjo, 1989, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia, Jakarta,
- Nugroho, Riant, 2011, Public Policy : Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan, Elex Media Komputindo, Jakarta**
- Parsons, Wayne, 2015, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, (cetakan kelima), kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga Balai Pustaka, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Alfabeta, Bandung.
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Buku Seru, Yogyakarta.
- Winamo, Budi, 2008, *Kebijakan Publik - Teori dan Proses*, PT. Buku Kita, Jakarta
- Weis, Carol H, 1972. *Evaluation Research : Methods for Assesing Program Effectiveness*, Prentice Hall, New Jersey
- Zainuddin, A. Rahman *Kekuasaan Dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

PENDEKATAN KOMUNIKASI PADA PENGGABUNGAN KELURAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH

Syafrianto. I ^{1*} Ernita Arif² Azwar²

¹Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas

²Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas

Email : syafri_anto@ymail.com

ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh tentang penggabungan kelurahan tidak hanya menyangkut urusan administrasi pemerintahan saja tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial budaya masyarakat, untuk itu perlu pendekatan komunikasi yang efektif antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan pemangku kepentingan di kelurahan. Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Payakumbuh. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan komunikasi pada penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pendekatan homofili yaitu atas dasar kesamaan nagari dan adat istiadat dan pendekatan empati yaitu dengan melibatkan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut paradigma Lasswell dalam komunikasi penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh yaitu Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai komunikator atau sumber pesan. Pesan adalah penggabungan kelurahan. Media yang digunakan adalah media cetak dan kegiatan tatap muka melalui rapat-rapat sosialisasi. Komunikan adalah masyarakat dan pemangku kepentingan di kelurahan. Sedangkan efek yang diharapkan adalah masyarakat dan pemangku kepentingan di kelurahan bersedia menerima penggabungan kelurahan.

Kata kunci: Pendekatan Komunikasi; Komunikasi; Penggabungan Kelurahan

Submisi : 28 Februari 2019

Pendahuluan

Pembangunan membawa perubahan dalam diri manusia, masyarakat dan lingkungan hidupnya sejalan dengan laju perkembangan dunia, terjadi pula dinamika masyarakat dan perubahan sikap terhadap nilai-nilai budaya yang sudah ada, terjadilah pergeseran sistem nilai budaya yang membawa perubahan pula dalam hubungan interaksi manusia di dalam masyarakatnya. Pembangunan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang lebih baik

dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan tujuan politiknya, juga memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri (Dilla, 2010).

Sebuah perubahan tidak akan ada artinya jika tidak diimbangi dengan penyebaran atau pendistribusian informasi. Dalam melakukan perubahan, komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Melalui komunikasi yang efektif dan

efisien, informasi tentang perubahan bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga tujuan dilakukan perubahan dapat dilakukan secara optimal.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah yang salah satunya ialah otonomi seluas-luasnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan. Penerapan otonomi daerah yang terfokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, yang lebih menitikberatkan pada pemberian kewenangan kepada daerah. Pemberian kewenangan itu dipakai untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kota Payakumbuh dengan luas $\pm 84,03$ km² yang terbagi ke dalam 76 kelurahan, 5 Kecamatan dan 10 Kanagarian dengan jumlah penduduk 123.376 jiwa (Kota Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2017) yang distribusinya tidak berimbang dan proporsional sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan secara optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan pada pasal 5 diisyaratkan bahwa jumlah penduduk untuk 1 (satu) Kelurahan di wilayah pulau

Sumatera minimal 2.000 jiwa atau 400 KK dan luas wilayah 1 (satu) kelurahan minimal 5 km², dengan bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau, sarana dan prasarana pemerintahan memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tersebut maka banyak kelurahan di Kota Payakumbuh tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud oleh regulasi tersebut, hal ini disebabkan karena jumlah penduduknya hanya berkisar antara 500 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa per kelurahan sedangkan luas wilayah kelurahan hanya berkisar antara 0,5 km² sampai dengan 4 km². Sementara kelurahan yang ada sekarang sudah terbentuk sejak lama dan telah berlangsung kegiatan pemerintahan, walaupun belum dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

Penggabungan kelurahan dalam substansinya adalah upaya untuk meningkatkan peran kelurahan untuk melaksanakan kewenangan dan fungsinya dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan urusan kemasyarakatan. Kebijakan publik tidaklah semata keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh penyelenggara negara dan pemangku pemerintahan. Kebijakan publik juga tidak semata mengkaji isi kebijakan, tapi sekaligus juga latar belakang dan proses bagaimana kebijakan itu dibuat dan diimplementasikan.

Kebijakan publik juga terkait dengan tata kelola negara dan peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai pengaturan negara (Ghafur, 2012).

Dalam upaya mewujudkan penggabungan kelurahan tersebut Pemerintah Kota Payakumbuh melahirkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh. Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Payakumbuh yaitu penggabungan kelurahan dari 2 (dua) atau lebih kelurahan yang tidak memenuhi syarat digabungkan menjadi satu kelurahan baru sehingga jumlah kelurahan di Kota Payakumbuh menjadi berkurang yang semula sebanyak 76 kelurahan kini telah dirasionalisasi menjadi 47 kelurahan pada tahun 2018.

Penggabungan kelurahan tersebut akan berhasil apabila tidak ada penolakan dari masyarakat, dimana kondisi masyarakat di kelurahan yang telah terbentuk sejak lama sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, disini tidak hanya menyangkut penggabungan pemerintahan kelurahan saja tetapi juga menyangkut penggabungan antara beberapa kelembagaan seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta lembaga kemasyarakatan lainnya. Penggabungan kelurahan juga berkaitan dengan budaya masyarakat yang telah lama terbentuk, untuk mengatasi persoalan tersebut perlu melakukan komunikasi yang baik antara pemerintah Kota Payakumbuh sebagai komunikator dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di kelurahan. Dalam mewujudkan hal itu tentu membutuhkan pendekatan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai

komunikator dengan masyarakat sebagai komunikan.

Bagaimana penyampaian pesan yang baik tentu sangat diperlukan agar pesan yang disampaikan tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara baik dan utuh tanpa adanya penolakan. Bagaimana pendekatan komunikasi pada penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh menjadi hal yang akan dituangkan dalam penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, kita dituntut untuk tidak hanya memahami prosesnya, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan kita secara kreatif. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah yaitu dimana makna yang distimulasikan sama atau serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, bahkan komunikasi telah menjadi suatu fenomena bagi terbentuknya suatu masyarakat atau komunitas yang terintegrasi oleh informasi, dimana masing-masing individu didalam masyarakat itu sendiri saling berbagi informasi untuk mencapai tujuan bersama (Rohim,2016).

Terdapat banyak sekali definisi tentang komunikasi yang dirumuskan oleh para ahli. Masing-masing memiliki penekanan dan arti yang berbeda satu sama lainnya. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *communis* yang artinya “sama”, *communico*, *communication*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (*to make common*). Istilah pertama (*communis*) adalah istilah yang

paling sering sebagai asal usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Akan tetapi defenisi-defenisi kontemporer menyarankan bahwa komunikasi merujuk pada cara berbagai hal-hal tersebut, seperti dalam kalimat kita berbagi pikiran, kita mendiskusikan makna dan kita mengirimkan pesan (Mulyana, 2009).

Komunikasi adalah salah satu dari aktivitas manusia dan suatu topik yang amat sering diperbincangkan sehingga kata komunikasi itu sendiri memiliki arti yang beragam. Stephen W Littlejohn (Morissan, 2009) mengatakan bahwa “*communication is difficult to define. The word is abstract and, like most terms, posses numerous meaning*” (Komunikasi sulit untuk didefenisikan. Kata komunikasi bersifat abstrak, seperti kebanyakan istilah, memiliki banyak arti). Kata komunikasi menjadi salah satu kata yang paling sering digunakan dalam percakapan, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin *communis* yang artinya membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari kata *communico* yang artinya membagi. Menurut Everett M Rogers dalam (Cangara, 2014) mendefenisikan komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Kemudian defenisi ini dikembangkan bersama dengan Lawrence D Kincaid (Cangara, 2014) sehingga melahirkan suatu defenisi yang lebih maju dengan menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama

lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

Menurut Muhammad (2005) komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun non verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Si pengirim pesan dapat berupa seorang individu, kelompok atau organisasi. Begitu juga halnya dengan si penerima pesan dapat berupa seorang anggota organisasi, seorang kepala bagian, pimpinan, kelompok orang dalam organisasi, atau organisasi secara keseluruhan. Istilah proses maksudnya bahwa komunikasi itu berlangsung melalui tahap-tahap tertentu secara terus menerus, berubah ubah dan tidak ada henti-hentinya. Proses komunikasi merupakan proses yang timbal balik karena antara si pengirim dan si penerima saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan perubahan tingkah laku maksudnya dalam pengertian yang luas yaitu perubahan yang terjadi di dalam diri individu mungkin dalam aspek kognitif, afektif atau psikomotor.

Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat dilancarkan secara efektif, para peminat komunikasi seringkali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya, *The Structure and Function of Communication in Society*. Lasswell mengatakan bahwa cara yang terbaik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut: “*Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?* (siapa mengatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan efek bagaimana)”.

Merujuk pada paradigma Lasswell diatas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 (lima) unsur komunikasi sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan tersebut, yaitu: 1) Komunikator, 2) Pesan, 3)

Media atau saluran, 4) Komunikan, 5) Efek. Berdasarkan paradigma Lasswell tersebut komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2005). Model yang diutarakan Laswell tersebut, secara jelas mengelompokkan elemen-elemen mendasar dari komunikasi kedalam lima elemen yang tidak bisa dihilangkan salah satunya (Laswell dalam Suryanto, 2015).

Unsur unsur komunikasi dari paradigma Laswell tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Who*
Who adalah menunjuk kepada siapa orang yang mengambil inisiatif dalam memulai komunikasi, yang memulai komunikasi ini dapat berupa seseorang dan dapat pula sekelompok orang seperti organisasi atau persatuan.
- b) *Says What*
Says What adalah berhubungan dengan isi komunikasi atau apa pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. umumnya kita menanyakan pertanyaan ini dalam pemikiran kita dalam berkomunikasi.
- c) *In Which Channel*
In Which Channel atau media apa, yang dimaksudkan dengan media adalah alat komunikasi, dalam hal ini tidak semua media cocok untuk maksud tertentu. kadang-kadang suatu media lebih efisien untuk maksud tertentu tetapi belum untuk maksud yang lain
- d) *To Whom*
To Whom maksudnya menanyakan siapa yang menjadi audience atau penerima dari komunikasi. atau dengan kata lain kepada siapa

komunikator berbicara atau kepada siapa pesan ingin disampaikan. Penerima pesan cenderung berbeda dalam banyak hal seperti pengalamannya, kebudayaannya, pengetahuannya dan usianya.

- e) *With What Effect*
What Effect atau apa efek dari komunikasi tersebut, pertanyaan mengenai efek komunikasi ini dapat menanyakan dua hal yaitu apa yang ingin dicapai dengan hasil komunikasi tersebut dan apa yang dilakukan orang sebagai hasil dari komunikasi (Muhammad, 2005)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana data-data yang diperoleh dari penelitian disajikan dalam bentuk narasi dengan penggalian informasi yang sedemikian rupa sehingga realita dari permasalahan penelitian dapat dipahami secara rinci dan mendalam. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2016), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dimaksud oleh objek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks kusus dan alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah fakta dan kenyataan sosial yang terjadi mengenai pendekatan budaya dalam komunikasi penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh.

Informan yang menjadi subjek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan mekanisme sampel purposif

yang terdiri dari informan pelaku dan informan pengamat. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Moleong (2016) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dalam penelitian ini adalah proses memperoleh keterangan atau informasi dari informan yang sudah ditetapkan untuk memperoleh keterangan dalam mencapai tujuan penelitian, wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan pihak yang dapat memberikan informasi dan berkompeten sesuai dengan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan observasi partisipan dan studi dokumentasi terhadap kegiatan penggabungan kelurahan, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (Ardianto, 2011) ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan atau verifikasi data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data yang diperoleh di lapangan. Analisis triangulasi menurut Kriyantono (2006) adalah menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Untuk itu peneliti dapat melakukan dengan jalan: 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, 2) Mengecek dengan berbagai sumber data, 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data

dapat dilakukan. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber data yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, dan membandingkan hasil wawancara dengan informan satu dengan informan lainnya.

Hasil Penelitian

Keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penggabungan kelurahan sangat ditentukan oleh pendekatan yang dilakukan terhadap publik dan pemangku kepentingan di kelurahan. Dalam melakukan pendekatan terhadap publik tersebut dibutuhkan peran dari seorang komunikator yaitu Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan di kelurahan. Dalam pendekatan komunikasi penggabungan kelurahan perlu dirancang satu pola komunikasi melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan merancang suatu konsep kegiatan (packaging) pesan yang dibuat dengan menarik dan penuh ajakan. Selain itu pemilihan saluran (media) juga mempengaruhi sejauh mana informasi yang disampaikan mampu mempengaruhi animo masyarakat yang tadinya apatis dengan kebijakan pemerintah daerah menjadi turut peduli untuk keberhasilan program pemerintah.

Melalui pendekatan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai komunikator dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di kelurahan maka pelaksanaan penggabungan kelurahan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk menyampaikan pesan kepada

masyarakat akan pentingnya penggabungan kelurahan, maka diperlukan suatu bentuk sosialisasi terhadap masyarakat dengan tetap memperhatikan budaya masyarakat setempat (kearifan lokal). Kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh tentang penggabungan kelurahan tidak hanya menyangkut urusan administrasi pemerintah saja tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial budaya masyarakat, karena itu pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di masyarakat serta lembaga terkait lainnya. Karena kalau tidak dikomunikasikan dengan baik dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam masyarakat yang berdampak buruk pada keberhasilan penggabungan kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pendekatan komunikasi pada penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui:

Pendekatan Homofili

Dalam menerapkan pendekatan komunikasi homofili Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan pendekatan komunikasi atas dasar kesamaan nagari, Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat menyampaikan bahwa kelurahan yang digabung adalah kelurahan dalam satu nagari yang sama, kelurahan yang digabung adalah kelurahan yang masih dalam wilayah kenagarian yang sama. Interaksi antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan masyarakat dalam sosialisasi melibatkan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku tokoh masyarakat. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di kelurahan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dilibatkan dan menjadi anggota Tim Fasilitasi Penggabungan

Kelurahan dan ikut serta dalam rapat sosialisasi di kelurahan. Dengan dilibatkannya Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Tim Fasilitasi Penggabungan Kelurahan maka akan membantu Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai komunikator.

Herbert W. Simons (Rakhmat: 2012) menerangkan mengapa komunikator yang dipersepsi memiliki kesamaan dengan komunikan cenderung dapat berkomunikasi lebih efektif karena:

1. Kesamaan mempermudah proses penyandian (*decoding*), Dengan melibatkan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam komunikasi penggabungan kelurahan memudahkan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat karena memudahkan dalam penyandian pesan yang disampaikan. Ketua Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dapat membantu Pemerintah Kota Payakumbuh dalam berkomunikasi dengan kelompok masyarakat yang menolak terjadinya penggabungan, sehingga masyarakat dapat menerima karena yang berbicara adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai tokoh masyarakat di kelurahan.
2. Kesamaan membantu membangun premis yang sama, premis yang sama mempermudah proses deduktif. Pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat setempat. Kesamaan yang dibangun adalah kesamaan adat dalam satu nagari karena kelurahan yang digabung berada dalam satu nagari.

3. Kesamaan menyebabkan komunikator tertarik pada komunikator. Kita cenderung menyukai orang-orang yang memiliki kesamaan disposisional dengan kita, karena tertarik pada komunikator kita cenderung menerima gagasan-gagasannya. Ketertarikan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh adalah karena Pemerintah Kota Payakumbuh melibatkan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Tim Fasilitasi Penggabungan Kelurahan yang merupakan representasi dari tokoh masyarakat lembaga adat yang ada di nagari.

Pendekatan Empati

Empati yang dalam bahasa aslinya adalah *emphaty* adalah suatu derajat kemampuan seseorang untuk membayangkan peranan orang lain, semakin tinggi empati seseorang maka semakin mudah membayangkan peranan-peranan orang lain, dan tentu saja sebaliknya semakin rendah empati seseorang maka semakin sulit untuk membayangkan peranan yang dimiliki orang lain. Jadi orang yang empatinya rendah akan semakin kesulitan seandainya dia diminta untuk melakukan peranan-peranan orang lain (Sutaryo, 2005).

Dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di kelurahan Pemerintah Kota Payakumbuh membangun empati dengan menyerahkan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri keinginan mereka agar bersedia digabung, masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam menyampaikan pesan Pemerintah Kota Payakumbuh terkesan seakan-akan mereka tidak memaksakan untuk dilakukan

penggabungan, masyarakat dilibatkan dan diberi kebebasan untuk menentukan sendiri sesuai opsi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh antara lain:

1. Masyarakat dilibatkan dalam menentukan dengan kelurahan mana mereka bersedia bergabung.
2. Masyarakat dilibatkan diberi kewenangan untuk menentukan sendiri nama kelurahan baru hasil penggabungan.
3. Masyarakat dilibatkan diberi kewenangan untuk menentukan sendiri dimana kantor kelurahan baru hasil penggabungan.

Daya tarik pesan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh mampu membuat masyarakat tidak bergejolak dalam menerima perubahan yang dijalankan, masyarakat merasa tertarik dengan perubahan yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui program penggabungan kelurahan ini tentu tidak terlepas dari peran komunikator yaitu Pemerintah Kota Payakumbuh yang mampu membangun empati dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Komunikasi dua arah yang dibangun oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berjalan dengan baik. Masyarakat menjadi tertarik karena merasa ada harapan yang lebih baik dimasa yang akan datang sesuai dengan pesan-pesan pembangunan yang disampaikan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui penggabungan kelurahan adalah dengan digabungkannya kelurahan yang tidak memenuhi syarat untuk berdiri sendiri maka kelurahan tersebut akan memperoleh peningkatan anggaran kelurahan dan pelayanan publik menjadi lebih meningkat.

Lasswell mengatakan bahwa cara yang terbaik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut: *“Who Says What In Which Channel To*

Whom With What Effect? (siapa mengatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan efek bagaimana)”. Berdasarkan paradigma Lasswell tersebut komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2005).

Merujuk pada paradigma Lasswell bahwa komunikasi meliputi 5 (lima) unsur komunikasi sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan tersebut, yaitu: 1) Komunikator, 2) Pesan, 3) Media atau saluran, 4) Komunikan dan 5) Efek. Berkaitan dengan penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh dengan merujuk pada unsur komunikasi menurut Lasswell dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikator

Komunikator dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Payakumbuh yang memulai proses komunikasi terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan di kelurahan dengan melibatkan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada masing-masing nagari yang menjadi sasaran penggabungan kelurahan sebagai anggota Tim Fasilitasi Penggabungan Kelurahan untuk membantu menyampaikan pesan-pesan penggabungan kelurahan kepada masyarakat. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dilibatkan menjadi anggota Tim Fasilitasi Penggabungan Kelurahan, setelah komunikasi terjalin dengan baik bersama Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) selanjutnya Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan rapat-rapat sosialisasi dengan mengundang unsur-unsur dan pemangku kepentingan dalam masyarakat untuk membicarakan penggabungan kelurahan. Pemerintah Kota Payakumbuh melalui sosialisasi menyampaikan bahwa tujuan

penggabungan kelurahan adalah: 1)melaksanakan fungsi pemerintahan, 2)meningkatkan pelayanan, 3)mengembangkan potensi wilayah kelurahan dan 4)meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

2. Pesan

Pesan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai komunikator dapat dalam bentuk sederhana namun dapat memberikan pengaruh yang efektif terhadap masyarakat. Isi pesan adalah sebagai materi atau bahan dalam pesan yang telah dipilih oleh sumber untuk mengatakan maksudnya. Isi pesan yang disampaikan meliputi informasi, kesimpulan yang ditarik dari pertimbangan yang diusulkan (Effendy, 2011).

Desain pesan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di kelurahan adalah pesan-pesan yang dibuat secara persuasif dan bersifat ajakan, tidak adanya unsur paksaan, demokratis dan terbuka serta gagasan tentang penggabungan kelurahan diupayakan sebagai suatu keinginan bersama antara masyarakat dengan pemerintah untuk kemajuan Kota Payakumbuh.

Sebagaimana Suryanto (2015) mengatakan bahwa pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa gagasan, pendapat, yang sudah dituangkan dalam suatu bentuk dan melalui lambang komunikasi diteruskan kepada orang lain.

Penyampaian pesan dalam komunikasi penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh tetap memperhatikan kearifan lokal, bahwa dengan

dilakukannya penggabungan kelurahan tidak akan merubah wilayah adat dan budaya setempat karena yang digabungkan hanyalah wilayah administrasi pemerintahan saja, wilayah adat dan budaya tetap menjadi domainnya iniak mamak melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Bentuk pesan yang dikemas oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu: 1) Informatif, Pemerintah Kota Payakumbuh memberikan informasi tentang kelebihan penggabungan kelurahan yaitu kelurahan penggabungan akan mendapatkan anggaran tambahan dari Pemerintah Kota Payakumbuh dan kelurahan yang melakukan penggabungan diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri. 2) Persuasif, Pemerintah Kota Payakumbuh mengajak dan mengupayakan bahwa penggabungan kelurahan adalah sebagai suatu keinginan bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk kepentingan bersama.

3. Media

Media yang digunakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh adalah melalui media cetak mengadakan acara tatap muka dalam mensosialisasikan penggabungan kelurahan kepada masyarakat, rapat tatap muka tersebut melibatkan pemangku kepentingan di masyarakat. rapat dan sosialisasi dilakukan di tingkat kelurahan, kanagarian, dan kecamatan. Kegiatan sosialisasi dilakukan beberapa kali dengan waktu yang disesuaikan atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di kelurahan hingga diperoleh kesepakatan yang

dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.

4. Komunikan

Komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran atau penerima pesan dalam proses komunikasi, komunikan berperan sebagai penerima berita atau pesan. Dalam menentukan komunikan Pemerintah Kota Payakumbuh melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di kelurahan yang terdiri dari LPM, RT, RW, Bundo Kanduang, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat, seluruh pemangku kepentingan diundang dalam rapat-rapat sosialisasi penggabungan kelurahan yang dalam pemilihannya diserahkan kepada Lurah, LPM, RT dan RW dalam menentukan siapa saja yang diundang dalam rapat-rapat sosialisasi penggabungan kelurahan.

5. Efek

Dalam berkomunikasi yang terpenting adalah bagaimana caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator itu menimbulkan dampak atau efek tertentu pada komunikan. Komunikasi harus mempunyai efek menambah pengetahuan, mengubah sikap, dan menggerakkan perilaku kita. Efek yang terjadi pada komunikan menurut Effendy (2008) dapat diklasifikasikan menurut kadarnya terdapat tiga aspek yaitu: 1) Efek kognitif 2) Efek afektif dan 3) Efek behavioral.

Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan pendekatan komunikasi dengan masyarakat atas dasar kesamaan nagari, bahwa kelurahan yang digabung adalah kelurahan dalam satu nagari yang sama, serta Pemerintah Kota Payakumbuh membangun empati dengan

menyerahkan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri dengan kelurahan mana mereka bersedia bergabung, menentukan sendiri nama kelurahan baru dan menentukan sendiri dimana kantor lurah baru, menimbulkan dampak bahwa masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Disamping itu dengan melibatkan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai tokoh masyarakat dapat membantu Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberi informasi dan pesan kepada masyarakat tentang penggabungan kelurahan. Informasi yang disampaikan dapat dengan mudah dicerna oleh masyarakat. Setelah dilakukan sosialisasi masyarakat menjadi tertarik dan bersedia untuk menerima penggabungan kelurahan.

Kesimpulan

Pendekatan komunikasi pada penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pendekatan homofili yaitu atas dasar kesamaan nagari dan pendekatan empati yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, Pemerintah Kota Payakumbuh menggunakan unsur kesamaan adat istiadat dan kesamaan nagari dalam melakukan penggabungan kelurahan. Pemangku kepentingan dikelurahan dilibatkan dalam kegiatan komunikasi dengan Pemerintah Kota Payakumbuh, sehingga terbangun empati antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Mengacu pada paradigma Lasswell dalam Pendekatan Komunikasi Penggabungan Kelurahan di Kota Payakumbuh adalah Pemerintah Kota

Payakumbuh dengan melibatkan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai komunikator atau sumber pesan, sedangkan pesan yang ingin disampaikan adalah penggabungan kelurahan. Media yang digunakan adalah media cetak dan kegiatan tatap muka melalui rapat-rapat sosialisasi, pesan disampaikan melalui media cetak dan pada saat rapat-rapat sosialisasi dengan masyarakat. Komunikasikan adalah masyarakat selaku pemangku kepentingan yang terdiri dari LPM, RT, RW, Bundo Kanduang, Karang Taruna dan tokoh masyarakat di kelurahan. Efek yang diharapkan adalah Pemerintah Kota Payakumbuh berhasil mengajak masyarakat melalui unsur-unsur tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan di kelurahan untuk bersedia melakukan penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh.

Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations: Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh. 2017. *Kota Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2017*. Diterbitkan oleh: BPS Kota Payakumbuh.
- Cangara, Hafied. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi. Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dilla, Sumadi. 2010. *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Effendy, Onong Uchjana. 2011. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ghafur, Hanief Saha. 2012. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 25, No. 4, Oktober–Desember 2012, 263–270.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: disertai contoh praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan. 2009. *Teori Komunikasi Organisasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Arni. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyana, Deddy, 2009, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 *Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh*. Payakumbuh: 22 Mei 2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 *Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan*. Jakarta: 10 Oktober 2006.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2012. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rohim, Syaiful. 2016. *Teori Komunikasi Presfektif, Ragam, Dan Aplikasi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Suryanto. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sutaryo. 2005. *Sosiologi Komunikasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: 30 September 2014.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: 15 Oktober 2004.